

**TAMBANG DAN RESISTENSI LOKAL
DI MANGGARAI, FLORES**
Narasi Pembangunan Tripolar Asimetris

Ketentuan Pidana

Pasal 113 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**TAMBANG DAN RESISTENSI LOKAL
DI MANGGARAI, FLORES**
Narasi Pembangunan Tripolar Asimetris

Max Regus



PENERBIT PT KANISIUS

Tambang dan Resistensi Lokal di Manggarai, Flores

1019003044

© 2019 - PT Kanisius

PENERBIT PT KANISIUS (Anggota IKAPI)

Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA

Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349

E-mail : office@kanisiusmedia.co.id

Website : www.kanisiusmedia.co.id

Cetakan ke-	3	2	1
Tahun	21	20	19

Editor : Rosa de Lima

Desain isi : Oktavianus

Desain Sampul : Joko Sutrisno

ISBN 978-979-21-6160-1

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

Dicetak oleh PT Kanisius Yogyakarta



Kata Pengantar

Saya gembira karena naskah yang sudah lama tersimpan hanya sekadar sebuah *file* karya akademik terbatas, akhirnya dapat diterbitkan untuk kebutuhan publik yang lebih luas. Buku *Tambang dan Resistensi Lokal di Flores*, merupakan revisi dan penyempurnaan Tesis yang saya kerjakan hampir sepuluh tahun lalu di Universitas Indonesia ketika hendak menyelesaikan Program Master (S2) di bidang Sosiologi.

Meskipun naskah ini sudah berusia hampir satu dekade, terhimpit di antara *paper-paper* untuk proyek *disertasi* dalam beberapa tahun belakangan ini, nilai *aktualitas* dan *urgensitas* tidak hilang sama sekali. Selain sebagai sebuah *rekaman* akademik tentang potongan kisah pembangunan di ranah lokal yang pernah begitu mencemaskan, naskah ini juga bisa menjadi contoh yang baik tentang perjuangan sosial melawan sisi destruktif pembangunan.

Saya perlu mengemukakan bahwa karya ini bisa ditempatkan dan dianggap sebagai salah satu rujukan bagi studi-studi tentang atau seputar *resistensi lokal* yang marak di Indonesia, namun yang barangkali juga belum banyak dilihat dalam terang keilmuan. Dengan begitu, bagaimanapun, karya ini pasti memberikan sumbangan akademik yang tidak kecil.

Untuk sampai pada titik ini, ada banyak pihak yang telah mendukung saya dalam proses penyelesaian buku ini. Terutama, Program Pasca Sarjana Sosiologi Universitas Jakarta—pembimbing saya saat itu Profesor Dr. Dody Proyogo dan penguji tesis saya Dr. Francisia Saveria Sika Seda (Dr. Ery Seda). HU Kompas juga memberikan dukungan untuk proses pengumpulan data. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Kongregasi Fransiskan Indonesia di Jakarta—Pater Dr. Peter Aman, OFM dan Saudara Valens Dulmin—di mana saya menerima banyak informasi dan data yang saya gunakan dalam buku ini. Kebajikan Profesor Herman L. Beck, pembimbing studi S3 saya di Universitas Tilburg—Belanda tidak akan terlupakan. Terima kasih kepada Saudara Boni Hargens, yang pada saat mengerjakan tesis ini selalu memberikan dukungan dengan menawarkan *kopi hangat* di salah satu *Café* di lingkungan FISIP UI Depok, bahkan bantuan-bantuan hingga saat ini. Terima kasih untuk Om Faby di Jakarta, Romo Jossy Erot, Bapa Viktor Regus dan Mama Theresia Jaira, adik-adik dan ponakan-ponakan saya di Ruteng Flores. Terima kasih kepada Keuskupan Ruteng yang bersedia membantu penyelesaian buku ini. Terima kasih kepada Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) St. Paulus Ruteng, tempat saya mengajar, untuk dukungan. Akhirnya, tanpa kerelaan Penerbit Kanisius—melalui Saudari Rosa de Lima, Oktavianus, dan Joko Sutrisno—naskah ini mungkin tidak bisa hadir di tangan Anda. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga buku ini bermanfaat.

Ruteng, Flores, Juni 2019

Max Regus

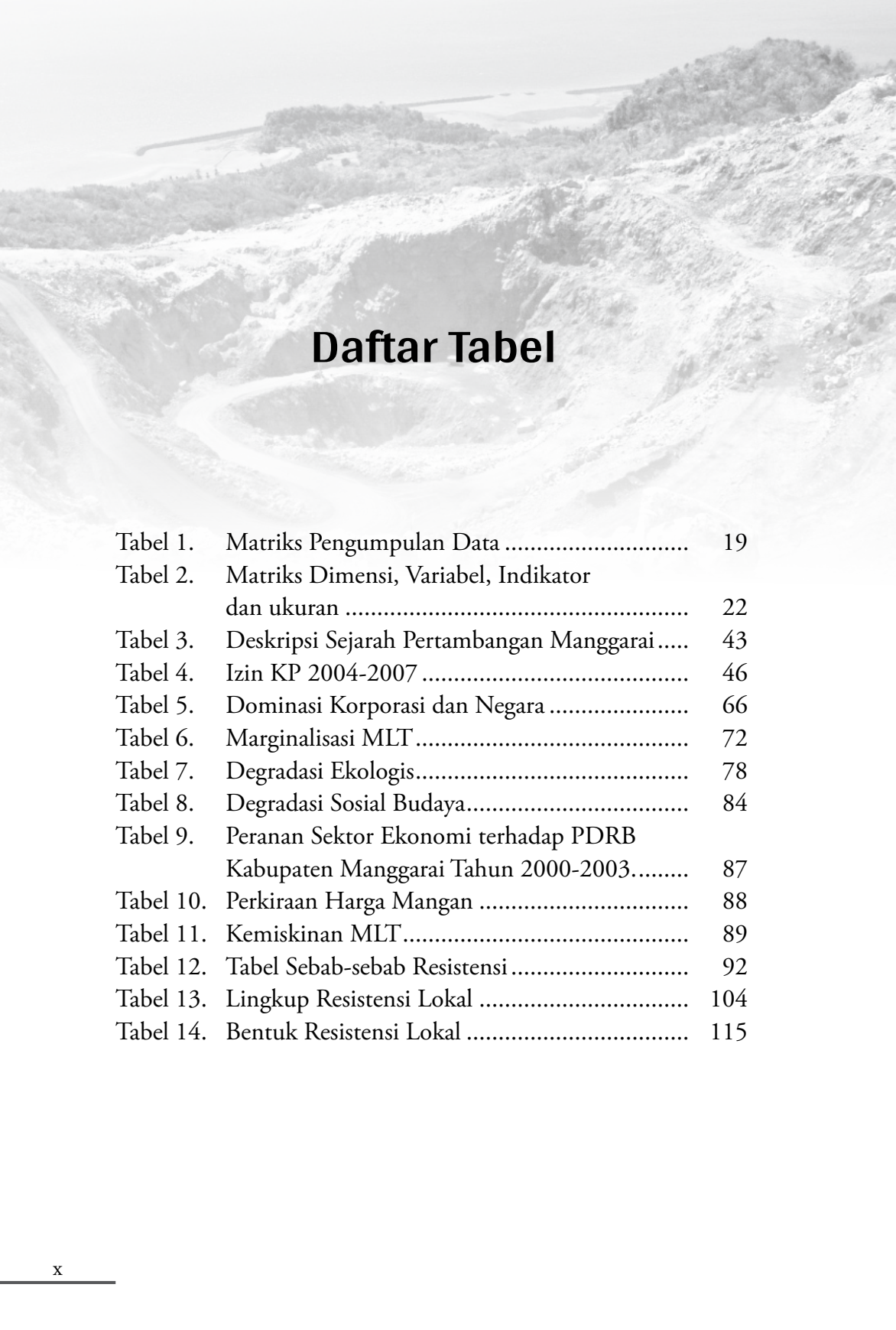


Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
BAB 1 LOKALITAS, TAMBANG, DAN NARASI BESAR PEMBANGUNAN	1
A. Manggarai, Pembangunan, dan Dinamika Tripolar	1
B. Tujuan dan Signifikansi Studi	10
C. Penutup.....	10
BAB 2 FOKUS DAN METODE KAJIAN.....	12
A. Pengantar.....	12
B. Fokus Kajian	12
C. Metode Kajian.....	17
D. Penutup.....	23
BAB 3 KAJIAN KEPUSTAKAAN	24
A. Pengantar	24
B. Tinjauan Kepustakaan	25

	C. Analisis.....	32
	D. Penutup.....	33
BAB 4	SEKILAS SEJARAH PERTAMBANGAN DI MANGGARAI	34
	A. Pengantar	34
	B. Manggarai sebagai Konteks Persoalan	35
	C. Kosmologi Manggarai: Pandangan tentang Wujud Tertinggi, Manusia dan Alam	38
	D. Sekilas Sejarah Pertambangan di Manggarai....	43
	E. Penutup.....	47
BAB 5	KERANGKA KONSEPTUAL	49
	A. Pengantar.....	49
	B. Negara, Korporasi, Komunitas Lokal	49
	C. Hubungan Tripolar	51
	D. Resistensi.....	56
	E. Penutup.....	59
BAB 6	SEBAB-SEBAB RESISTENSI LOKAL	60
	A. Pengantar	60
	B. Sebab-sebab Resistensi	60
	C. Analisis	90
	D. Penutup.....	92
BAB 7	DINAMIKA RESISTENSI LOKAL.....	93
	A. Pengantar	93
	B. Desentralisasi dan Komunitas Lokal.....	94
	C. Aktor Lokal.....	98
	D. Lingkup Resistensi.....	101
	E. Bentuk Resistensi	104
	F. Analisis.....	116
	G. Penutup.....	117

BAB 8	KESIMPULAN DAN PENUTUP	118
A.	Pendahuluan	118
B.	Pencapaian	119
C.	Kesimpulan Teoretis.....	122
D.	Rekomendasi.....	131
E.	Penutup.....	133
REFERENSI.....		135
BIOGRAFI		146



Daftar Tabel

Tabel 1.	Matriks Pengumpulan Data	19
Tabel 2.	Matriks Dimensi, Variabel, Indikator dan ukuran	22
Tabel 3.	Deskripsi Sejarah Pertambangan Manggarai	43
Tabel 4.	Izin KP 2004-2007	46
Tabel 5.	Dominasi Korporasi dan Negara	66
Tabel 6.	Marginalisasi MLT	72
Tabel 7.	Degradasi Ekologis.....	78
Tabel 8.	Degradasi Sosial Budaya.....	84
Tabel 9.	Peranan Sektor Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Tahun 2000-2003.....	87
Tabel 10.	Perkiraan Harga Mangan	88
Tabel 11.	Kemiskinan MLT	89
Tabel 12.	Tabel Sebab-sebab Resistensi	92
Tabel 13.	Lingkup Resistensi Lokal	104
Tabel 14.	Bentuk Resistensi Lokal	115



Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Kabupaten Manggarai	35
Gambar 2. Hubungan tripolar simetris.....	54
Gambar 3. Hubungan tripolar asimetris	55
Gambar 4. Analisis sebab-sebab resistensi	90
Gambar 5. Dinamika resistensi lokal	116
Gambar 6. Dinamika hubungan tripolar	124
Gambar 7. Posisi Institusi Gereja Katolik	126



BAB 1

LOKALITAS, TAMBANG, DAN NARASI BESAR PEMBANGUNAN

A. Manggarai, Pembangunan, dan Dinamika Tripolar

Studi ini,¹ mengambil isu tambang (pengelolaan Sumber Daya Alam, SDA) sebagai kasus tunggal, hendak mengedepankan ‘lokalitas’ menghubungkan dimensi ini dengan tiga elemen kunci; Manggarai (Flores, NTT) sebagai konteks studi, pembangunan sebagai kerangka kerja narasi, dan dinamika tripolar antara negara, pasar, dan masyarakat sebagai substansi yang diperhadapkan dengan narasi besar pembangunan (lokal). Keterhubungan tiga elemen kunci ini akan merujuk pada pemunculan ‘resistensi’ baik sebagai temuan teoretik maupun gerakan praktis dalam studi

¹ Buku ini merupakan pengolahan kembali Tesis S2 penulis yang dibuat untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Magister di Departemen Sosiologi Universitas Indonesia, Depok (2009). Sebagian kecil Tesis pernah diterbitkan dalam M. Regus. (2011). *Tambang dan Perlawanan Rakyat*, MASYARAKAT, Jurnal Sosiologi, Vol. 16, No. 1, Januari: 1-26. Selain itu, sebuah artikel pendek tentang isu ini juga pernah ditulis dan dimuat di Max Regus. (2017). *Church-Based Resistance to Mining in Indonesia*, INSIDE Indonesia, Edition 130: Oct—Dec 2017. Link. <http://www.insideindonesia.org/church-based-resistance-to-mining-in-manggarai>.

ini. Dengan itu, ‘analisis legal’ bukan menjadi pokok kajian, meskipun sejumlah regulasi juga disinggung dalam kajian ini.

Dalam kurun satu dekade ini, Flores, sebuah pulau kecil, bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), meramaikan diskusi nasional dan global seputar ‘perlawanan lokal’ terhadap tambang dalam narasi besar pembangunan. Daerah Manggarai menjadi salah satu sentrum diskusi di sekitar persoalan tambang.²

Dari catatan Koordinator Justice, Peace, and the Integrity of Creation Flores, Pastor Simon Suban SVD, lebih dari 26.000 hektar areal tambang mangan berada di wilayah bagian utara Kabupaten Manggarai, terutama di Kecamatan Reok dan Reok Barat. Ribuan hektar areal tambang berada dalam penguasaan 22 pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Di antara 22 IUP itu, ada beberapa IUP yang dikuasai hingga 2029.³

Pada level spesifik, kebijakan dan praktik tambang di Manggarai, khususnya, dan Provinsi NTT umumnya, menjadi pusat sorotan banyak aktor dan institusi. Kecemasan tentang serangan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat lokal menjadi salah satu isu sentral yang dihubungkan dengan praktik tambang di daerah ini.⁴

Beberapa pertanyaan mendasar diajukan dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimana dinamika hubungan antara negara, korporasi, dan komunitas lokal dalam kasus tambang di Manggarai, Flores, NTT? *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang

² Persoalan utama dalam konteks ini adalah munculnya eksplorasi dan eksploitasi yang semakin meluas tanpa memperhitungkan kondisi komunitas lokal. Belum lagi ditambah dengan Kuasa Pertambangan (KP) yang banyak muncul di pulau ini.

³ Pendapat Simon Suban Tukan, Ketua JPIC SVD Provinsi Ruteng yang dikutip dalam <http://regional.kompas.com/read/2013/01/09/02353966/Tambang.di.Manggarai>. Belum. Disertai. Smelter/, diunduh pada 15 Januari 2018.

⁴ Siprianus Edi Hardum (2013). Kasus Tambang Manggarai- Komnas HAM Minta Pemda Tidak Kriminalisasi Warga. Berita Satu, 26 Mei. Diunduh pada 4 Oktober 2017 dari <http://www.beritasatu.com/nasional/116019-kasus-tambang-manggarai-komnas-ham-minta-pemda-tidak-kriminalisasi-warga.html/>, diunduh pada 15 Januari 2018.

memengaruhi dan menyebabkan resistensi lokal dalam kasus tambang di Manggarai? *Ketiga*, bagaimana aktor-aktor lokal membangun resistensi lokal terhadap tambang? *Keempat*, apa/ siapa aktor lokal dominan dalam menggagas resistensi lokal terhadap tambang?

Di titik awal, studi ini hendak menegaskan bahwa Manggarai adalah sebuah definisi tentang 'keberlimpahan mineral'.⁵ Potensi mineral di wilayah ini umumnya berdasarkan pemetaan geologi dan hasil penyelidikan geokimia regional dan eksplorasi ternyata memiliki sejumlah kandungan mineral dan panas bumi. SDA ini menyebar di beberapa lokasi. Beberapa jenis mineral dapat disebutkan seperti emas (Au) dan Mangan (Mn). Logam dasar dan mineral-mineral lain juga ada di sejumlah tempat.

Dari semua kandungan mineral ini, mangan (Mn) adalah salah satu jenis mineral paling dominan dan paling diincar yang kandungannya tersebar di beberapa lokasi. Bisa disebutkan di sini beberapa area mangan, seperti: Kecamatan Cibal, Reok, dan Satar Mese. Secara lebih khusus, sebaran mangan terdapat di wilayah Golo Rawang, Satar Punda, Satar Teu, Ponglalap, Rokan, Tumbak, dan Waso Kecamatan Lambaleda, Merong di Kecamatan Sambi Rampas (Kabupaten Manggarai Timur).

Jenis mineral seperti logam dasar tersebar di wilayah Kecamatan Reok. Emas (Au) ditemukan di daerah Kecamatan Elar, Lambaleda, Sambi Rampas, dan Kabupaten Manggarai Timur. Sebaran mineralisasi mangan (Mn) halus dengan ketebalan kurang dari 1 cm di Kabupaten Manggarai Barat ditemukan di daerah Metang, Desa Waebuka, Kecamatan Kuwus. Selain itu, endapan mangan (Mn) juga dijumpai di Nangasu, Desa Mbakung; Melana dan Mena Desa Nggilat serta Lake Desa Rokap.⁶

⁵ Mencakup tiga kabupaten; Manggarai Barat, Manggarai Tengah dan Manggarai Timur.

⁶ Bdk. Sukmana dalam laporan Hasil-Hasil Kegiatan Lapangan dan Non Lapangan ta-

Secara umum, dasar pengaturan dan kebijakan pengelolaan pertambangan atau bahan galian ialah Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang lazim disingkat sebagai Undang-undang Pokok Pertambangan (UUPP). Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penggunaan Pasal 33 ayat 3 ini dilakukan dengan anggapan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan merupakan milik bersama (*common property*) dalam hal ini nasional dan digunakan untuk kesejahteraan serta sebesar-besarnya bagi kepentingan kemakmuran rakyat dari satu generasi ke generasi berikutnya secara berkelanjutan (*sustainability principle*).

Bahan galian tambang adalah sumber daya alam yang tak terbarukan (*unrenewable resources*) dan dalam pengelolaan serta pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen ruang (tata ruang) yang ditangani secara holistik dan integratif dengan memerhatikan empat isu pokok, yaitu: aspek pertumbuhan (*growth*), aspek pemerataan (*equity*), aspek lingkungan (*environment*), dan aspek konservasi (*conservation*).⁷

Meskipun potensi sumber daya alam di Manggarai sangat menjanjikan bila dibandingkan dengan luasnya daerah ini, namun tidak serta-merta apa yang disebut dengan ‘eksploitasi’ mineral menjadi suatu kewajiban untuk dilakukan dengan alasan apa pun. Banyak aspek lainnya yang niscaya dipertimbangkan terutama berhubungan dengan sejumlah dampak ikutan yang

hun 2006, Pusat Sumber Daya Geologi, “Inventarisasi Mangan di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur”, <http://www.dim.esdm.go.id/>, diunduh pada 20 Oktober 2008.

⁷ O.R. Masera, M, Astier & S, Lopez-Ridaura (1999). Sustainability and natural resource management. *The MESMIS Evaluation Framework. Mundi-Prensa-GIRA-UNAM, México City.*

muncul. Perhitungan matang terhadap sejumlah ‘dampak operasi’ tambang secara sah dapat menentukan ‘rasionalitas’ protes lokal di satu pihak dan ‘kesesatan logika’ tambang dalam konteks kebijakan politik pembangunan di pihak lainnya.

Sebelum lebih jauh membedah Manggarai sebagai konteks kajian (lihat Bab 4), posisi daerah ini pada khususnya dan Pulau Flores pada umumnya memang harus ditaruh dalam beberapa isu krusial termasuk kerawanan geologis, geografis, dan topografis. Ini mesti ditempatkan pada urutan utama dari semua pertimbangan pemberian kebijakan tambang. Sebagai daerah rawan gempa, curah hujan tinggi, kemungkinan tanah longsor dengan frekuensi tinggi, operasi tambang cenderung menambah ‘kerumitan ekologis’⁸ di kawasan ini. Sebagai tambahan, posisi daerah ini juga persis berada dalam lingkaran sabuk api (*ring of fire*) dengan sejumlah gunung api yang masih aktif, seperti Gunung Anaka di gugusan pegunungan Mandosawu.

Dari sisi ini, penerapan pendekatan tambang memerlukan kesadaran komprehensif bila mempertimbangkan sekian banyak dampak yang merugikan masyarakat lokal. Perlu ditekankan belajar dari pengalaman pengelolaan tambang di banyak tempat setiap pengusaha pertambangan tidak lagi hanya mengejar keuntungan, tetapi perlu memerhatikan akibat eksploitasi mineral terhadap penurunan kualitas fungsi lingkungan bagi masyarakat lokal.

Hal yang perlu diingat bahwa kesediaan korporasi tambang membayar kompensasi sama sekali tidak bisa dijadikan alasan untuk menekan masyarakat lokal. Itu artinya, sebesar apa pun kompensasi yang ditawarkan korporasi tambang, sejauh alasan-alasan lain seperti keberlanjutan hidup masyarakat lokal tetap terancam, tidak bisa terbayarkan seberapa pun besarnya

⁸ Penjelasan lebih lengkap tentang apa yang disebut dengan ‘risiko-risiko ekologis’ tambang dapat dilihat dalam laporan ini: <http://web.mit.edu/12.000/www/m2016/finalwebsite/problems/mining.html/>, diunduh pada 14 Oktober 2017.

kompensasi, kebijakan tambang tetap bisa ditolak masyarakat lokal.

Dengan begitu, persoalannya bukan hanya tentang dana pengembangan wilayah dan masyarakat (*local and community development*) di sekitar area pertambangan yang selama ini dipraktikkan, melainkan berhubungan dengan besarnya keterancaman sosial, budaya, dan ekologis masyarakat lokal. Kompensasi mungkin hanya berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia (*human resources development*) dan sumber daya sosial (*social capital*) dengan 'ilusi' peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lokal lebih sebagai keberuntungan yang mengalir dari praktik tambang.

Mineral merupakan sumber daya alam yang tak terbarui (*non-renewable resource*). Bahan mineral yang tidak dapat pulih atau kembali ke keadaan semula. Dalam perspektif etik pembangunan, pemanfaatan mineral niscaya dilakukan secara bijaksana dan haruslah dipandang sebagai aset alam sehingga pengelolannya pun harus mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang.⁹

Pada skala nasional, dari banyak studi, catatan, dan analisis, operasi tambang yang dilakukan di Indonesia memang seringkali menimbulkan dampak negatif, baik terhadap lingkungan, kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakat adat maupun budaya masyarakat lokal. Di seluruh Indonesia, operasi pertambangan menciptakan kehancuran dan pencemaran lingkungan.

Menurut Greenpeace, salah satu kasus yang terjadi disebabkan PT Indominco Mandiri, anak perusahaan PT ITM. Demi meningkatkan produksi pertambangannya, perusahaan tersebut berusaha mengalihkan aliran sungai sehingga perusaha-

⁹ Prinsip keberlanjutan belum menjadi bagian penting dari kerangka pengelolaan SDA. Kondisi ini akan mengancam keberlangsungan generasi sosial pada komunitas lokal yang mengacu pada kawasan dan SDA. Gagasan ini dapat dilihat secara lebih lengkap dalam *Aceh Forum Community* edisi 24 Juni 2006.

an bisa melakukan penambangan di Sungai Santan termasuk anak Sungai Santan, yakni Sungai Kare dan Sungai Pelakan.

“Penurunan kualitas sungai yang ditandai dengan perubahan warna air diikuti juga dengan matinya ikan-ikan yang selama ini menjadi sumber penghidupan ekonomi masyarakat setempat. Semenjak beroperasinya PT Indominco Mandiri di daerah hulu Sungai Santan, warga merasakan kualitas sungai semakin menurun yang memberi dampak langsung bagi kehidupan masyarakat lokal,” tambahnya.¹⁰

Sebagian besar operasi pertambangan dilakukan secara terbuka (*open pit*) di mana ketika suatu wilayah sudah dibuka untuk pertambangan, maka kerusakan yang terjadi di wilayah tersebut tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible damage*). Selain itu, hampir semua operasi pertambangan melakukan pembuangan limbah secara langsung ke sungai, lembah, dan laut. Hal ini mengakibatkan perusakan dan pencemaran sungai dan laut yang merupakan sumber kehidupan masyarakat setempat.¹¹

Wilayah operasi pertambangan yang sering kali tumpang tindih dengan wilayah hutan, kawasan hidup masyarakat lokal (adat) telah menimbulkan konflik atas hak kelola dan hak kuasa masyarakat setempat. Di sini, persoalan kawasan hutan lindung tetap menjadi persoalan penting dalam konteks kebijakan pertambangan di tingkat lokal.¹² Namun, kecenderungan lemahnya pengakuan pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat

¹⁰ Kajian ini dapat dilihat dalam laporan Greenpeace, <http://www.greeners.co/berita/greenpeace-rilis-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-di-kalimantan-timur/>, diunduh pada 14 Oktober 2017.

¹¹ Shures k., Bhatt, Suresh dan Christopher Mark. (1900). “Analysis of Safety Aspects And Mining Practices For Effective Ground Control in Surface Mining.” *National Institute for Occupational Safety and Health Pittsburgh Research Laboratory, Pittsburgh, PA* (1900).

¹² Pertimbangan keselamatan kawasan hutan lindung dan tangkapan hujan memang menjadi hal penting dalam pengelolaan SDA di daerah namun seringkali kepentingan investasi bisa mengancam kawasan hutan. Gagasan ini diperoleh dari hasil pengolahan wawancara penulis dengan BM tanggal 2 dan 3 Mei 2009 di Ruteng, Manggarai, NTT.

atas wilayah hidup mereka menyebabkan adanya pemberian wilayah konsesi dengan semena-mena tanpa ada persetujuan dari masyarakat. Kelompok masyarakat harus terusir dan kehilangan sumber-sumber kehidupannya, baik akibat tanah yang dirampas maupun akibat tercemar dan rusaknya lingkungan akibat limbah operasi pertambangan.

Komunitas lokal terdampar pada sebuah pertanyaan fundamental. Bagaimana globalisasi dengan kapitalisasi dan akumulasi profit korporatis sebagai energi yang menggerakkan ekonomi, mampu mengkomodasikan kepentingan lokal.¹³ Pada ranah yang esensinya sama, pertanyaan ini berhubungan dengan problematika pembangunan termasuk titik tolak, politik, dan target pencapaian. Pembahasan ini dalam konteks yang lebih konkret berhubungan dengan ‘kontestasi’¹⁴ kepentingan elemen-elemen kunci politik pembangunan. Dalam keseluruhan konteks gagasan ini, maka ‘hubungan tripolar’ antara komunitas lokal (masyarakat/*society*), korporasi (pasar/*market*), dan pemerintah (negara/*state*) merupakan tema studi yang penting untuk melihat kompleksitas ‘pembangunan’ dalam dari aspek sosiologis.

Lebih jauh, bagi kalangan yang melihat persoalan hanya dari sudut pandang keuangan global (*global finance*) maka resistensi lokal berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam segera dilihat sebagai gerakan kontra produktif terhadap politik pembangunan. Namun, pertentangan antara komunitas lokal di satu pihak dan perusahaan-negara di lain pihak tidak bisa disebut sebagai persoalan anti-industrialisasi modern, melainkan sebuah pembacaan kritis tentang hubungan antara ‘pemerintah’,

¹³ Gagasan ini menjadi titik tolak munculnya kritik yang lebih luas berkaitan dengan ekspansi investasi korporasi dalam skala global, nasional maupun lokal. Terutama berhubungan dengan akumulasi keuntungan yang menjadi orientasi utama korporasi. Secara lengkap gagasan ini dapat dilihat pada pemikiran Herry B. Priyono yang dimuat *HU Kompas*, 18 April 2003.

¹⁴ Bisa dibaca dalam ulasan John R. Owen, dan Deanna Kemp. (2013). “Social licence and mining: A critical perspective.” *Resources policy* 38, no. 1: 29-35.

'bisnis', dan 'komunitas lokal'. Pada tataran akademis, corak proses ekonomi korporatik yang dipraktikkan selama ini telah mendorong protes para ekonom, mahasiswa ekonomi, aktivis hak asasi manusia, dan periset sosial di banyak universitas dunia.¹⁵

Pada era rezim Orde Baru, negara (pemerintah) menggenggam kepercayaan politik pembangunan bahwa dengan membuka peluang investasi sebesar-besarnya, maka akan terjadi apa yang disebut dengan *trickle down effect* dan *multiplier effect*. Logika ini mengungkapkan bahwa 'tetesan-tetesan keuntungan' pembangunan secara otomatis bisa dinikmati masyarakat sekelilingnya.¹⁶ Ternyata, harapan itu tidak menjadi kenyataan. Sesudah reformasi, praktik pembangunan masih diisi kultur lama yang tetap mengukuhkan kekuatannya. Hancurnya lingkungan hidup (ekologi) menjadi salah satu persoalan serius yang dialami Indonesia, secara khusus komunitas lokal.¹⁷

Tambang dan komunitas lokal merupakan bagian-bagian penting yang berhubungan dengan ekonomi global yang memiliki turunan sampai ke tingkat lokal. Konflik tambang dan resistensi lokal menggambarkan pola hubungan antara negara, korporasi, dan komunitas lokal dalam konteks pembangunan.

¹⁵ Keadaan ini memunculkan gerakan resistensi yang kuat di pusat-pusat ekonomi politik dunia. Sejak Juni 2000, berbagai protes di fakultas-fakultas ekonomi terjadi di Perancis, lalu ke Universitas Cambridge (Inggris), sebelum meledak di Universitas Harvard awal tahun ini. Sekitar 700 mahasiswa dan alumni Fakultas Ekonomi Harvard mengajukan petisi melawan *unreality and dogmatism in (mainstream) economics*. Lihat dalam *Harvard Crimson Reports*, 17/3/2003; *New York Times*, 4/3/2003).

¹⁶ Isu-isu ini dapat dilihat dalam analisis Angelsen, Arild dan Wunder, Sven (2006). *Poverty and Inequality: Economic Growth is Better than Its Reputation*, Chapter in Dan Banik (ed.): *Poverty, Politics and Development: Interdisciplinary Perspectives*. Fagbokforlaget, Bergen. Lihat: http://www.umb.no/statisk/ior/angelsen_wunder_poverty_inequality_growth.pdf/, diunduh pada 14 Oktober 2017.

¹⁷ Krisis ekologi merupakan salah satu implikasi paling negatif dari pendekatan pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama beberapa dekade ini. Secara lengkap persoalan ini dapat dilihat dalam Publikasi Evaluasi LabSosio UI tahun 2007 berkaitan dengan kondisi Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan.

B. Tujuan dan Signifikansi Studi

Ada dua tujuan utama dalam studi ini. *Pertama*, studi ini memiliki tujuan teoretis untuk menelaah lebih jauh kompleksitas hubungan tripolar antara negara, pasar, masyarakat pemerintah (lokal), korporasi tambang dan komunitas local untuk merumuskan posisinya masing-masing; menjelaskan 'resistensi' sebagai tata kelola lokal terhadap dominasi negara dan korporasi.

Kedua, studi ini memiliki tujuan empiris untuk menemukan implikasi dinamika tripolar dalam kaitannya dengan kebijakan pembangunan lokal; menjelaskan posisi dan peran aktor di tingkat lokal. *Ketiga*, studi ini juga mencoba merumuskan rekomendasi kebijakan yang diajukan sebagai satu kerangka kerja konseptual bagi perumusan politik pembangunan dengan isu tambang sebagai titik picunya.

Signifikansi Penelitian. *Pertama*, secara akademis, studi ini penting untuk mendiskusikan kembali 'teori pembangunan' yang diperhadapkan dengan sudut pandangan dan pengalaman lokal dengan menggunakan pendekatan hubungan tripolar antara negara, pasar, dan masyarakat. *Kedua*, secara praktis, studi ini berguna untuk menelaah resistensi lokal sebagai salah satu cara yang dilakukan komunitas lokal berhadapan dengan negara dan korporasi.

C. Penutup

Sejumlah poin penting dapat dikemukakan dalam bagian ini. *Pertama*, Manggarai mempresentasikan dirinya sebagai bagian dari satu tubuh pembangunan. Dalam konteks ini, sebagai satu ruang geografis, sosial, ekonomis, politis, dan budaya, Manggarai tidak terelakkan terlibat dalam dinamika hubungan dengan politik pembangunan.

Kedua, kebijakan tambang muncul sebagai satu simpul sentral dalam memahami dan mengerti alur dinamika antaraktor dan institusi dengan Manggarai sebagai arena tunggal yang ditaruh dalam kajian ini. *Ketiga*, penelusuran komprehensif atas problematika dinamika antaraktor dan institusi ini akan membantu kita memahami titik tolak, motivasi, dan target penyusunan strategi dan politik pembangunan lokal. *Keempat*, elemen-elemen pemahaman ini akan membingkai keseluruhan pembahasan bagian-bagian berikut buku ini.



BAB 2

FOKUS DAN METODE KAJIAN

A. Pengantar

Bab ini akan mengetengahkan fokus dan metode studi. Seperti sudah dikemukakan pada bab 1, fokus studi ini tidak terutama ditujukan pada usaha mengevaluasi dan menganalisis kebijakan (regulasi) dan membedah tambang sebagai aktivitas industri dan ekonomi. Fokus kajian ini berhubungan dengan dinamika dan hubungan antara aktor-institusi yang diteropong dengan menggunakan ‘tambang’ sebagai ‘*entry point*’ untuk menemukan formula baru dinamika hubungan antaraktor-institusi dalam politik pembangunan. Sebagai tambahan, penentuan metode yang digunakan dalam mendukung studi ini juga akan dipaparkan secara singkat dalam bab ini disertai variabel-variabel utama yang digunakan dalam proses pengumpulan data.

B. Fokus Kajian

Berangkat dari titik tolak keyakinan akademik dan teoretis yang dipaparkan pada bab 1, fokus studi ini secara sah

berhubungan dengan penelusuran konseptual dan empiris atas ‘*resistensi*’ sebagai mekanisme yang dibangun komunitas lokal terhadap ‘tambang’, baik dalam konteks kebijakan-regulasi (domain negara) maupun dalam ranah operasi (domain korporasi). Dari sudut pandang sosiologi (politik dan pembangunan), dinamika dan problematika hubungan konfliktual antaraktor dalam keseluruhan rancang bangun dan praktik pembangunan memunculkan apa yang dapat dinamakan dengan ‘*pola perlawanan konstan*’ (a constant resistance)¹⁸ komunitas lokal.

Diasumsikan kemudian, dari ranah resistensi ini juga muncul aktor-aktor utama. Lebih lanjut, sebagai elemen fundamental kajian ini, penjelasan-penjelasan lain termasuk isu degradasi ekologis dan keberlanjutan masyarakat lokal juga ditempatkan sebagai bagian esensial dari keseluruhan alur cerita perlawanan (resistensi) lokal. Kemakmuran sosial yang ditawarkan korporasi yang dianggap sebagai ‘ilusi belaka’¹⁹ dalam pembacaan komunitas lokal juga mencuri perhatian kajian ini.

Jika ditarik ke konteks yang lebih luas, memang sudah cukup lama efek destruktif pola ketergantungan tanpa akhir terhadap mineral sebagai sumber utama energi menyita perhatian banyak pihak. Oxfam Amerika merujuk laporan mereka pada Oktober 2001 dengan judul ‘*Extractive Industrie Review and the Poor*’²⁰ menyimpulkan bahwa sejumlah negara berkembang dengan

¹⁸ Ada studi kontesktual tentang soal ini yang dipaparkan dalam kajian ini, Dalaibuyan Byambajav (2012), “Mobilizing against dispossession: Gold mining and a local resistance movement in Mongolia.” *Journal of the Center for Northern Humanities* 5: 13-32.

¹⁹ Satu contoh studi tentang mineral di negeri penuh konflik, Afganistan. Schuyler Null, (2010), *Afghanistan's Mineral Wealth: Gold Mine, Curse, or Illusion?*, *New SecurityBeat: The Blog of the Environmental Changes and Security Program*, June, 15. Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC, USA. Link. <https://www.newsecuritybeat.org/2010/06/afghanistans-mineral-wealth-gold-mine-curse-or-illusion/>, diunduh pada 16 Oktober 2017.

²⁰ Scott Pegg (2006), “Mining and poverty reduction: Transforming rhetoric into reality.” *Journal of Cleaner Production* 14, no. 3: 376-387.

tingkat 'ketergantungan' mutlak pada ekspor minyak dan mineral sekian lama mengidap sejumlah persoalan struktural akut.

Scott (2006, hlm. 378) dalam kajiannya mengungkapkan: *implikasi-impikasi lingkungan proyek-proyek bisnis tambang juga dapat meningkatkan penderitaan orang-orang (komunitas) miskin*. Lebih lanjut, persoalan-persoalan lain di level negara, beberapa bisa disebut: tingkat korupsi cenderung sangat tinggi, pemerintahan otoriter, tingkat kemiskinan tinggi, kematian anak, ketidakadilan pemerataan pendapatan, dan kerentanan terhadap kejutan ekonomi.

'*Digging to Development*' [2002]²¹ laporan lain Oxfam Amerika melihat bagaimana sejarah keterkaitan tambang dan pembangunan ekonomi memperkuat fakta kemiskinan dan kehancuran masyarakat. Ironisnya, Amerika Serikat (US), Kanada, dan Australia yang dikenal memiliki ekonomi kuat justru bukan terutama digerakkan sektor pertambangan, melainkan 'industrialisasi' paten dalam bidang pertanian, teknologi, dan manufaktur. Laporan ini secara lugas mengoreksi pernyataan '*misleading*' Bank dunia dan pelaku pertambangan ketika menyebutkan bahwa kemajuan negara-negara makmur disebabkan oleh pertambangan.

Tidak hanya ditingkat global, pada konteks nasional dan lokal, proses rasionalisasi dan justifikasi yang sengaja dibangun untuk memperkuat tambang baik sebagai jalan politik maupun tindakan ekonomi menuju kemakmuran tentu selalu muncul. Bahkan, proses-proses ini selalu mengalami 're-interpretasi' secara berulang sesuai dengan konstruksi kebutuhan yang dibangun beragam pemangku kepentingan (aktor) dalam pembangunan. Demikian juga pada era desentralisasi seperti di Indonesia, pelaku tambang menjadikan pulau-pulau kecil sebagai sasaran dan

²¹ Lihat isi lengkap laporan ini di link ini: https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/OA-Digging_to_Development.pdf, diunduh pada 7 Oktober 2017.

target operasi. Padahal, pulau-pulau ini mempunyai karakteristik budaya dan sistem nilai khas.²²

Jika menengok kembali ke belakang, di Indonesia sendiri, posisi negara (*state*) dalam konteks persoalan tambang memang sejak awal berkaitan dengan sejarah ‘pengambilalihan’ urusan pertambangan dari komunitas dan/atau organisasi kekuasaan lokal. Hal ini untuk pertama kalinya terjadi pada tahun 1850. Pada saat itu, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ‘*Mijn Reglement 1850*’.²³ Peraturan ini diberlakukan hampir di seluruh wilayah kini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Inilah satu instrumen hukum yang digunakan pemerintah kolonial Belanda untuk mengambil alih, mengatur, dan memanfaatkan mineral di tanah air bagi kepentingan ekonomi mereka.²⁴

Pengurusan sektor pertambangan umum ini sama sekali tak berubah hingga 68 tahun kemudian saat terbitnya Undang-undang No 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan Umum. Bahkan, ke mana arah pengelolaan sektor pertambangan Indonesia saat itu dengan gamblang diarahkan oleh Undang-undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Kita lihat dengan kasat mata bagaimana kontrak karya dengan perusahaan raksasa seperti PT Freeport di Papua masih terus berlangsung meskipun isu-isu krusial seputar ekologi dan kemanusiaan selalu jadi bagian dari kemeriahan tambang ini.

Selain itu, saat perusahaan tambang beroperasi, pemiskinan terus berlangsung melalui menurunnya kualitas pelayanan alam dan produktivitas rakyat, khususnya terkait sumber daya tanah dan air. 2480 ribu gram limbah ditimbulkan untuk mendapatkan sebutir emas di tambang PT Freeport. Di samping

²² Lihat analisis kritis *Jaringan Advokasi tambang (JATAM)* edisi 10 Juli 2007.

²³ P.A.C, de Ruyter (2016). *Het mijnwezen in Nederlands-Oost-Indië 1850-1950* (Doctoral dissertation, Utrecht University), the Netherlands.

²⁴ Lihat artikel yang ditulis Aktivistis Siti Maimunah dengan judul Rakyat dan Lingkungan Mensubsidi Industri Pertambangan yang dimuat dalam Analisis *JATAM* edisi 10 Juli 2007.

itu, pertambangan juga dikenal rakus air. Air menjadi bahan baku kedua setelah batuan dan tanah galian. Air tak hanya digunakan untuk kebutuhan harian karyawan perusahaan, tetapi yang utama digunakan dalam proses ekstraksi pemisahan biji.²⁵

Krisis air merupakan masalah yang selalu dijumpai di banyak lokasi pertambangan. Penurunan kuantitas dan kualitas air terjadi karena operasi pertambangan membutuhkan air dalam jumlah besar, sementara kualitas air juga menurun karena rusaknya sistem hidrologi tanah. Sementara itu, limbah tambang berpotensi mencemari kawasan perairan sekitar, baik karena rembesan air asam tambang, rembesan logam berat atau pun buangan lumpur tailing.

Kajian ini tidak memiliki maksud mengurai tambang *in se* sebagai sebuah aktivitas industri dan tindakan ekonomi. Kajian ini hendak menghubungkan tambang dengan berbagai macam isu yang saling berhubungan dan kemudian membentuk persoalan pokok yang pada gilirannya memicu satu reaksi tunggal komunitas lokal dalam bentuk perlawanan (resistensi dan protes).

Sekali lagi, isu-isu utama yang berada dalam jangkauan studi ini seperti kerusakan lingkungan, akses masyarakat lokal ke dalam keuntungan pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan ekonomi, konflik sosial, dan kedaulatan kawasan. Kajian ini dengan demikian ditempatkan pada sudut pandang sosiologi politik dan sosiologi pembangunan. Dengan dukungan *tinjauan antropologis-etnografis konvensional* dalam usaha memaknai kedalaman problematika perlawanan lokal, kajian ini mengandung ambisi untuk memunculkan penjelasan *multidisipliner* atas persoalan tambang dan resistensi lokal.

²⁵ Kajian kritis tentang kemiskinan dan praktek tambang Freeport di Papua sebagian-nya dalam dilihat dalam Neles Tebay. (2005). *West Papua: The Struggle for Peace with Justice*. CIIR, Catholic Institute for International Relations, London, UK.

C. Metode Kajian

Ini adalah studi kasus kualitatif. Strategi pengumpulan data bertumpu pada proses dan teknik konvensional (Lihat Tabel 1). Merujuk pada Creswell (2003: 185-188), studi ini menggunakan tiga jenis prosedur pengumpulan data termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui observasi, peneliti membuat catatan lapangan (field note) mengenai perilaku dan aktivitas sejumlah subyek yang berhubungan dengan isu tambang.

Ada kelebihan dari proses ini ketika peneliti (penulis) dapat mencatat informasi sebagai sesuatu yang ditampakkan, juga terutama sejumlah aspek 'tidak biasa' (latensi) dapat diketahui. Peneliti juga mendapatkan pengalaman secara langsung dengan subyek-subyek yang diteliti (informan). Sementara, melalui dokumentasi, peneliti mengetahui bahasa, kata-kata, perilaku informan yang tertulis dan data-data yang terkait dengan obyek studi ini.

Untuk keperluan kajian ini, penelitian lapangan sudah dilakukan dalam beberapa 'sesi' pada tahun 2008 dan 2009. Untuk melengkapi bahan dan informasi bagi penulisan buku ini, proses pengumpulan data dan analisis terus dilakukan hingga beberapa waktu terakhir ini. Bahkan, dari studi akademik ini, ada beberapa artikel yang sudah dikembangkan dan diterbitkan baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa asing (Inggris). Studi lapangan baik melalui observasi maupun penelusuran berita-berita di media massa terfokus di daerah Manggarai (Manggarai Barat, Manggarai Tengah, dan Manggarai Timur). Informasi-informasi dari daerah lain di Provinsi NTT juga digabungkan ke dalam sumber informasi.

Manggarai memang menjadi '*locus*' kajian dengan pertimbangan utama pada keberadaan sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di daerah ini pada periode 2000 hingga 2009.

Beberapa dari antaranya bisa disebutkan antara lain PT Sumber Jaya Asia dan PT Arumbai Mangabekti²⁶. Kedua perusahaan ini beroperasi di daerah Manggarai dan Manggarai Timur. Munculnya perusahaan-perusahaan lain yang diduga menimbulkan masalah ekologis di daerah ini memicu protes dan perlawanan masif masyarakat lokal dan aktor-aktor gerakan lainnya.²⁷Selain itu, riset juga dilakukan di beberapa kawasan lain di dua kabupaten ini sebagai perbandingan dan pelengkap kajian.

Peneliti pernah melakukan observasi lapangan terhadap kasus pertambangan di daerah ini. Pengalaman observasi lapangan itu menunjukkan bahwa informan atau subyek yang diteliti memiliki kepentingan tertentu dan jaringan tertentu untuk memperjuangkan kepentingannya. Dalam studi ini, posisi peneliti berada di luar jaringan kelompok yang terkait konflik antara aktor dan tidak melibatkan diri dalam kepentingan-kepentingan informan.

Observasi dilakukan terhadap warga masyarakat biasa untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan sehari-hari terhadap permasalahan tambang di Manggarai. Sebagaimana disebutkan wawancara akan dilakukan terhadap narasumber dari berbagai kalangan (narasumber akan ditulis dengan nama anonim, daftar, dan jumlah narasumber hanya ditulis secara singkat dalam buku ini).

Posisi ini memungkinkan peneliti dapat melakukan '*dekonstruksi*' teks melalui pembacaan kritis terhadap setiap data dari informan di mana mereka dalam studi ini dipandang sebagai 'teks-teks' yang bersifat dinamis dan memiliki kepentingan khas. Peneliti memiliki kepentingan mendeskripsikan secara obyektif bagaimana resistensi lokal, konflik, dan kemungkinan resolusi

²⁶ Selanjutnya dalam pembahasan dua perusahaan disingkatkan menjadi PT SJA untuk PT Sumber Jaya Asia dan PT ABM untuk PT Arumbai Mangabekti.

²⁷ Informasi tentang reaksi-reaksi lokal terhadap operasi tambang di daerah ini dapat ditemukan dalam berita ini: <http://sp.beritasatu.com/home/warga-desa-lante-minta-ganti-rugi-kepada-pt-rim/28283/>, diunduh pada 7 Oktober 2017.

konflik dalam konteks dinamika hubungan antara negara, korporasi, dan masyarakat (komunitas) lokal dalam hubungannya dengan tambang.

Dalam proses mencari data-data sekunder yang berkaitan dengan topik studi dan penelitian, studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan-perpustakaan di Jakarta, lembaga-lembaga pemerintah, dan pers lokal. Untuk menyempurnakan beberapa bagian penulisan lanjutan buku ini, studi kepustakaan lain juga sudah dilakukan di Belanda di dua institusi; the International Institute of Social Studies, Rotterdam University, Graduate School of Humanities, University of Tilburg dan Anthopos Institute, Sankt Augustin, Jerman (2016). Studi kepustakaan di Belanda ini dilakukan dalam kurun waktu 2013 hingga 2017.

Tabel 1. Matriks Pengumpulan Data

Tujuan	Data Primer		Data Sekunder
	Indepth	Observasi	
Mencari Data berkaitan dengan sebab-sebab resistensi	<p>1) Alat: Pedoman wawancara</p> <p>2) Substansi: Seluruh informasi berkaitan dengan sebab-sebab resistensi lokal</p> <p>3) Informan: Tokoh lokal (tua adat/hak ulayat atas tanah lokasi tambang), pemerintah, NGO, korporasi, informan lain yang mendukung fokus studi</p>	<p>1) Alat: pedoman observasi, dan dokumentasi</p> <p>2) Cara kerja: Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan, kejadian dan bukti fisik</p> <p>3) Substansi: Informasi lain yang sesuai dengan sebab-sebab resistensi</p>	<p>1) Substansi: Data-data penunjang, baik berkaitan dengan sebab-sebab resistensi maupun tentang dinamika komunitas lokal berkaitan dengan persepsi terhadap tambang.</p>

Tujuan	Data Primer		Data Sekunder
	Indepth	Observasi	
	<p>4) Pemilihan informan: representasi yang sesuai dengan kebutuhan data</p>		<p>2) Sumber: Pers lokal, dinas pemerintahan, korporasi, desa, kecamatan</p>
<p>Mencari Data berkaitan dengan dinamika resistensi (bentuk-bentuk) resistensi lokal</p>	<p>1) Alat: Pedoman wawancara</p> <p>2) Substansi: Seluruh informasi berkaitan dengan sebab-sebab resistensi lokal</p> <p>3) Informan: Tokoh lokal (tua adat/hak ulayat atas tanah lokasi tambang), pemerintah, NGO, korporasi, informan lain yang mendukung fokus studi</p> <p>4) Pemilihan informan: representasi yang sesuai dengan kebutuhan data</p>	<p>1) Alat: pedoman observasi, dan dokumentasi</p> <p>2) Cara kerja: Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan, kejadian, dan bukti fisik</p> <p>3) Substansi: Informasi lain yang sesuai dengan sebab-sebab resistensi</p>	<p>1) Substansi: Data-data penunjang, baik berkaitan dengan sebab-sebab resistensi maupun tentang dinamika komunitas lokal berkaitan dengan persepsi terhadap tambang.</p> <p>2) Sumber: Pers lokal, dinas pemerintahan, korporasi, desa, kecamatan</p>

Tujuan	Data Primer		Data Sekunder
	Indepth	Observasi	
Mencari data berkaitan proses penyelesaian masalah	<p>1) Alat: Pedoman wawancara</p> <p>2) Substansi: Seluruh informasi berkaitan dengan proses negosiasi</p> <p>3) Informan: Agama (hierarki-Gereja), Tokoh lokal (tua adat/hak ulayat atas tanah lokasi tambang), pemerintah, NGO, korporasi, informan lain yang mendukung fokus studi</p> <p>4) Pemilihan informan: representasi yang sesuai dengan kebutuhan data</p>	<p>1) Alat: pedoman observasi, dan dokumentasi</p> <p>2) Cara kerja: Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan, kejadian dan bukti fisik</p> <p>3) Substansi: Informasi lain yang sesuai dengan sebab-sebab resistensi</p>	Secara khusus mencari informasi berkaitan dengan seruan-seruan pastoral agama (Gereja) berkaitan dengan persoalan tambang, pandangan-pandangan tokoh agama

Aspek dimensi, variabel, indikator dan ukuran disusun untuk membantu kerangka kerja analisis data. Aspek-aspek ini digunakan untuk menganalisis anatomi resistensi lokal terhadap operasi tambang (Lihat Tabel 2).

Tabel 2. Matriks Dimensi, Variabel, Indikator dan ukuran

Dimensi	Variabel	Indikator	Ukuran
Sebab	1) Degradasi lingkungan, 2) Dominasi, 3) Implikasi sosial dan budaya, 4) Ketidak-seimbangan hubungan, 5) Kemiskinan	1) Investasi ekspansif, 2) Karakter destruktif korporasi, 3) Kerusakan multidimensional, 4) Pergeseran kekuasaan (modal), 5) Peran negara	Tingkat signifikansi
Dinamika Bentuk-Bentuk Resistensi	1) Tujuan resistensi, 2) Pola-pola resistensi, 3) bentuk-bentuk resistensi, 3) Peran elemen-elemen lokal, 4) Dinamika hubungan tripolar	1) Pencapaian resistensi, 2) Kepentingan lokal, 3) Pengorganisasi kekuatan lokal, 4) Areal operasi korporasi, implikasi industri tambang, 4) Forum-forum lokal, 5) Mobilisasi massa, 6) Protes sosial, 7) Kontrol publik, 8) Peran media massa lokal/nasional	
Pencapaian	1) Strategi, 2) Bentuk, 3) Peran institusi agama	1) Keterlibatan kelompok-kelompok sosial, LSM, 2) Peran lembaga legislatif lokal, 3) Kebijakan-kebijakan pastoral (agama), 4) Evaluasi komprehensif, 5) Regulasi, 6) CSR, 7) Program CD, 8) Reklamasi	Aspek relevansi

Data-data yang diperoleh dari studi ini kemudian dipetakan dan dianalisis dengan mengacu pada model ‘eksplanasi-analitis’. Model ini merupakan sebuah pendekatan dalam analisis data dengan tujuan melakukan penjelasan akurat dan komprehensif terhadap realitas sosial. Ini dilakukan berdasarkan data-data primer dan sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat bagaimana masing-masing aktor, kelompok, dan lembaga memosisikan kepentingan mereka berkaitan dengan isu kunci tambang. Alat analisis yang digunakan adalah teori relasi tripolar antara negara (*state*), korporasi (*market*), dan komunitas (*society*) didukung beberapa konsep lain, termasuk: resistensi, konflik, negosiasi, dan komunitas lokal.

D. Penutup

Penentuan metode studi juga didasarkan pada sejumlah pertimbangan. *Pertama*, keluasan dan kedalaman isu tambang di Manggarai membutuhkan satu rangkaian penelitian panjang dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Keterbatasan pada aspek ini memengaruhi jangkauan keberhasilan studi ini dalam menggali dan memahami persolan ini secara komprehensif. *Kedua*, studi ini mengandaikan durasi signifikan dalam konteks mengumpulkan data untuk membangun satu kerangka pengetahuan baru atas isu tambang di Manggarai. *Ketiga*, spesifikasi landasan teoretis atas studi ini pasti memengaruhi level pemahaman dan pembahasan atas isu tambang di Manggarai.



BAB 3

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Pengantar

Studi ini dalam lingkup akademik juga memiliki maksud menempatkan tambang dalam konteks dan kerangka kajian global berhubungan dengan isu resistensi lokal terhadap politik dan praktik pembangunan. Dengan itu, dapat juga dikatakan bahwa studi ini menjadi satu contoh dari ‘terbentuknya’ gerakan perlawanan lokal terhadap kebijakan dan operasi tambang dalam ranah besar pembangunan. Apa yang dikemukakan dalam bab ini berhubungan dengan kajian kepustakaan, tidak hanya sebatas konteks wilayah tertentu (batasan wilayah), melainkan dikaitkan juga dengan melihat dan menelaah studi-studi serupa yang ada pada ranah akademik.

Ditambahkan juga, meskipun aras studi ini berada pada dinamika hubungan problematis (tripolar) antara negara (*state*), korporasi (*market*), dan masyarakat (*society*) konteks lokal secara akademik dipercaya dapat (berhasil) menghadirkan pengaruh signifikan pada bentuk, pola, dan alur hubungan tripolar antara ketiga aktor ini. Tinjauan terhadap kajian-kajian yang telah

dilakukan sebelumnya membantu proses penentuan 'aspek-aspek utama' dalam hubungannya dengan persoalan tambang di Manggarai.

Sebagai gagasan awal, studi ini mengacu (pada) dan menggunakan model hubungan tripolar antara negara, korporasi, dan komunitas lokal. Di sini, resistensi dianggap sebagai satu ekspresi simultan dari koreksi lokal terhadap kecenderungan terjadinya hubungan yang timpang antara ketiga elemen dalam hubungan tripolar, terutama berhubungan dengan kenyataan dominasi negara dan korporasi atas komunitas lokal. Konsep resistensi, negara, korporasi, dan komunitas lokal menjadi simpul-simpul penting yang merangkai keseluruhan proses dan pijakan studi.

B. Tinjauan Kepustakaan

Bagian ini akan mengemukakan beberapa tinjauan atas sejumlah kajian dan studi tentang tambang dengan keterhubungannya pada isu-isu lain. Perlu diakui bahwa tinjauan ini tentu tidak bermaksud menjangkau semua kajian yang ada. Beberapa kajian sejumlah peneliti yang berhubungan dengan fokus studi ini menjadi prioritas dalam tinjauan ini. Berikut beberapa kesimpulan dari beberapa penelitian tentang isu ini.

Prayogo²⁸ dalam studinya menyimpulkan dimensi-dimensi penting konflik antara korporasi dan komunitas lokal. Tiga elemen utama disebutkan dalam studi ini, antara lain: dinamika konflik, sebab konflik, dan resolusi konflik. Deteksi terhadap konflik antara kekuatan (aktor) dipilih sebagai alur untuk memastikan dinamika hubungan antarkekuatan di mana proses ini kemudian dijadikan basis utama penyusunan resolusi konflik. Dalam telaahan ini, satu hal penting yang coba ditawarkan adalah bagaimana negara dilihat dan diposisikan sebagai aktor sentral

²⁸ Dody Prayogo.(2008). *Konflik Antara Korporasi dengan Komunitas Lokal (Sebuah Kasus Empirik pada Industri Geotermal di Jawa Barat*. Depok: Fisip UI Press.

dalam mengatur hubungan antara korporasi dan komunitas lokal. Peran kunci ini terutama ditempatkan dalam kerangka penyelesaian konflik.

Sangaji²⁹ dalam studinya mengedepankan adanya relasi 'asimetris' (tidak seimbang) antara korporasi dan masyarakat lokal. Relasi asimetris ini mengakibatkan kehancuran masif komunitas lokal. Terutama, kehancuran komunitas lokal berhubungan dengan runtuhnya keseimbangan ekologis. Isu ini mendasar ketika keseimbangan ekologis memiliki arti penting dalam konteks menopang keberadaan komunitas lokal. Lingkungan yang menjadi sumber penghidupan komunitas lokal mengalami kemunduran.

Ada beberapa hal penting yang dikemukakan dalam studi ini (Sangaji). *Pertama*, keadilan menjadi fokus dan isu yang harus diperhatikan dalam membangun hubungan antara korporasi dan komunitas lokal. Operasi korporasi tambang harus memerhatikan struktur dan kultur komunitas lokal. *Kedua*, persoalan paling menonjol yang dialami komunitas lokal tidak hanya berkaitan dengan rusaknya lingkungan hidup, melainkan kehancuran multiaspek kehidupan yang dialami masyarakat di sekitar area pertambangan. *Ketiga*, negara yang diasumsikan dan dibayangkan sebagai kekuatan yang menjamin sistem regulasi yang dapat 'mengatur' korporasi tambang ternyata kehilangan kekuatan ketika berhadapan dengan dominasi korporasi tambang.

Sinclair³⁰ dalam studinya menyebutkan kenyataan seputar operasi tambang yang menimbulkan apa yang disebutnya dengan '*jarak ekonomis*' antara korporasi dan masyarakat yang berada dalam jangkauan operasi tambang. Jarak ekonomis ini terutama berhubungan dengan 'kemiskinan' dan 'kemelaratan' yang dialami

²⁹ Arianto Sangaji. (2002). *Buruk INCO, Rakyat Digusur: Ekonomi Politik Pertambangan Indonesia*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.

³⁰ Amanda Sinclair. (2003). **Indigenous human resource practices in Australian Mining companies: Towards an ethical model** in *Journal of Business Ethics*. Dordrecht. Vol. 45, Iss. 4.

komunitas lokal. Hal ini disebabkan 'ekstensifikasi' korporasi tambang yang dilakukan tanpa memerhitungkan keberadaan komunitas lokal dengan segala kekayaan karakternya.

Kajian ini menyodorkan beberapa aspek penting. *Pertama*, masyarakat perlu menggagas langkah-langkah strategis untuk mencapai titik kekuatan dalam mengontrol korporasi. Bahkan jika bisa, masyarakat lokal dalam mendesak aktor negara dan korporasi untuk menghentikan mekanisme investasi tambang. *Kedua*, kajian ini juga berhasil menemukan konsep dan strategi masyarakat pribumi untuk mendorong terciptanya korporasi tambang yang beroperasi dalam 'perspektif etik'.³¹

Kaplan³² melakukan studi dengan bertumpu pada kenyataan hancurnya komunitas sosial di sekitar area pertambangan. Kehancuran lokal menimbulkan kemerosotan lokal sistemik. Kajiannya memunculkan beberapa hal penting. *Pertama*, kajian ini menyoroti dan memunculkan komunitas lokal sebagai entitas yang penting dalam kaitannya dengan korporasi tambang. Sebagai satu bentuk tubuh organisasional, komunitas lokal berhubungan dengan aspek-aspek fundamental, termasuk: kemerdekaan, kemandirian, dan independensi. Aspek-aspek ini mencirikan komunitas lokal sebagai satu kekuatan yang bisa membangun relasi seajar dengan korporasi.

Kedua, posisi ini akan memaksa korporasi untuk tidak hanya mengutamakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk menjawab permasalahan yang ada sekitar area pertambangan. Aspek-aspek ini akan menempatkan komunitas pada posisi sebagai subyek yang dapat menentukan sirkulasi kemakmuran di

³¹ Kajian yang mirip juga dapat ditemukan dalam studi ini: Grant Michelson, Nick Wailes, Sandra Van Der Laan, & Geoff Frost. "Ethical investment processes and outcomes." *Journal of Business Ethics* 52, no. 1 (2004): 1-10.

³² Paul Kaplan.(2002). **Mining, corporate social responsibility and the "community": The case of Rio Tinto, Richards Bay Minerals and the Mbonambi** in *Journal of Business Ethics*. Dordrecht, Vol. 39, Iss. 3; pg. 275, 22 pgs.

area pertambangan. Aspek-aspek ini juga dapat digunakan untuk menekan keberadaan korporasi tambang.

Imbun³³ kemudian menyimpulkan kemiskinan sebagai ‘perangkap’ yang dibangun korporasi tambang. Hal ini menjadi sumber kehancuran bagi masyarakat atau komunitas lokal di sekitar kawasan pertambangan. Kajian ini menemukan satu persoalan penting bahwa CSR sebagai pembelajaran sosial dan pertanggungjawaban sosial organisasional korporasi hanya menjadi mekanisme yang dijadikan korporasi untuk meredam aksi dan perlawanan sosial komunitas. CSR sekian lama dianggap korporasi bisa menyelesaikan semua eksekusi negatif. ‘CSR-oriented’ yang dianut korporasi menyebabkan mereka kehilangan ‘solusi alternatif’ ketika komunitas lokal menunjukkan resistensi kuat terhadap tambang.

White³⁴ menemukan kemakmuran sebagai isu utama yang dimunculkan dalam kajiannya. Kajiannya berorientasi pada usaha menjawab pertanyaan pokok tentang seberapa efektif korporasi menumbuhkan kesejahteraan pada komunitas lokal. Keterpurukan komunitas lokal yang tampak dalam kemiskinan menunjukkan ketiadaan ‘kerangka perlindungan’ (*framework of protection*) dan kehendak baik (*good will*) korporasi terhadap keberlangsungan komunitas lokal. Kajian ini mengemukakan sebab-sebab terjadinya perlawanan sosial dan resistensi terhadap korporasi tambang. Komunitas lokal membangun ‘konsolidasi internal’ untuk melawan ekspansi korporasi dalam mengakumulasi keuntungan dengan pengelolaan sumber daya yang seharusnya tetap berada pada jangkauan kepemilikan komunitas lokal.

³³ Benedict Imbun Young. (2007). Cannot Manage without The ‘Significant Other’: Mining, Corporate Social Responsibility and Local Communities in Papua New Guinea in *Journal of Business Ethics* pp. 73:177–192.

³⁴ Lane White. (2006). The Challenges of Prosperity in *Engineering and Mining Journal*; pp. 8; ProQuest Science Journals pp. 26.

Jenkins³⁵ dalam studinya menegaskan bahwa komunitas lokal gagal membangun pemahaman bersama terhadap korporasi tambang. Elemen-elemen yang membentuk komunitas lokal sebagai satu 'entitas utuh' yang kemudian diharapkan memiliki posisi tawar terhadap korporasi (*market*) dan regulator (*state*) tidak mampu membangun dan menunjukkan perspektif yang sama untuk menilai dan mengevaluasi tambang. Sebagian elemen komunitas lokal terkooptasi pada mekanisme korporasi sehingga memunculkan dan menyebabkan kegagalan dalam proses negosiasi lokal untuk mengklaim "hak-hak" ekonomi, sosial dan politik.

Jenkins lebih jauh memunculkan konsep 'kapasitas' komunitas lokal sebagai 'isu kunci' dalam dalam konteks resolusi konflik. Komunitas lokal dapat menggerakkan 'perlawanan' sebagai mekanisme yang dilakukan dalam menghadapi ekspansi tambang, serentak menawarkan kemampuan mengelola konflik terbuka yang muncul. Di sini, konsep dan praktik negosiasi menjadi penting. Negosiasi akan berhasil bila hal-hal yang diandaikan dapat terpenuhi komunitas lokal seperti isu utama apa yang perlu dinegosiasikan, alat-alat atau subyek negosiasi, pelaku negosiasi, dan titik mula proses negosiasi.

Lee³⁶ kemudian menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan (*an ecological damage*) merupakan persoalan utama yang menjadi latar belakang kajiannya. Korporasi tidak memerhatikan sejumlah aspek penting berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan untuk 'generasi sosial' di sekitar kawasan tambang. Kekalahan

³⁵ J. Craig Jenkins & Doug Bond. (2001). Conflict-Carrying Capacity, Political Crisis, and Reconstruction: A Framework for the Early Warning of Political System Vulnerability in *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 45, No. 1 (Feb., 2001), pp. 3-31 Published by: Sage Publications, Inc.

³⁶ Charles Lee .(2002). Environmental Justice: Building a Unified Vision of Health and the Environment in *Environmental Health Perspectives*, Vol. 110, Supplement 2: Community, Research, and Environmental Justice. pp. 141-144 Published by: The National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) Stable URL: <http://www.jstor.org>.

komunitas lokal tampak pada degradasi lingkungan sebagai akibat lanjutan (langsung) perluasan eksploitasi korporasi. Kajian ini menemukan perluasan cara pandang terhadap persoalan lingkungan. Lee mengemukakan bahwa aspek-aspek sosial dan budaya semestinya menjadi bagian penting telaahan persoalan lingkungan. Aspek-aspek sosial dan budaya menjadi hal penting untuk dimasukkan ke dalam 'strategi negosiasi'³⁷ komunitas lokal terhadap korporasi.

Armitage³⁸ kemudian menawarkan proses perubahan yang terjadi pada komunitas sosial yang berhubungan langsung dengan kehadiran korporasi. Perubahan sosial ini akan memengaruhi cara pandang komunitas terhadap korporasi. Dengan terang, hal ini merujuk pada satu tipe dinamika sosial dengan keterkaitan erat pada perubahan kesadaran di lingkungan komunitas sosial. Sikap-sikap komunitas lokal dalam 'menentang' dan memberikan koreksi terhadap korporasi termasuk dalam perhatian kajian ini.

Kajian ini mengetengahkan korelasi antara politik pembangunan yang beroperasi di tingkat lokal dengan menggunakan korporasi sebagai instrumen utama dengan komunitas lokal sebagai titik krusial praktik pembangunan. Dampak-dampak destruktif operasi korporasi pada akhirnya berkaitan dengan keberlangsungan sosial komunitas. Di pihak lain, dinamika sosial berkaitan dengan perkembangan kesadaran komunitas sosial berkaitan dengan kehadiran korporasi yang menjalankan operasi mereka secara masif di kawasan yang merujuk pada keberadaan dan hak komunitas lokal.

³⁷ Salah satu kajian terbaik tentang strategi negosiasi dilakukan oleh sejumlah peneliti. Lihat. Bebbington, Anthony, Denise Humphreys Bebbington, Jeffrey Bury, Jeannet Langan, Juan Pablo Muñoz, and Martin Scurrah. "Mining and social movements: struggles over livelihood and rural territorial development in the Andes." *World development* 36, no. 12 (2008): 2888-2905.

³⁸ Derek Armitage. (2004). Nature: Society Dynamics, Policy Narratives, and Ecosystem Management: Integrating Perspectives on Upland Change and Complexity in Central Sulawesi, Indonesia in *Ecosystems*, Vol. 7, No. 7, pp. 717-728.

Kasus kajian Armitage relevan dengan penelitian tesis ini. Pembangunan nasional (Indonesia) yang bergerak di tingkat lokal (dalam kajian Armitage: Sulawesi) merupakan contoh tepat untuk melihat bagaimana dinamika sosial komunitas lokal bisa menawarkan argumentasi alternatif yang mendesak munculnya sisi etik konsep pembangunan dan menentukan bagaimana politik pembangunan dikerjakan dengan lebih baik berdasarkan konteks dan kebutuhan lokal. Komunitas lokal dengan kekayaan dinamikanya tidak sekadar menjadi alat untuk menyediakan sumber daya, tetapi semestinya memengaruhi cara negara menyusun politik dan praktik pembangunan.

Lebih jauh, Nadkarni³⁹ menawarkan analisis lain bertolak dari titik pandang dan kerangka pesimistik terhadap komunitas lokal. Kemunduran komunitas lokal muncul berkaitan dengan daya hidup yang merosot akibat pola pendekatan pembangunan yang tidak lagi memperhitungkan lingkungan sebagai basis kehidupan komunitas. Lingkungan diperlakukan sebagai titik tumpu tunggal proses pembangunan, meskipun mekanisme semacam itu pada gilirannya menghasilkan kehancuran pada komunitas lokal. Pembangunan mengakibatkan kemiskinan dan ketidakseimbangan sosial bagi komunitas lokal. Kemiskinan merupakan gambaran proses pembangunan yang mengutamakan dan memutlakan keuntungan ekonomis (akumulasi profit) sebagai satu-satunya pertimbangan.

Evans, *et. al.*⁴⁰ dalam studi mereka menyimpulkan posisi subordinatif komunitas terhadap korporasi tambang dalam multiaspek karakter dan mekanismenya. Kajian-kajian yang dituangkan dalam buku studi mereka memunculkan beberapa persoalan pokok. *Pertama*, munculnya dominasi korporasi dalam

³⁹ MV Nadkarni.(2000). Poverty, Environment, Development: A Many-Patterned Nexus in *Economic and Political Weekly*, Vol. 35, No. 14, pp. 1184-1190 Published by: Economic and Political Weekly Stable URL: <http://www.jstor.org>.

⁴⁰ Geoff Evans, et. al. (2001). *Moving Mountains: Communities Confront Mining and Globalisation*, Australia: Mineral Policy Institute.

bentuk kekuatan hegemoni yang mengurung komunitas dan pemerintah. Keberadaan korporasi membuat tidak berdaya baik negara maupun komunitas berhadapan dengan korporasi. *Kedua*, korporasi tambang tidak memiliki 'akuntabilitas sosial' yang kuat terhadap komunitas. Daya jangkauan korporasi tambang yang begitu luas membuat keberadaan dan kehadirannya bisa melumpuhkan komunitas lokal dan pemerintah.

Ketiga, tidak adanya format pengaturan (regulasi) yang cukup sesuai untuk memetakan posisi dan hubungan antara korporasi dan komunitas. Lemahnya "*self-determination*" pada komunitas lokal merupakan salah satu isu utama yang dikemukakan dalam kajian mereka. Komunitas lokal mempunyai kekuatan dan 'kedaulatan' sosial-ekologis untuk mengatur diri mereka sendiri termasuk posisinya dalam relasi dengan korporasi tambang. Kedaulatan lokal merupakan salah satu persoalan penting yang harus dimiliki komunitas agar dapat membangun sistematisasi negosiasi dengan korporasi dan pemerintah.

C. Analisis

Dari paparan studi di atas, terdapat beberapa temuan yang sangat relevan dan signifikan bagi penelitian ini. *Pertama*, relasi tripolar ini umumnya dikaji berdasarkan studi kasus. Kasus-kasus konflik pertambangan memunculkan karakter yang berbeda dari satu lokasi ke lokasi lainnya berdasarkan kondisi sosial dan budaya yang ada pada lokus pertambangan.

Kedua, tiga kekuatan ini bertolak dari masing-masing titik berangkat dengan dasar argumentasi yang berbeda. Negara berkaitan dengan persoalan legalitas. Korporasi berhubungan dengan aspek profit. Komunitas lokal berkaitan dengan aspek kedaulatan. Perbedaan titik tolak ini memicu munculnya konflik yang terjadi dalam relasinya.

Ketiga, kesempatan yang sama justru menimbulkan ketimpangan relasi ketiga kekuatan ini. Modal, teknologi dan hak regulatif negara sering kali memperkuat ketidakseimbangan relasi tripolar ini. *Keempat*, lokal memiliki aspek-aspek yang menentukan profil konflik di lingkungan pertambangan. Aspek-aspek ini menentukan bagaimana komunitas lokal membangun resistensi terhadap korporasi dan negara.

Kelima, karakter yang khas pada komunitas lokal akan menentukan bagaimana transformasi hubungan tripolar ini berjalan. Apakah teori sosiologi pembangunan yang bertolak dari perspektif hubungan tripolar ini mencukupi untuk menjelaskan problematika yang terjadi di level komunitas lokal atau tidak.

D. Penutup

Tinjauan kepustakaan dalam bab ini ditempatkan sebagai titik tolak komprehensif dalam menemukan basis konseptual studi ini. Sejumlah isu kunci yang dimunculkan sejumlah akademisi dan peneliti yang dimunculkan dalam tinjauan ini menawarkan prospek teoretis yang spesifik dalam meneropong problematika ketegangan dan konflik antaraktor-institusi dalam persoalan tambang sebagai pengalaman global. Dengan ini, tinjauan kepustakaan yang dihadirkan dalam bab ini menyediakan satu pemahaman utuh dinamika hubungan antaraktor-institusi.



BAB 4

SEKILAS SEJARAH PERTAMBANGAN DI MANGGARAI

A. Pengantar

Manggarai sebagaimana diketengahkan dalam bab 1 adalah gambaran yang cukup tepat tentang ‘keberlimpahan’ mineral. Berhubungan dengan ungkapan ini, kemudian tidak salah jika apa pun yang berhubungan dengan tambang menjadi bagian dari cerita kehidupan daerah ini. Tentu saja, untuk mengerti kedalaman dan keluasan apa yang disebut dalam studi ini sebagai ‘perlawanan’ lokal, pemahaman yang cukup lengkap tentang ‘Manggarai’ sebagai konteks studi merupakan satu kebutuhan penting di sini. Bab ini secara khusus berusaha memaparkan ‘Manggarai’ sebagai kerangka kontekstual keseluruhan studi ini.

B. Manggarai sebagai Konteks Persoalan

Manggarai⁴¹ adalah sebuah kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara administratif di bagi menjadi 227 desa dan 27 kelurahan dengan Ruteng sebagai ibu kota dan pusat pemerintahannya. Secara geografis, wilayah Kabupaten Manggarai terletak di antara 8°14' LS-09°00 LS dan 120°20' BT – 120°30' BT. Kabupaten ini memiliki luas 4.188,9 km² atau 418.897 ha dengan batas-batas sebagai berikut.⁴²



Gambar 1. Peta Kabupaten Manggarai

- Sebelah Barat, Kabupaten Manggarai Barat;
- Sebelah Utara, Laut Flores;
- Sebelah Timur, Manggarai Timur
- Sebelah Selatan, Laut Sawu.

Manggarai membentang sebagai daerah perbukitan dengan sejumlah gunung dengan rata-rata berada pada ketinggian antara 100 – 1000 m di atas permukaan laut (m dpl). Di antara

⁴¹ Manggarai dalam pembahasan ini Kabupaten Manggarai sebelum pemekaran menjadi Manggarai dan Manggarai Timur. Semua kebijakan pertambangan berhubungan dengan wewenang regulasi Pemkab (Pemkab) Manggarai, Provinsi NTT.

⁴² Lihat www.manggarai.go.id/, diunduh pada 23 Maret 2009.

perbukitan dan pegunungan, terdapat dataran rendah yang subur. Topografi seperti ini menjadikan Manggarai sebagai daerah yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan dengan aneka tanaman perdagangan.

Sebagian besar lokasi Manggarai (70,45%) mempunyai tingkat kemiringan di atas 40⁰. Keadaan ini menjadikan biaya pembangunan di kawasan Manggarai menjadi sangat mahal dan akses masyarakat menjadi sulit ke tempat-tempat lain. Karena itu, pemanfaatan tanah untuk kegiatan produktif masih terbatas. Dari total luas 418,897 ha, hanya 16,06% (\pm 63 ha) yang telah dimanfaatkan untuk perkampungan, pertanian, dan perkebunan. Sementara itu, keadaan iklimnya terdiri dari dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Jumlah curah hujan rata-rata mencapai 2.440,9 mm dengan 7 bulan basah setiap tahun dan tingkat kelembaban udara di atas 80 %.⁴³

Jumlah penduduk Manggarai pada tahun 2006 sebanyak 510.744 jiwa dan 108.278 KK. Tingkat kepadatan penduduknya sebesar 122,82 jiwa/km². Distribusi jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada tahun 2006 terkonsentrasi di 6 (enam) kecamatan, yaitu Satar Mese, Borong, Poco Ranaka, Langke Rembong, Ruteng, dan Wae Ri'i. Dari segi usia, jumlah terbesar berada pada penduduk dengan usia 15-64 tahun, 57,11% dari total penduduk Manggarai. Rata-rata pertumbuhan penduduk sesuai SUPAS 2005 adalah 2,01% per tahun. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk NTT yang hanya sebesar 1,8% per tahun.

Perekonomian Manggarai memiliki sejumlah sektor unggulan yang dapat dikembangkan untuk membangun perekonomian lokal. Menurut data resmi Pemkab Manggarai⁴⁴, sektor unggulan

⁴³ Suatu Penelitian ilmiah tentang Perubahan iklim Global menyebutkan bahwa sejak tahun 1990, curah hujan di Manggarai telah berkurang dari 6 bulan per tahun, *Majalah Tempo* Desember, 2007.

⁴⁴ Potensi Unggulan bidang Agribisnis, Komoditi Unggulan di Kabupaten Manggarai, www.manggarai.go.id/ diunduh pada 23 Maret 2009. Sumbangan sektor-sektor

dimaksud adalah pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan, kehutanan, pariwisata dan pertambangan. Sumbangan sektor unggulan terhadap perekonomian Manggarai pada tahun 2001 mencapai 62.87%, meskipun persentasenya terus menurun dari tahun ke tahun, sektor unggulan tetap mendominasi struktur perekonomian Manggarai. Pada tahun 2006, sumbangannya sebesar 51.09%, sedangkan sektor sekunder hanya mencapai 8,32% yang berasal dari industri dan pengolahan, listrik dan air bersih serta konstruksi; dan sektor tersier, yakni sektor jasa kontribusinya mencapai 23,59% dibandingkan tahun 2001 yang hanya 12,97%.

Lebih dalam, kontribusi sektor unggulan terbesar terhadap PAD pada tahun 2006 berasal dari sektor pertanian, sebesar 48,77%; disusul dengan sektor jasa sebesar 23,59%; perdagangan, perhotelan dan restoran 10,47%; dan konstruksi sebesar 7,09%. Sektor pertambangan yang dikategorikan sebagai sektor unggulan memiliki kontribusi hanya sebesar 2,32%, masih lebih kecil dibandingkan dengan sektor angkutan dan komunikasi yang memiliki kontribusi sebesar 3,77%. Kontribusi setiap sektor perekonomian itu memengaruhi juga pertumbuhan ekonomi Manggarai. Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Manggarai mengalami fluktuasi. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Manggarai sebesar 3,84% dan mengalami kenaikan pada tahun 2005, dengan angka pertumbuhan sebesar 3,94%; tetapi pada tahun 2006, mengalami penurunan sehingga angka pertumbuhannya hanya sebesar 3,90%.

Keadaan perekonomian seperti ini berdampak pada pendapatan per kapita Manggarai. Rata-rata pendapatan per kapita

lain terhadap PDRB Kabupaten Manggarai: Jasa-jasa 17,71%, Perdagangan, Hotel dan restoran 10,26%, Bangunan / Konstruksi 7,44%; Pengangkutan dan komunikasi 4,19%; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 2,85%; Pertambangan dan Penggalian 2,45%; Industri Pengolahan 1.04%; Listrik dan Air Bersih 0,35%, Sumber, BPS Kabupaten Manggarai, 2004, www.manggarai.go.id/, diunduh pada 23 Maret 2009.

masyarakat Manggarai pada tahun 2006 sudah mencapai Rp2.149.202,00 meningkat dari Rp2.040.926,00 pada tahun 2005. Dari 12 kecamatan di Manggarai, kecamatan dengan pendapatan per kapita terbesar, yaitu: Langke Rembong, disusul Reok, Wae Ri'i, dan Lambaleda. Pendapatan per kapita terendah pada tahun 2006 ditemukan di Kecamatan Cibal, yakni Rp1.608.216,00.

C. Kosmologi Manggarai: Pandangan tentang Wujud Tertinggi, Manusia, dan Alam

Secara singkat, bagian ini akan membahas kosmologi masyarakat Manggarai. Kosmologi ini berhubungan dengan tiga konsep utama termasuk pandangan tentang wujud tertinggi, manusia, dan alam. Masyarakat Manggarai mempunyai pandangan tentang wujud tertinggi, manusia dan alam yang bersifat kosmik. Nilai-nilai sosial dan budaya berkaitan dengan kesatuan hidup antara manusia dan alam sekitarnya. Nilai-nilai sosial-budaya ini menentukan pandangan masyarakat Manggarai tentang pola-pola kehidupan baru di sekitarnya.

Orang Manggarai mengakui adanya 'wujud tertinggi'. Mereka menyebut wujud tertinggi itu dengan banyak nama, seperti *Mori (n)*, *Mori (n) agu Ngaran*, *Mori Keraéng*, *Mori Somba*, dan lain-lain. Nama-nama itu berkaitan erat dengan manusia dan dunianya. Dengan pandangan semacam ini, orang Manggarai memahami konsep Wujud Tertinggi secara antropomorfistik. Meskipun ada banyak nama yang diberikan kepada wujud tertinggi, tetapi *Mori Keraéng* merupakan nama yang paling lazim dan paling sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Manggarai.

Sebuah studi mengenai Wujud Tertinggi orang Manggarai telah dibuat oleh J.A.J. Verheijen (1991). Orang Manggarai dalam studi ini melihat *Mori Keraéng* sebagai pencipta, pemelihara, dan pemilik segala sesuatu. *Mori Keraéng* merupakan 'penyebab

utama' segala yang ajaib dalam alam semesta. *Mori Kraeng* adalah pemberi kekuasaan dan ilmu pengetahuan. Wujud tertinggi juga diyakini sebagai kekuatan utama dan tunggal yang memberikan kesejahteraan (kemakmuran), dan menghukum orang-orang jahat. Di samping itu, *Mori Keraéng* juga yang menentukan umur seseorang. Dengan pandangan seperti ini maka manusia Manggarai harus selalu memperhitungkan segala sikap dan tata hidupnya dalam hubungannya dengan keyakinan mereka terhadap *Mori Keraéng*.

Untuk menjalin hubungan dengan *Mori Keraéng*, orang Manggarai melakukan sejumlah kegiatan. Verheijen (1991: 120-162) menyebut beberapa cara orang Manggarai berhubungan dengan Wujud tertinggi, antara lain: melakukan doa-doa pribadi dan keluhan tanpa persembahan, bersungut-sungut terhadap *Mori Keraéng* dan mengutuk diri, mengutuk dan menyerapahi, doa dan ritus pribadi, doa dan ritus keluarga atau klan, serta upacara-upacara umum yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Melalui ritus-ritus dan tindakan-tindakan ini, orang Manggarai berusaha menciptakan hubungan yang harmonis dengan *Mori Keraéng*: mempertahankan yang baik dan memperbaiki yang telah rusak akibat perbuatan manusia.

Pandangan seperti ini kemudian memengaruhi keyakinan religius orang Manggarai. Oleh karena itu, meskipun saat ini bagian terbesar orang Manggarai (hampir 95%) menganut agama Katolik Roma, keyakinan seperti itu masih tetap memengaruhi mereka (Mirsal, 2004: 33), bahkan dalam praktik religius orang Manggarai lebih menampilkan sebuah sinkretisme yang kental antara tradisi Katolik Roma dan ritus-ritus religius tradisonal.

Lebih lanjut, pemikiran orang manggarai mengenai manusia tampak paradoksal. Di satu sisi, orang Manggarai melihat manusia sebagai satu kesatuan, baik sebagai individu dalam hubungan dengan masyarakat secara keseluruhan, maupun antara dunia batin/spiritual dan dunia lahir. Di sisi lain, orang manggarai juga

membuat pemisahan antara orang luar dan orang dalam, dunia batin dan dunia lahir (bdk. Erb,1999: 20-35). Ungkapan yang terkenal mengenai pemisahan manusia adalah *ata pe'ang* (orang luar) dan *ata one* (orang dalam).

Pemisahan itu tidak hanya ketika mereka berhubungan dengan orang dari kelompok lain, tetapi sejak lahir seseorang sudah dibedakan apakah ia termasuk orang dalam atau orang luar. Jika yang lahir adalah anak perempuan maka ia adalah 'orang luar' karena kelak ia akan menikah dengan anggota suku lain dan tergabung dalam keluarga suami. Sebaliknya, bila yang lahir adalah anak laki-laki maka ia adalah 'orang dalam' karena ia akan menjadi pewaris dan penerus keturunan suku. Pandangan ini memengaruhi sistem perkawinan orang Manggarai yang lebih menekankan kedekatan hubungan darah yang disebut perkawinan 'tungku'.

Selanjutnya, mengenai pemisahan antara dunia batin/spiritual dan dunia lahir, bisa terlihat dalam pandangan mengenai orang yang telah mati. Bagi orang Manggarai hidup hanya sekali dan sesudah itu mati. Orang yang telah mati adalah orang yang sudah berpisah dari hidup sekarang. Ia tidak dapat hidup lagi. Ia sudah berada dalam dunia yang berbeda dengan manusia. Ada ritus khusus yang menegaskan oposisi hubungan itu, yakni upacara *kélas*. Dengan *kélas* hubungan antara orang yang hidup dan orang yang mati diakhiri. Orang yang telah mati tidak lagi hidup dan bertindak atas cara manusia di dunia. Menurut Meribeth Erb pandangan ini memengaruhi orang Manggarai menganggap regenerasi keturunan sebagai sesuatu yang penting.

Meskipun demikian, cara pandang mengenai dua sisi dunia manusia bukanlah pemisahan yang mutlak. Orang Manggarai sebagai masyarakat agraris tetap bergantung pada dunia di sekitarnya. Di sini, dunia batin/spiritual tidak bisa dipisahkan secara mutlak dari dunia lahir, demikian juga *ata pe'ang* dari *ata one*. Orang Manggarai menganggap segala sesuatu sebagai

satu kesatuan dalam keseluruhannya, saling berkaitan, dan membentuk keutuhan yang lestari. Bagi orang Manggarai, manusia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dunia sekitarnya, termasuk dengan sesama manusia. Tidak ada pemisahan secara tegas antara manusia dan dunianya, antara dunia batin dan dunia lahir. Kesatuan dan harmoni dengan alam dan sesama tetap dijaga.

Orang Manggarai melihat dirinya dalam hubungan kebersamaan dengan orang lain. Individu berperan dan berfungsi sejauh ia berada dalam kebersamaan dengan orang lain (komunalitas). Kebersamaan itu terlihat jelas dalam upacara-upacara untuk menghormati dan merayakan siklus kehidupan (kelahiran, perkawinan, kematian). Salah satu perayaan kebudayaan yang terkenal, yaitu *Penti* (sebuah pesta syukur panen atau dipahami sebagai syukur atas keberhasilan). Bagaimanapun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk kemajuan informasi telah memengaruhi alam pemikiran orang Manggarai.

Sikap dan perilaku orang Manggarai terhadap alam merefleksikan gambaran pemikiran mereka tentang alam sekitarnya. Orang Manggarai selalu mengadakan 'ritus-ritus' tertentu sebelum mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan alam. Kebanyakan ritus berkaitan dengan seluruh proses pertanian. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa orang Manggarai melihat alam sebagai sesuatu yang sakral; *entitas* yang harus dijaga dan dihormati. Aspek sakralitas itu di samping karena mereka berkeyakinan bahwa alam semesta yang diciptakan oleh *Mori Keraéng* itu merupakan tempat diam roh-roh alam raya dan roh-roh para leluhur, tetapi terlebih lagi karena alam semesta bagi orang Manggarai merupakan sesuatu yang hidup atau setidaknya tidaknya diresapi oleh daya yang menghidupkan.

Hal itu membawa kita kepada pemahaman bahwa orang Manggarai melihat alam semesta sebagai sesuatu yang hidup. Mereka memandang dunia atas (langit) sebagai '*bapa*' kehidupan

yang selalu memberikan mereka cahaya matahari dan bulan, serta bintang-bintang yang selalu mencurahkan hujan, lambang daya hidup yang diberikan kepada bumi. Demikian juga orang Manggarai memandang bumi sebagai 'ibu' yang melahirkan segala yang ada di bawah dan di permukaannya, segala yang hidup. Ungkapan yang khas mengenai pandangan ini adalah *Ĕma (Ame) ěta, Ine Wa (Bapa di atas, Ibu di bawah = langit di atas, bumi di bawah)*. Verheijen menjelaskan hal ini sebagai sebutan orang Manggarai bagi Wujud Tertinggi (Verheijen, 1991: 41-46).

Unsur-unsur alam itu selalu berada dalam suatu hubungan yang damai dan sejajar, juga hubungan antara unsur-unsur alam itu dengan manusia serta antara alam dan manusia dengan dunia adirkodrati. Alam, manusia, dan dunia adirkodrati berada dalam suatu hubungan yang harmoni. Hubungan yang demikian diungkapkan melalui ritus-ritus tradisional yang menyatakan bahwa antara alam, manusia, dan Yang Ilahi berada dalam suatu hubungan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain.

Kesatuan hubungan manusia dengan alam diungkapkan dalam prinsip *gendang oně, lingko pe'an*. Hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari alam raya di sekitarnya, artinya bergantung pada alam di sekitarnya. Karena itu, perlu ada kekuasaan untuk mengatur (*gendang; bisa dipersepsikan sebagai bentuk demokrasi politik*) yang dinyatakan dalam pengaturan tanah sebagai lahan pertanian (*lingko; bisa dipersepsikan sebagai konsep demokrasi ekonomi masyarakat Manggarai*).

Jika keselarasan itu terganggu karena sikap dan perilaku tidak berkenan manusia maka proses pemulihan harus segera dilakukan melalui pemberian sanksi kepada orang yang melanggar dengan melakukan ritus pemulihan. Ritus-ritus dimaksud, antara lain: *teing hang ceki* (memberi makan kepada roh-roh nenek moyang), *penti* (syukur sesudah panen), *barong wae teku* (memberi makan kepada roh-roh yang ada di mata air), *takung naga golo*

(memberikan makan kepada pelindung kampung), dan lain-lain (Mirsal, 2004: 27).

D. Sekilas Sejarah Pertambangan di Manggarai

Penyelidikan terhadap potensi mineral di daerah Manggarai telah dimulai sejak masuknya PT Aneka Tambang (1980). Penyelidikan itu terus dilakukan hingga beberapa waktu kemudian. Hasil penyelidikan dalam kurun waktu itu menunjukkan bahwa di Kabupaten Manggarai (termasuk Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur) terdapat potensi bahan galian mineral. Berikut gambaran umum tentang kronologi sejarah pertambangan di Kabupaten Manggarai (termasuk Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur):

Tabel 3. Deskripsi Sejarah Pertambangan Manggarai⁴⁵

Tahun	Lembaga	Kegiatan
1980	PT Aneka Tambang	Penyelidikan umum dan Eksplorasi tambang mangan
	PT Nusa Lontar Mining dan PT Flores Indah Mining (Billiton)	Eksplorasi bahan mineral
1993	<i>Geological Research and Development Centre</i> (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi)	Pemetaan Geologis tentang segi empat Ruteng (<i>Geological Map of The Ruteng Quadrangle</i>)
	PT Istindo Mitra Perdana	Studi Kelayakan Penambangan Mangan di Reo
1994	Direktorat Sumber Daya Mineral	Penyelidikan Pendahuluan Logam Besi dan Panduan Besi

⁴⁵ Menurut Pemaparan hasil-hasil kegiatan lapangan dan non-lapangan tahun 2006 oleh Pusat Sumber Daya Geologi, ditemukan daerah-daerah bekas penambangan di Wancang, Kecamatan Cibal dan Bajak di Kecamatan Reok; bdk. Sukmana, Inventarisasi Mangan di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jakarta, 2006.

Tahun	Lembaga	Kegiatan
1996-1997	Direktorat Sumber Daya Mineral	Eksplorasi Pendahuluan Bahan Galian Industri di daerah Kabupaten Manggarai
	Direktorat Sumber Daya Mineral Bandung	Pemetaan semi mikro terhadap 35 bahan galian golongan C
		Penggalian mangan di kampung Timbang
1998	PT Flores Barat Mining (Singapura dan PT Aneka Tambang)	Eksplorasi di wilayah Kontrak Karya Kabupaten Manggarai
2002	Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral, Bandung	Penyelidikan Geokimia Regional Lembar Ruteng Barat
2004	PT Istindo Mitra Perdana.	Eksplorasi Mangan di Kecamatan Lambaleda
2005	PT Sumber Jaya Asia	Eksplorasi mangan di Kecamatan Reok (Siwa & Wangkal-Kajong)

Hasil pemetaan dan penyelidikan geologi dan geokimia sejak tahun 1980 sampai 2008 merekomendasikan sejumlah temuan mineral yang signifikan sebagai berikut. *Pertama*, sejumlah daerah di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur dijumpai beberapa tipe pemineralan. Di daerah gugusan pemineralan Pesi – Kalo – Nere terdapat tipe pemineralan tembaga (Cu) yang disertai dengan emas (Au). Gugusan pemineralan yang didominasi oleh emas (Au) terdapat di daerah Kuli, Watu Cie, dan Sapo. Di samping itu, juga ditemukan sejumlah jenis mineral di gugusan pemineralan Bari, Musur, Rawul, Encuring (Ncuring, *red*) dan Wangkal.⁴⁶

⁴⁶ Agus Gurniwa, Penyelidikan Geokimia Bersistem Lembar Ruteng Barat, Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sub Direktorat Mineral Logam, 2005, <http://www.dim.esdm.go.id/>, diunduh pada 18 Maret 2009.

Kedua, ada endapan mangan di Kabupaten Manggarai (dan Manggarai Barat dan Manggarai Timur) di Kecamatan Reok, Cibal, Lambaleda dan Sambu Rampas. Endapan mangan yang ditemukan itu memiliki prospek yang sangat signifikan dengan 3 kategori, yaitu (1) endapan mangan yang sedang ditambang, (2) endapan mangan yang telah ditambang, dan (3) endapan mangan yang masih merupakan tahap kegiatan eksplorasi. Daerah-daerah yang ditemukan sebaran mineralisasi mangan, antara lain di Ponglalap, Rokas, Tumbak, Waso dan Merong, Kajong, Lante, Wangkal, Kubis, Meas, Kadung, dan Ngampur. Khusus untuk endapan mangan di kampung Wangkal cukup menarik karena persis di kampung. Demikian juga di Kampung Meas, endapan mangan dekat dengan kampung sehingga kampung harus dipindahkan manakala lokasi mangan di wilayah itu akan dieksploitasi.⁴⁷

Ketiga, endapan mangan yang dijumpai di Bukit Golo Rawang paling signifikan dan prospektif. Secara geologis, sebarannya cukup luas. Dari puluhan lubang bor di Golo Rawang, endapan mangan primer terdapat di TP (Tempat Pemboran) 04, TP 09, TP 10, TP 11, TP 12, TP 13, TP 14. Luas sebaran I: 6000 m dengan ketebalan yang bisa diolah 6 meter dan berat jenis 4,5, menunjukkan total sumber daya: 81.000 ton mangan. Luas sebaran II: 10.000 meter dengan ketebalan yang bisa diolah 6 meter dan berat jenis 4,5 menghasilkan 135.000 ton mangan. Dengan kata lain, hasil total perhitungan sumber daya menunjukkan endapan mangan di wilayah ini berkisar antara 81.000 ton hingga 135.000 ton, dengan ketebalan hingga 6 meter.⁴⁸

⁴⁷ Sukmana (Kelompok Program Penelitian Mineral), Inventarisasi Mangan di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pusat Sumber Daya Geologi, 2006, <http://www.dim.esdm.go.id/>, diunduh pada 18 Maret 2008.

⁴⁸ Sukmana (Kelompok Program Penelitian Mineral), Eksplorasi Umum Endapan Mangan di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pusat Sumber Daya

Sepanjang periode pertama tahun 2000-an ada peningkatan kegiatan berkaitan pertambangan, terutama penyelidikan umum dan eksplorasi. Pemerintah cenderung memberikan kesempatan yang besar kepada korporasi tambang untuk melakukan penyelidikan umum dan eksplorasi di Manggarai.⁴⁹

Tabel 4. Izin KP 2004-2007

No	Lembaga	Jenis KP	Lokasi Penambangan	Jenis	Luas (Ha)
1.	PT Istindo Mitra Perdana	Eksplorasi HK/116/04	Kecamatan Lambaleda	Mangan	736.30
2.	PT sumber Jaya Asia	KP Eksplorasi HK/168/05	Kecamatan Reok (Siwa & Wangkal-Kajong)	Mangan	667,9
3.	PT sumber Jaya Asia	KP Eksplorasi HK/28/06	Kecamatan Reok (Siwa & Wangkal-Kajong)	Mangan	194,4
4.	PT Agra Artha Mineral	KP Eksplorasi HK/29/06	Kecamatan Lambaleda	Mangan	6.205
5.	PT Lisindo Sentosa	KP Eksplorasi HK/31/06	Kecamatan Reok (desa Bajak, Nggorang, dan sekitarnya)	Mangan	3.963
6.	PT Tribina Sempurna	KP Penyelidikan Umum HK/2/2007	Kecamatan Reok (Soga dan Bone Wangka)	Mangan	1.086

Geologi, 2007, <http://www.dim.esdm.go.id>, diakses 18 Maret 2009.

⁴⁹ Penulis menemukan kenyataan di lapangan bahwa korporasi menggunakan kesempatan penyelidikan umum untuk melakukan eksploitasi mangan. Hal ini yang menyebabkan munculnya resistensi yang kuat dari MLT dan elemen-elemen lokal lainnya.

No	Lembaga	Jenis KP	Lokasi Penambangan	Jenis	Luas (Ha)
7.	PT Alaska Dwipa Perdana	KP Penyelidikan Umum HK/3/2007	Kecamatan Lambaleda (Rawang-Tengku Lawar)	Mangan	688,25
8.	PT Alaska Dwipa Perdana	KP Penyelidikan Umum HK/13/2007	Kecamatan Lambaleda (Rawang-Tengku Lawar)	Mangan	623,50
9.	PT Alaska Dwipa Perdana	KP Penyelidikan Umum HK/3A/2007	Kecamatan Lambaleda (Desa Bea Mese)	Mangan	529,25
10.	PT Tribina Sempurna	KP Eksplorasi HK/48/2007	Kecamatan Reok, Wae Dara, Desa Kajong	Logam Dasar	7.549
11.	PT Indomineral	KP Peny. Umum HK/49/2007	Kecamatan Reok	Logam Dasar	15.550

Dari kronologi tambang bisa terbaca bahwa Pemerintah lokal banyak menerbitkan KP di tahun 2007. Kebijakan Pemerintah di bidang pertambangan menunjukkan sebuah pergeseran komitmen dari *'peningkatan kualitas lingkungan'* ke *'penurunan kualitas lingkungan'*. Bagaimanapun juga keputusan ini sangat erat pengaruhnya dengan keutuhan lingkungan hidup Manggarai, yang dipelihara secara baik selama bertahun-tahun.

E. Penutup

Bab ini menyodorkan satu kesimpulan penting tentang sisi-sisi saling melengkapi sekaligus 'meniadakan' daerah Manggarai. Tambang terbayangkan sebagai sisi destruktif atas ekologi yang dipersepsikan sebagai satu poros penting keberadaan orang

Manggarai. Pendefinisian keberadaan orang Manggarai secara absolut terkait dan terhubung pada basis ekologis. Lingkungan hidup menjadi elemen fundamental pembentuk substansi keberadaan orang Manggarai.



BAB 5

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Pengantar

Bab ini akan mengemukakan beberapa konsep kunci yang digunakan dalam studi ini. Konsep-konsep ini digunakan untuk membatasi jangkauan pembahasan studi ini. Konsep-konsep ini, bagaimanapun tentu saja tidak secara absolut mengandung klaim dapat menjelaskan secara lengkap '*kompleksitas*' persoalan tambang yang digunakan sebagai kasus tunggal dalam studi ini. Beberapa konsep yang akan dibahas dalam bab ini, antara lain: negara, korporasi, komunitas lokal, resistensi, dan negosiasi.

B. Negara, Korporasi, Komunitas Lokal

Bagian ini menjelaskan tiga konsep (entitas) utama dalam konteks keterhubungan praktis di ranah isu tambang yang dikaji dalam studi ini. Ketiga konsep ini juga dijelaskan secara singkat dan hanya mengungkapkan pengertian yang akan dikaitkan dengan konteks kasus dalam kajian ini.

Pertama, negara sebagai kekuatan regulatif⁵⁰ yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Dalam banyak kasus, negara muncul sebagai kekuatan yang melakukan pendekatan bernuansa kekerasan terhadap komunitas (*society*). Kekerasan negara berkaitan dengan pembelaan dan perlindungan yuridis yang diberikan negara kepada korporasi. Perlindungan hukum ini menjadi pembenaran kekerasan, terutama kepada komunitas lokal yang berkaitan dengan hak pemilikan atas sumber daya alam.⁵¹

Kedua, Adams menyebutkan bahwa korporasi memiliki kekuasaan untuk menentukan seperti apa sumber daya alam dapat diatur sesuai kebutuhan dan target ekonomi yang ditetapkan korporasi. Ekspansi modal yang dijalankan korporasi memberikan keleluasaan kepadanya untuk melakukan komodifikasi terhadap sumber daya alam yang memenuhi standar kepentingan korporasi bisnis. Korporasi diberikan fasilitas hukum untuk melakukan monopoli pengelolaan sumber daya alam.⁵²

Ketiga, Frynas⁵³ menyebut komunitas lokal sebagai kelompok yang 'tak bernama' (anonim) dalam konteks hubungan tripolar, negara, korporasi dan *society*. Akibatnya, komunitas lokal diperlakukan sebagai salah satu modal ekonomi yang dapat dimanfaatkan korporasi untuk memperbesar produksi ekonominya. Penghancuran pengetahuan lokal menjadi ujung dari mekanisme destruktif yang dilancarkan korporasi dan negara dalam kaitannya dengan operasi tambang. Rich menganjurkan pembangunan yang mampu merefleksikan kepentingan akar

⁵⁰ Kajian global tentang posisi negara sebagai basis regulasi investasi korporasi bisa dilihat dalam studi ini: Vlado Vivoda (2008). "Assessment of the governance performance of the regulatory regime governing foreign mining investment in the Philippines." *Minerals & Energy-Raw Materials Report* 23, no. 3: 127-143.

⁵¹ Lihat R.J. Johnston. (1989). *Environmental Problems: Nature, Economy and State*. New York: p. 58

⁵² W.M. Adams. (2001). *Green Development*. London&New York: Routledge, p.157.

⁵³ Lihat contoh studi yang dilakukan J.G. Frynas. (2000). *Oil in Nigeria: conflict and Litigation between oil companies and village communities*. Hamburg: LIT.

rumpun (*grassroot*). Pembangunan yang berbasiskan pada kepentingan komunitas lokal.⁵⁴

C. Hubungan Tripolar

Pembangunan dewasa ini adalah salah satu tema paling dominan dalam kajian ilmu sosial. Ulasan seputar pembangunan juga dikaitkan dengan banyak isu. Salah satu tema penting yang dibahas dalam hubungannya dengan isu ini adalah relasi kekuatan antar aktor dan institusi dengan basis posisi dan peran signifikan dalam keseluruhan proses pembangunan. Banyak jawaban coba dikemukakan dalam kerangka memunculkan teori dan pendekatan baru dalam pembangunan. Hal ini dilakukan banyak pihak dengan anggapan dan ambisi akademik serta praktis memberikan solusi alternatif terhadap soal-soal krusial di seujur praktik pembangunan.

Hal mencolok untuk disebut dalam kajian ini bahwa konteks pembangunan sebagian besarnya atau dalam volume meyakinkan sudah bergeser dari segenap pusat ekonomi dan politik menuju komunitas lokal dengan sejumlah karakter khusus. Dengan begitu, salah satu jawaban kontemporer yang bisa atau coba dirancang dan diajukan adalah dengan memberikan tempat bagi 'peran kunci' (*a key role*) komunitas lokal dalam ruang dan proses pembangunan. Gagasan besar Corten (1987: 146) penting dalam konteks ini sebagai berikut.

Sebuah prioritas tinggi ditempatkan dalam proses demokratisasi. Warga didorong untuk melakukan mobilisasi kekuatan dan mengatur sumber-sumber daya lokal yang mereka miliki, dan secara bersama dengan pemerintah dalam menambahkan peran mereka sendiri.⁵⁵

⁵⁴ Lihat Bruce Rich, (1994). *Mortgaging the Earth: The World Bank, Environment and the Crisis of Development*, London: World Bank, p. 273.

⁵⁵ Lihat Korten, David C. "Third generation NGO strategies: A key to people-centered development." *World development* 15 (1987): 145-159.

Hal ini tentu tidak mudah. Pasalnya, politik pembangunan yang merujuk pada keberadaan komunitas lokal menimbulkan banyak implikasi dan efek yang akhirnya justru cenderung ‘membunuh’ komunitas lokal.

Kemunduran, kemerosotan lingkungan, dan hancurnya keseluruhan keseimbangan kehidupan merupakan muara dari praktik pembangunan semacam ini ini.⁵⁶ Asumsi teoretis yang dapat ditawarkan di sini bertolak dari refleksi pendek di atas dan dapat dikatakan bahwa sepanjang hampir dua dekade terakhir, ‘relasi asimetris’ (yang tidak seimbang) antara kekuatan (negara, pasar, dan masyarakat) yang menentukan arah pembangunan global, regional, dan lokal memunculkan persoalan negatif dan destruktif.

Dengan ungkapan yang lebih praktis, sistem dan mekanisme yang bekerja dalam proses dan dinamika hubungan antarkekuatan ini telah menghancurkan bumi dan kehidupan. Subjek, mekanisme dan pola yang menggerakkan sistem dan praktik pembangunan dengan model seperti ini justru memperkuat proses objektivikasi terhadap lingkungan dan kehidupan dengan sekadar memperlakukan keduanya sebagai basis akumulasi profit ekonomi (politik) belaka. Kecenderungan ini memperkuat apa yang disebut sebagai ‘pembangunan bermodel kapitalis’ (*a capitalist development*).⁵⁷

Kajian ini menawarkan konsep baru pada apa yang disebut dengan ‘hubungan tripolar’ dari gagasan teoretis yang diperkenalkan sejumlah pemikir yang dibangun di atas pertim-bangan tiga poros kekuatan, yaitu komunitas lokal (*society*),

⁵⁶ Bruce Rich, satu dekade lalu, menulis buku *Mortgaging The Earth: The World Bank, Environmental Impoverishment and The Crisis of Development*. INFID, tahun 1999, menerjemahkan dan menerbitkan buku ini, dengan judul *Menggadaikan Bumi: Bank Dunia, Penghancuran Lingkungan dan Krisis Pembangunan*.

⁵⁷ Gagasan ini bisa dibaca pada karya Kalyan Sanyal (2014). *Rethinking capitalist development: Primitive accumulation, governmentality and post-colonial capitalism*. New York: USA, Routledge.

pemerintah (*state*), dan korporasi (*market*).⁵⁸ Secara konseptual, masing-masing kekuatan memiliki landasan keberadaan dan fokus ketertarikan berbeda dalam satu konteks isu.

Beberapa aspek penting dapat digambarkan di sini. *Pertama*, pemerintah (negara) terikat pada satu esensi keberadaan dengan merujuk pada proses menyelenggarakan kesejahteraan umum (*a common good*). Keberadaan negara didasarkan pada kekuasaan yang dilimpahkan secara sah oleh masyarakat melalui suatu proses politik. Dengan posisi semacam ini, negara terwakilkan dalam kehadiran sejumlah lembaga publik dengan kuasa regulatif.⁵⁹ Dengan kuasa regulatif ini lembaga-lembaga publik menggenggam wewenang menyusun pengaturan, misalnya wewenang untuk melarang korporasi melakukan eksploitasi sumber daya alam yang membahayakan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

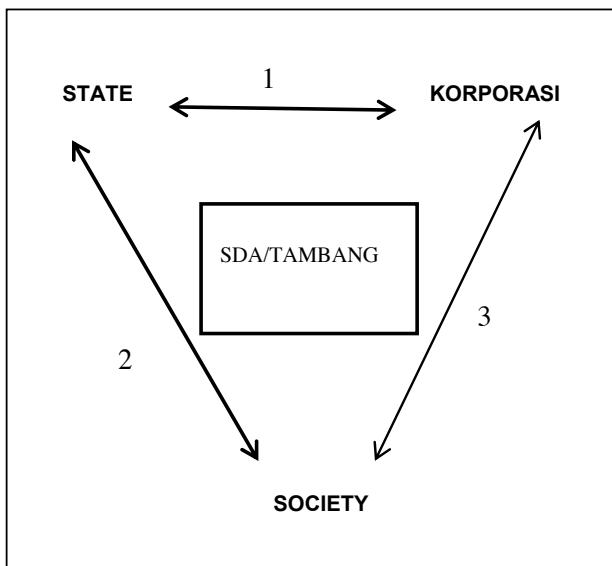
Kedua, pasar (*market*) atau sektor bisnis bergerak di ruang publik melalui urusan transaksi jual-beli barang dan jasa secara spontan, namun “*fair*” demi terbangunnya ‘keuntungan’ baik bagi penjual, pembeli, maupun masyarakat umumnya. Keuntungan dalam konteks ini tentu saja tidak hanya sebatas merujuk pada keuntungan finansial. Akumulasi keuntungan ini niscaya berhubungan dengan aspek-aspek esensial kehidupan bersama.

Ketiga, masyarakat warga (*society*) berinteraksi di ruang publik atas dasar saling percaya (*trust*). Mereka berinteraksi dengan basis tata perilaku sosial yang diandaikan ‘diterima’ dan ‘dihormati’ oleh semua pihak. Dalam konteks hubungannya dengan negara dan pasar, masyarakat bergerak di atas satu landasan kekuatan dengan apa yang disebut dengan ‘kedaulutan’.

⁵⁸ Kerangka pemikiran ini dapat dilihat dengan lengkap dalam John Martinussen.1999. *Society, State and the Market, A Guide to Completing Theories of Development*, Zed Books, p. 221-232.

⁵⁹ Ulasan komprehensif tentang isu Negara dan Kuasa Regulatif disajikan dalam Karen Yeung (2010), “The regulatory state.” Oxford: UK, Oxford University Press.

Dalam hubungan tripolar ini, warga (masyarakat), bukanlah entitas subordinan terhadap dua entitas lainnya.



Gambar 2. Hubungan tripolar simetris

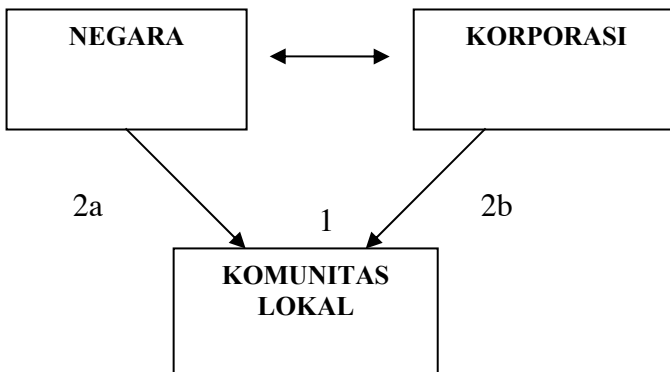
Pada penampang ideal, ada hubungan seimbang (simetris) antara ketiga elemen: negara, korporasi, dan komunitas lokal (Gambar 2). Keseimbangan ini terjadi karena tingkat perbedaan kepentingan terhadap sumber daya masih rendah. Setiap elemen belum mengeksploitasi kepentingan mereka sendiri untuk kemudian menjadi kekuatan dominan terhadap aktor lainnya. Negara (*state*), korporasi (*market*), dan masyarakat/komunitas lokal (*society*) bergerak secara seimbang sebagai tiga kekuatan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Bagaimanapun, Amartya Sen penting untuk dijadikan acuan dalam melihat perubahan hubungan antara ketiga elemen (aktor) ini. Konflik dan dominasi yang mewarnai dinamika hubungan antartetiga kekuatan (tripolar) dalam pembangunan dapat juga terjadi akibat perbedaan kapasitas setiap elemen.⁶⁰ Persoalan yang

⁶⁰ Gagasan ini penting ditempatkan dalam konteks hubungan tripolar ini untuk melihat dinamika pergeseran bentuk hubungan ketiganya. Lihat pemikiran Amartya Sen.

diingatkan Sen dapat digambarkan secara demikian. Korporasi memiliki kesempatan yang sama dengan komunitas lokal untuk terlibat dalam konteks dan proses pembangunan. Namun, aras kapasitas dan kapital yang dimiliki kedua kekuatan ini berbeda maka cara pandang dan apa yang diperoleh dari dinamika hubungan itu terhadap satu target substantif akan berbeda.

Hal inilah yang mengakibatkan munculnya dominasi satu atau lebih aktor (elemen) kepada elemen lainnya dalam konteks hubungan tripolar (Gambar 3). Dalam banyak kajian, korporasi dan negara digambarkan sebagai dua kekuatan dominan terhadap komunitas lokal, misalnya dalam kaitannya dengan politik pengelolaan sumber daya alam. Jika dibandingkan dan diperhadapkan dengan korporasi dan negara, komunitas lokal digambarkan sebagai aktor yang memiliki kapasitas dan kemampuan (lebih rendah). Perbedaan itu menjadi basis 'hubungan dominatif-subordinatif' antartetiga kekuatan. Di titik ini akan muncul apa yang bisa dinamakan dengan 'hubungan tripolar dominatif'.



Gambar 3. Hubungan tripolar asimetris

Polanyi dalam konteks dinamika hubungan asimetris ini menggambarkan hubungan dominatif sebagai 'putusnya koneksitas' antara operasi korporasi (*market*) dengan kepastian

sosial dan kebutuhan masyarakat (*society*). Korporasi yang bergerak dengan logika keuntungan mendominasi hubungan tripolar ini. Kondisi ini menimbulkan konflik antara kekuatan akibat ‘dominasi’ kepentingan korporasi. Hal ini mengakibatkan banyak persoalan muncul di ruang publik. Resistensi komunitas lokal, dalam konteks ini menjadi bagian dari proses manajemen konflik.⁶¹

Komunitas lokal terlibat dalam konflik, baik dengan negara maupun korporasi ketika posisi komunitas yang mengacu pada hak pemilikan lokasi (*area*) tambang tidak bisa menjadi basis untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan sebagai pemilik lahan tambang. Kondisi semacam ini menimbulkan konflik dan pertentangan antara komunitas lokal, negara, dan korporasi. Hal ini dikaitkan dengan kebutuhan untuk menciptakan tambang yang memiliki nuansa sosial atau sesuai kebutuhan dan kondisi komunitas lokal. Koslowski pada bagian lain menekankan pentingnya konsep korporasi ‘sosial’, yaitu eksplorasi korporasi yang tetap mengutamakan pertimbangan-pertimbangan ‘sosial’ yang memang tidak sejalan dengan argumentasi ‘profit’ dari korporasi.⁶²

D. Resistensi

Studi ini memunculkan isu resistensi komunitas lokal dengan titik tolak pada analisis dinamika hubungan tiga kekuatan.⁶³ Resistensi dalam diskusi ini berkaitan dengan pelembagaan ‘koreksi’ komunitas lokal terhadap negara dan korporasi.

⁶¹ Lihat penjelasan lebih lengkap dari gagasan ini dalam Karl Polanyi. (2001). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press, pp. 26 – 30.

⁶² Pertimbangan ‘sosial’ dalam konteks ini terutama berhubungan dengan keberlangsungan komunitas lokal terutama dalam kawasan operasi korporasi. Peter Kolowski. (1998). *The Social Market Economy: Theory and Ethics of Economic Order*. Berlin: Springer.

⁶³ Dalam pembahasan selanjutnya, komunitas lokal mengacu pada MLT (MLT) yang menghadapi persoalan multi-dimensi tambang secara langsung.

Dominasi menimbulkan perlawanan (resistensi) dari pihak 'subordinan'. Resistensi dengan demikian tidak hanya bermakna negatif, melainkan memiliki nilai konstruktif terutama untuk menggerakkan perubahan sosial terhadap sejumlah persoalan vital berkaitan dengan kehidupan komunitas.

Resistensi yang diwujudkan dalam bentuk mobilisasi massa dipandang berguna untuk menciptakan mekanisme baru dalam hubungannya dengan tumbuhnya semacam '*political will*' dan 'efektivitas' dalam proses distribusi keadilan sosial. Dalam konteks politik, resistensi sosial dapat mendorong tumbuhnya pemerintahan yang bersih dan lebih baik (*clean and good governance*). Resistensi sosial dapat dinyatakan dengan mengorganisasikan grup-grup oposisi yang muncul dalam komunitas terhadap negara dan korporasi yang menunjukkan dominasi terhadap kekuatan lain.⁶⁴

Resistensi merupakan cara yang dibangun dan dilakukan komunitas lokal terhadap 'ekspansi ekonomi' korporasi yang mengakumulasikan keuntungan (profit) tanpa batas di satu pihak dan meniadakan kedaulatan masyarakat di pihak lain. Hill dalam studinya menyebutkan bahwa resistensi komunitas lokal merupakan koreksi terhadap *mall* praktik dan seabrek kesalahan politik dan praktik pembangunan.⁶⁵ Scott lebih jauh menyimpulkan resistensi sebagai jawaban terhadap dua persoalan utama, yaitu 'risiko lingkungan' dan 'implikasi sosial' destruktif pembangunan.⁶⁶ Korporasi (*market*) maupun negara (*state*) cenderung memeragakan propaganda 'transformasi ekonomi' dengan daya rusak paling efektif terhadap keseimbangan ekologis, kerusakan sosial, dan degradasi ekonomi komunitas lokal.

⁶⁴ Thomas F. Homer-Dixon. (1999). *Environment, Scarcity, and Violence*, New Jersey: Princeton University Press.

⁶⁵ F. Hill. (1978). '*Experiments with Public Sector Peasantry: agricultural, Schemes and Class Formation in Africa*', hlm. 25-41.

⁶⁶ J. Scott. (1985). *Weapons of the Week: Everyday forms of Peasant Resistance*, Yale University Press: New Haven, ET.

Sementara itu, Bates menyebutkan tiga (3) hal penting berkaitan dengan resistensi komunitas lokal.⁶⁷ *Pertama*, resistensi memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan lokal yang diperhadapkan dengan korporasi dan negara. *Kedua*, pencapaian (*achievement*) resistensi yang dilakukan komunitas lokal berhadapan dengan korporasi dan negara. *Ketiga*, resistensi tampak dalam pengorganisasi kekuatan komunitas lokal untuk mendorong dua hal yang disebutkan sebelumnya.

Berhadapan dengan korporasi, komunitas lokal melakukan resistensi terhadap empat (4) persoalan penting sebagai berikut: rencana yang ditetapkan korporasi, proyek korporasi, area operasi korporasi, dan implikasi sosial ekologis operasi korporasi.⁶⁸ Spittler menyimpulkan bahwa komunitas lokal membutuhkan strategi dalam kerangka resistensi. Hal ini berkaitan dengan pilihan-pilihan tindakan yang dapat diambil komunitas lokal. Strategi resistensi mengandaikan kehadiran subyek-subyek yang memiliki kapasitas untuk menyusun pola dan mekanisme resistensi.

Ada beberapa bentuk resistensi komunitas lokal. *Pertama*, 'ketidakpatuhan diam' (*silent disobedience*) yang ditunjukkan, terutama berkaitan dengan regulasi yang mengatur proses operasi korporasi. *Kedua*, protes langsung melalui tekanan dan kontrol publik ketika berhadapan dengan korporasi dan negara. Resistensi sebagai mekanisme sosial komunitas lokal dilakukan dengan memerhatikan beberapa hal utama.⁶⁹ *Pertama*, membangun kapasitas komunitas lokal sebagai satu keutuhan

⁶⁷ R.H. Bates, (1983). *Essay in Rural Africa*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 46-55.

⁶⁸ Lihat penjelasan lebih lengkap pada Laporan Tahunan dari Friends of The earth International (2007). Institusi yang mengkaji perubahan-perubahan drastis yang terjadi di negara-negara dunia ketiga terutama berkaitan dengan dinamika hubungan antara korporasi, negara dan komunitas lokal.

⁶⁹ Lebih lengkap pembahasan dapat dilihat dalam Laporan Tahunan dari Institute for Research and Development (IRE), Yogyakarta, 2008.

berhadapan dengan korporasi dan negara. *Kedua*, resistensi dapat ditampakkan melalui forum-forum yang dibentuk komunitas lokal. *Ketiga*, mengorganisasikan inisiatif komunitas lokal.

E. Penutup

Bab ini secara lengkap menyajikan kerangka konseptual kajian ini. Di sini, resistensi (lokal) dimunculkan sebagai konsep kunci. Konsep resistensi digunakan sebagai salah satu aspek penting untuk menjelaskan dinamika hubungan antara negara, korporasi, dan komunitas lokal. Resistensi lokal menjelaskan aspek-aspek penting berkaitan dengan negara, korporasi, komunitas lokal dan elemen-elemen lain yang muncul di sekitar persoalan tambang Manggarai.



BAB 6

SEBAB-SEBAB RESISTENSI LOKAL

A. Pengantar

Bab ini akan menyediakan penjelasan komprehensif tentang resistensi lokal sebagai *'simpul utama'* analisis persoalan tambang di Manggarai. Resistensi mencerminkan perubahan pandangan dan sikap masyarakat lokal terhadap tambang, baik pada level investasi maupun regulasi. Resistensi merefleksikan beberapa elemen utama, seperti: regulasi, operasi, dan dampak tambang bagi masyarakat lokal serta lingkungan hidup. Bab ini secara khusus juga menjelaskan sejumlah sebab resistensi lokal.

B. Sebab-sebab Resistensi

Bagian ini secara gamblang akan menganalisis dan menjelaskan sebab-sebab resistensi lokal dalam konteks tambang di Manggarai. Bagaimanapun, studi ini tidak ingin mengklaim bahwa sebab-sebab resistensi yang dikemukakan dalam bagian ini akan menjelaskan keluasan dan keseluruhan persoalan

tambang. Sebab-sebab resistensi yang dipaparkan dalam bagian ini merupakan refleksi akademik atas kompleksitas hubungan antaraktor dalam kerangka besar pembangunan dengan tambang sebagai *'entry point'* untuk menerobos belantara persoalan yang terwakilkan dalam kasus tambang.

1. Dominasi

Dominasi menggambarkan posisi satu atau lebih kekuatan (elemen) yang menguasai elemen lainnya dalam konstruksi sosial.⁷⁰ Dominasi mendeskripsikan kapasitas yang melampaui keberadaan elemen lain.⁷¹ Dominasi juga berarti kekuatan dan implementasi kekuasaan tanpa kontrol. Dari studi lapangan, penulis menemukan kenyataan umum tentang pola dan model penguasaan korporasi dan negara terhadap semua aspek yang berkaitan dengan tambang di Manggarai. Penguasaan ini tidak hanya berhubungan dengan praktik tambang, melainkan keseluruhan proses penyusunan regulasi. Kekuatan negara dan korporasi melampaui posisi dan kepentingan MLT.⁷²

Regulasi dan operasi tambang bergerak tanpa kontrol lokal karena kekuatan MLT sudah dilumpuhkan dalam mekanisme yang dilakukan negara dan korporasi. Ironisnya, elemen-elemen lokal belum memiliki posisi tawar cukup kuat untuk mengawasi keseluruhan isu tambang di level lokal. Dengan begitu, selalu terbuka kemungkinan bagaimana korporasi dapat mengatur alur

⁷⁰ Salah satu studi yang merujuk hubungan dominasi negara dalam konteks hubungan negara dan masyarakat dapat dilihat pada kajian Migdal, Joel Samuel, Atul Kohli, and Vivienne Shue, eds. *State power and social forces: domination and transformation in the Third World*. Cambridge University Press, 1994.

⁷¹ Korporasi membangun dominasi atas masyarakat lokal dengan biaya besar melalui akumulasi pendapatan dan profit yang mereka terima dari investasi modal dalam bentuk eksploitasi SDA, Lihat Laporan Komisi Dunia mengenai lingkungan hidup dan pembangunan dalam *Our Common Future*. (1977). Oxford: Oxford University Press, pp. 49 – 52.

⁷² Pemerintah Provinsi NTT menyepakati MoU dengan sebuah perusahaan Korea Selatan senilai 650 miliar dalam pengelolaan Mangan, - Mangan untuk Kemakmuran Rakyat dalam *Pos Kupang edisi 21/4/2009*.

operasi dengan waktu yang singkat di satu pihak dan akumulasi keuntungan yang besar di pihak lainnya. Keadaan ini semakin menambah dominasi korporasi terhadap MLT.

Salah satu cara korporasi menunjukkan dominasi dengan menerapkan mekanisme kerja ‘represif,’ baik terhadap MLT maupun terhadap negara untuk kemudian rela menyediakan regulasi ‘bersahabat’ bagi korporasi. Proses eksploitasi sumber daya alam dijalankan dengan justifikasi tanpa batas, baik secara formal juridis maupun sosial. Korporasi dengan kekuatan dominan menerapkan pengawasan dan pengelolaan aset dengan target menguntungkan pihak korporasi. Dari studi lapangan ditemukan ‘indikasi’ kuat bahwa dominasi cenderung berkembang menjadi semacam ‘*sindik*’ kejahatan yang dilindungi sistem regulasi. Seperti terjadi di banyak tempat, ada pemaksaan kehendak yang melampaui kepentingan MLT.⁷³

Sebuah lembaga investasi di bidang pertambangan harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Proses kegiatan pertambangan biasanya dimulai dengan SKIP (Surat Kuasa Izin Pemantauan) yang disusul dengan izin kuasa pertambangan (KP) yang diberikan kepala daerah (Mineral Galian B dan C) dan/atau Menteri ESDM atas nama Presiden RI (untuk Mineral galian A). Izin KP, meliputi: KP penyelidikan umum, KP eksplorasi, dan KP eksploitasi.⁷⁴

Akan tetapi, dalam kasus tambang di Manggarai, ada indikasi kuat terjadinya ‘tumpang tindih’ prosedur perizinan, mekanisme, dan koordinasi antardinas pemerintah (negara), sebagaimana terlihat dalam beberapa hal berikut ini.⁷⁵ *Pertama,*

⁷³ Perbaikan pengawasan aset, sindikat kejahatan yang dilindungi, pemaksaan kehendak atas sistem kerja represif di areal komunitas lokal. John McBeth. (1989). *The Boss System,* in *Far Eastern Economic Review*, 14/9/1989, pp. 36 – 43.

⁷⁴ Lihat Undang-Undang Pertambangan No. 11 tahun 1967.

⁷⁵ Sejumlah NGO lokal melakukan studi dan advokasi lapangan dan menemukan ketidakjelasan pendasaran regulasi yang diberikan negara kepada korporasi. Hal ini

pemberian izin eksploitasi di hutan lindung. Wilayah Soga 1 dan 2 yang (sekarang ini sedang, 2008) dieksploitasi oleh PT Sumber Jaya Asia dengan investor dari China merupakan hutan lindung yang berada dalam RTK 103.⁷⁶ Namun, tampaknya pemerintah membiarkan begitu saja PT Sumber Jaya Asia merambah hutan dan menghancurkan bukit yang selama ini dilindungi. Kawasan perbukitan itu mengalami kehancuran karena pengambilan mineral mangan dengan menggunakan dinamit⁷⁷ yang mempunyai efek destruktif tanpa terlebih dahulu mendapat izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan.⁷⁸

Mekanisme dan koordinasi yang tidak jelas ini tentu saja menguntungkan perusahaan. Mereka seolah-olah tidak mau tahu apakah wilayah ini masuk dalam kawasan hutan lindung atau tidak. Bagi korporasi, menghitung hasil keuntungan dari usaha pengerukan Mangan adalah pusat perhatian mereka. Korporasi memang merasa resah ketika mengetahui bahwa Soga 1 dan 2 berada dalam kawasan hutan lindung. Tetapi, menariknya pihak perusahaan terkesan menghindar dan menyalahkan perusahaan sebelumnya yang sudah melakukan eksploitasi.⁷⁹

Kedua, ketidakmampuan Pemkab Manggarai untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pertambangan

terungkap dalam wawancara dengan Rony Marut, Koordinator LSM YBDM pada 27 April 2009 di Ruteng, Manggarai.

⁷⁶ Dalam Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 pasal 38 ayat 3, ditegaskan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan baru dilakukan setelah mendapat izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan.

⁷⁷ Wawancara I3, I11, I12, I14, I32, I8 (Maret – April 2009 di Reo, Manggarai) menyebutkan bahwa pembongkaran Mangan dengan menggunakan dinamit telah menimbulkan kehancuran pada bukit-bukit penganggang hujan.

⁷⁸ Lihat surat menyurat antara PT SJA, Pemkab Manggarai dan Departemen Kehutanan, SK Bupati Manggarai NTT hingga 2012 berdasarkan SK Bupati No: HK/287/2007, 5/10/2007 dari PT Tribina Sempurna kepada PT SJA, Surat Menteri Kehutanan RI, No:S.41/Menhut-VII/2009, 27 Januari 2009.

⁷⁹ PT SJA merupakan perusahaan tambang yang meneruskan operasi dari PT Indomineral dan PT ABM yang memindahkan lokasi pembongkaran di areal lain dengan jarak berdekatan dengan lokasi operasi sebelumnya.

juga terlihat ketika berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pengembangan masyarakat atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).⁸⁰ Menariknya, pemerintah sendiri sebenarnya sudah tahu bahwa perusahaan punya tanggung jawab dalam pengembangan masyarakat, hanya saja pemerintah terkesan mengikuti saja kemauan perusahaan. Dan yang lebih tragis lagi, untuk sebuah tindakan demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pemerintah terkesan membela perusahaan.

Persoalannya ialah perusahaan pertambangan ini bekerja di wilayah pemerintahan Kabupaten Manggarai. Ini berarti bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan memanggil perusahaan kalau perusahaan itu tidak melakukan persyaratan yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan pertambangan. Pemerintah mempunyai posisi tawar terhadap perusahaan ketika terjadi peralihan KP dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Perusahaan yang menambang di Bonewangka, misalnya: KP pertama kali dimiliki oleh PT Aneka Tambang, kemudian mengalihkannya ke PT Istindo Mitra Perdana. Selanjutnya, PT Istindo Mitra Perdana mengalihkannya lagi ke PT Sumber Jaya Asia yang melakukan eksploitasi di kawasan Bonewangka dan Soga 1 dan 2, Kecamatan Reok.⁸¹

Ketiga, ada indikasi bahwa pemerintah berpihak kepada perusahaan atau investor. Karena perusahaan menjawab obsesi Pemerintah bahwa potensi tambang harus dieksploitasi demi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran ini memperkuat anggapan bahwa pembangunan harus tertuju kepada kesejahteraan rakyat, sebagaimana tertuang dalam UUD

⁸⁰ Terungkap dalam Seminar Sehari tentang Kebijakan Pemkab Manggarai berkaitan dengan industri tambang. Kepala dinas pertambangan Kabupaten Manggarai, MN mengatakan bahwa pengembangan masyarakat itu tergantung pada kondisi sosial masyarakat di lokasi pertambangan, Ruteng 18 Desember 2008.

⁸¹ SK Bupati Manggarai NTT hingga 2012 berdasarkan SK Bupati No: HK/287/2007, 5/10/2007 dari PT Tribina Sempurna kepada PT SJA, Surat Bupati Manggarai, No: 711/Tamben/VIII/2008, 25/8/2008 perihal: penghentian sementara eksploitasi kepada PT Sumber Jaya Asia.

45, Pasal 33. Tetapi, tujuan pembangunan itu tidak akan tercapai ketika MLT yang seharusnya menjadi subyek pembangunan dijadikan sebagai obyek kepentingan korporasi.

Keberpihakan pada perusahaan juga terlihat dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada warga masyarakatnya. Aspek keadilan publik tidak dirasakan masyarakat kinkar tambang (komunitas lokal). Hal ini berkaitan dengan mekanisme pemberian dasar hukum investasi korporasi tambang. Pemerintah 'membiarkan' saja perusahaan tambang yang datang dan merusak hutan lindung dan kerusakan itu sulit dipulihkan ke keadaan aslinya. Masyarakat tidak bisa melakukan penolakan karena izin KP dianggap sebagai kebijakan 'dari atas' yang harus ditaati oleh masyarakat lokal.⁸²

Indikasi lain terkait keberpihakan pemerintah kepada perusahaan atau investor tambang adalah ditematkannya alat negara-polisi di lokasi industri tambang mangan untuk mengamankan aset perusahaan dari gangguan pihak luar (masyarakat). Paling tidak melalui izin penggunaan bahan peledak aparat negara sudah mendapatkan 'bagian' tertentu dari operasi tambang. Masyarakat selalu dianggap pengganggu aktivitas tambang. Di negara ini, sudah menjadi pengetahuan umum, di mana ada industri pertambangan beroperasi, di sana ditempatkan juga alat negara, baik polisi maupun tentara.⁸³

Keempat, ketiadaan kejelasan mekanisme dan koordinasi di level pemerintah lokal berdampak negatif kepada masyarakat di lokasi pertambangan. Indikasi nyata dari hal ini dapat ditemukan pada masyarakat berupa miskinnya pemahaman masyarakat tentang kehadiran pertambangan di wilayah mereka. Masyarakat mengaitkan perusahaan pertambangan dengan pemerintahan.

⁸² Wawancara: I1,I2,I3, I8,I9,I10, I28, I29 (Maret – April 2009 di Reo dan Ruteng, Manggarai).

⁸³ Ada indikasi keterlibatan kelompok militer dalam proses pembuatan kesepakatan MLT dalam kerangka menerima dan menyetujui kehadiran korporasi tambang.

Karena proses hanya terjadi antara pihak perusahaan dengan pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan satu hal penting yang diabaikan, yakni proses konsultasi publik yang harus dilakukan oleh Pemkab sebelum sebuah KP diterbitkan dan sebelum perusahaan melakukan aktivitas pertambangan. Masyarakat mengharapkan pemerintah muncul sebagai penguasa yang harus ditaati dan ditakuti karena mereka bekerja untuk kepentingan masyarakat.⁸⁴

Dominasi merupakan gambaran ketidakseimbangan hubungan antara korporasi, negara, dan komunitas lokal. Kepentingan komunitas lokal tidak menjadi bagian dari fokus perhatian korporasi dan negara. Korporasi tambang bisa tetap menjalankan operasi (rencana operasi) meskipun ada banyak penolakan yang muncul dari masyarakat setempat.⁸⁵

Tabel 5. Dominasi Korporasi dan Negara

Deskripsi	Aspek	Bentuk	Dampak	Catatan
Kekuatan monolitik yang terbentuk dari konsolidasi negara dan korporasi	-Regulasi -Operasi	-SK Pemkab (izin KP) tanpa memerhatikan aspek lokal (MLT) -Operasi (praktik) tambang tanpa memperhitungkan keberadaan MLT	Dominasi menyebabkan semakin melemahnya posisi MLT dalam dinamika hubungan dengan negara dan korporasi	Regulasi yang diberikan negara kepada korporasi dan operasi tambang yang dijalankan korporasi berlangsung tanpa kontrol MLT

⁸⁴ Wawancara dengan DS terungkap dalam penyampaianya "Kami tidak bisa buat apa-apa karena pemerintah bilang, mereka dapat izin langsung dari Jakarta. Mereka punya uang dan kita tidak bisa buat apa-apa dengan mereka yang punya uang. Mereka bilang sekarang mereka di Bonewangka, setelah Bonewangka habis, orang naik yang digusur sekarang Soga", (20/4/2009).

⁸⁵ Terungkap dalam wawancara dengan RM (NGO) dan I8,I9,I10 (27 April 2009).

Dominasi korporasi (Tabel 5) mengakibatkan munculnya beragam masalah dan efek destruktif operasi tambang. Pelaksanaan operasi PT SJA dan PT ABM bisa membekukan kebijakan regulatif negara. Gambaran dominasi ini tidak memberikan ruang kontrol publik yang kuat. Korporasi menentukan volume kegiatan dan tingkatan risiko, serta besarnya areal operasi tanpa memerhitungkan kondisi MLT.

2. Marginalisasi

Marginalisasi koheren dengan dominasi (negara dan korporasi). Marginalisasi memiliki alur dan gerak searah dengan dominasi. Dominasi yang dilakukan negara dan korporasi menciptakan pola marginalisasi terhadap komunitas lokal. Ada kondisi yang menyebutkan bahwa marginalisasi menyebabkan penerimaan sosial terhadap korporasi dengan dukungan regulasi dari negara. Marginalisasi dilakukan korporasi dan negara agar dominasi keduanya semakin kuat.⁸⁶

Dalam kerangka hubungan ketiga elemen ini, marginalisasi menimbulkan 'ketimpangan' hubungan antaraktor. Ketidakseimbangan ini menjadi basis terjadinya ketidakadilan terhadap komunitas lokal. Sementara, ketidakadilan harus tetap dilakukan agar komunitas lokal yang mengalami proses marginalisasi tidak mampu membangun kekuatan yang sifatnya setara seperti yang dimiliki korporasi dan negara. Marginalisasi berkaitan dengan aspek-aspek vital keberadaan komunitas lokal. Dari studi lapangan yang dilakukan penulis dalam kasus tambang di Manggarai dapat disimpulkan bahwa marginalisasi⁸⁷ merupakan bagian dari

⁸⁶ Salah satu studi yang baik tentang marginalisasi dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya bisa dilihat dalam kajian Elias Courson. (2011), "MEND: political marginalization, repression, and petro-insurgency in the Niger delta." *African Security* 4, no. 1: 20-43.

⁸⁷ Marginalisasi mendeskripsikan kenyataan penyingkiran MLT (MLT) (komunitas lokal) terhadap kebijakan negara dan operasi korporasi berhubungan dengan tambang di Manggarai. Peminggiran ini berkaitan dengan multi-aspek kehidupan MLT bukan saja aspek ekologis melainkan juga aspek-aspek lain seperti sosial, budaya dan poli-

keberadaan MLT berkaitan dengan posisinya terhadap korporasi dan negara. Korporasi dan negara melakukan proses marginalisasi terhadap MLT.

Masyarakat mengaitkan perusahaan pertambangan dengan pemerintahan. Karena proses hanya terjadi antara pihak perusahaan dengan pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan satu hal penting yang diabaikan, yakni proses konsultasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah.⁸⁸

Dua kekuatan ini menempuh beragam cara untuk memperkuat marginalisasi terhadap MLT.

Penulis menemukan bahwa bentuk marginalisasi paling awal yang dilakukan negara dan korporasi adalah menutup dan memutuskan akses masyarakat lokal ke dalam rangkaian informasi tentang tambang. Pemutusan akses informasi ini dilakukan negara dan korporasi agar MLT tidak memiliki posisi tawar yang kuat ketika berhadapan dengan dua kekuatan ini. Padahal, posisi tawar dapat dibangun MLT saat mereka memiliki informasi yang benar tentang tambang.⁸⁹

Kondisi demikian menyebabkan MLT tidak mampu mengukur 'layak' atau 'tidak layak' operasi tambang dilakukan di Manggarai. Ketiadaan akses informasi ini menjadi salah satu variabel penting yang dapat menggambarkan ketidakadilan terhadap MLT akibat proses marginalisasi yang terjadi. Marginalisasi yang dilakukan dua elemen ini menjadikan tambang sebagai urusan eksklusif negara dan korporasi.⁹⁰

tik.

⁸⁸ Pandangan ini bisa dilihat dalam naskah Kertas Posisi yang dikeluarkan JPIC OFM Jakarta. <http://jpicofmindonesia.blogspot.nl/2010/01/kertas-posisi-mencegah-tanah-manggarai.html/>, diunduh pada 29 Oktober 2017.

⁸⁹ Persoalan ini dapat juga dilihat dalam investigasi lengkap dan panjang dari Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Ordo Fransiskan, Jakarta: <http://jpicofmindonesia.blogspot.nl/2010/01/kertas-posisi-mencegah-tanah-manggarai.html/>, diunduh pada 17 Januari 2018.

⁹⁰ MLT menekankan bahwa masyarakat lokal di sekitar areal operasi tambang harus

Berkaitan dengan operasi tambang PT SJA dan PT ABM di Manggarai, berkembang gejala yang cukup kuat bahwa korporasi dan negara sengaja ‘menyembunyikan’ informasi tentang tambang. MLT tidak pernah mendapatkan informasi secara lengkap menyangkut keseluruhan operasi dua perusahaan tambang ini. Praktik tambang yang dilakukan dua korporasi ini menjadi sebuah aktivitas ‘misterius’ untuk MLT.⁹¹

Berkaitan dengan regulasi atau izin KP kepada dua korporasi tambang ini, MLT tidak pernah memiliki pengetahuan pasti tentang jadwal operasi. Bahkan, MLT menganggap kehadiran dua korporasi ini dalam dua dekade terakhir sebagai hal yang biasa. Marginalisasi sistematis yang dilakukan korporasi dan negara menyebabkan hilangnya kesadaran MLT tentang operasi tambang yang ada. Dominasi yang dimiliki PT SJA dan negara memperkuat ‘ketidakberdayaan’ MLT untuk mendapatkan penjelasan yang benar tentang praktik tambang ini.⁹² Komisi JPIC SVD⁹³, JPIC OFM,⁹⁴ dan JPIC Keuskupan Ruteng⁹⁵ dalam kaitannya dengan persoalan ini menegaskan adanya persoalan-

menjadi syarat mutlak kebijakan negara berkaitan dengan tambang. Aspirasi-aspirasi lokal ini menjadi bagian dari wacana yang berkembang di tingkat lokal, lihat *Flores Pos*, 3/7/2007.

⁹¹ Wawancara: I1, I2, I3, I8, I9, I10, I18, I20 (Maret–April 2009 di Reo dan Ruteng, Manggarai).

⁹² Hasil wawancara dengan I1, I6, I8, I12, dan I15. Bahkan sebagian besar narasumber dan pemberitaan lokal menyebutkan persoalan yang mirip.

⁹³ SVD atau singkatan dari Societas Verbi Divini (serikat Sabda Allah) merupakan salah satu Tarekat Religius dalam Gereja yang sudah berusia tiga abad. Serikat ini bersifat internasional dan berkarya multiaspek. Keutuhan lingkungan hidup dan kelestarian ekologi merupakan salah satu perhatian tarekat religius ini.

⁹⁴ OFM (Serikat Para Miskin) merupakan salah satu Tarekat Religius dalam Gereja yang sudah berusia enam abad. Serikat religius ini bersifat internasional. Keutuhan ciptaan merupakan salah satu perhatian utama Kongregasi OFM.

⁹⁵ Gereja Keuskupan adalah Gereja setempat yang dipimpin seorang Uskup. Gereja lokal Keuskupan tidak ditentukan atau tidak berhubungan dengan distrik administrasi pemerintahan. Gereja Lokal keuskupan Ruteng mencakup tiga kabupaten yaitu Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Gereja lokal Keuskupan Ruteng memiliki perhatian utama pada keberlangsungan kehidupan baik manusia maupun ekologi.

persoalan penting berkaitan dengan keseluruhan konteks tambang di Manggarai.

Selain informasi yang berkaitan dengan regulasi atas praktik tambang yang tidak dimiliki MLT, aspek penting lain yang tidak diketahui MLT adalah substansi operasi tambang. Pola, mekanisme, volume dan areal operasi PT SJA dan PT ABM dibuat untuk tidak diketahui MLT. Bahkan, ada gejala cukup kuat yang menegaskan praktik ‘manipulasi’ keabsahan operasi yang dilakukan korporasi terhadap MLT. Manipulasi ini menyebabkan MLT menerima praktik tambang tanpa pertimbangan kritis.⁹⁶

Penulis menemukan kenyataan di lapangan bahwa untuk memperkuat proses marginalisasi, korporasi mengangkat ‘orang lokal’ untuk menempati posisi penting dalam manajemen perusahaan. Biasanya, ‘orang lokal’ ini memiliki beberapa prasyarat yang dianggap korporasi tepat untuk ‘dimanfaatkan’ sebagai representasi korporasi dalam hubungannya dengan MLT. ‘Orang lokal’ ini memiliki kewibawaan sosial, jaringan keluarga, dan pengaruh yang besar dalam MLT.⁹⁷ Korporasi mengganggu cara semacam ini tepat untuk memperkuat kedudukan sekaligus dan pengaruh korporasi di sekitar MLT. Orang lokal ini dipergunakan korporasi untuk menghadapi berbagai macam kebutuhan yang berkaitan dengan MLT. ‘Orang lokal’ ini sekaligus menjadi peredam resistensi lokal terhadap praktik tambang.⁹⁸

⁹⁶ Sirise adalah satu bagian dari MLT di sekitar areal operasi PT ABM. Selama belasan tahun terakhir Sirise mengalami berbagai macam bentuk degradasi berkaitan dengan kehidupan mereka. MLT di Sirise tidak mengetahui dengan pasti dan jelas operasi tambang PT ABM. Dampak paling besar adalah kerusakan lingkungan yang menyebabkan kehancuran kelangsungan hidup mereka sebagai petani. Lihat laporan Flores Pos yang dibuat Siti Maemunah dari JATAM dengan judul—Kisah Pilu dari Sirise, *Flores Pos*, 10/8/2006.

⁹⁷ Orang lokal direkrut korporasi untuk menduduki posisi penting dalam manajemen perusahaan. Korporasi ‘memanfaatkan’ orang lokal untuk meredam resistensi lokal terhadap operasi tambang.

⁹⁸ Wawancara 15, 16, 18 (Maret–April 2009 di Reo dan Ruteng, Manggarai) sebuah pengesahan bahwa tokoh lokal yang direkrut korporasi memiliki peran penting untuk

Elemen-elemen penting dari MLT seperti tokoh adat dan kepala lingkungan menganggap ‘orang lokal’ yang diangkat korporasi dalam manajemen perusahaan telah menukar ‘kedaulatan lokal’ dengan posisi dan jaminan besar yang diterimanya dari perusahaan. Bahkan, ‘orang lokal’ ini sering kali melakukan ‘distorsi informasi’ dua arah timbal balik antara korporasi dan MLT. Posisi dan peran yang dijalankan ‘orang lokal’ dalam perusahaan ini mengaburkan banyak persoalan penting berkaitan operasi tambang dan hak-hak yang harus diperoleh MLT.⁹⁹

Marginalisasi dialami MLT dalam kaitannya dengan regulasi yang diberikan negara kepada korporasi.¹⁰⁰ MLT tidak pernah menjadi bagian penting yang dipertimbangkan negara dalam proses penentuan kebijakan dalam bidang pertambangan dan secara spesifik dalam konteks penerbitan izin KP. Izin operasi tambang PT SJA, PT ABM, dan beberapa izin KP sesudahnya diberikan tanpa memperhitungkan posisi MLT yang memiliki hak ulayat atas kawasan dan menghadapi dampak langsung operasi tambang. Negara mengabaikan kesatuan hidup MLT dengan kawasan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Negara melepaskan posisi MLT dari keseluruhan proses penyusunan kebijakan daerah dalam bidang investasi pertambangan.

memperkuat kedudukan korporasi. Tokoh lokal ini dianggap mampu melakukan pendekatan dan lobi terhadap MLT. Ini dianggap menjadi bagian dari proses marginalisasi MLT.

⁹⁹ Penulis menemukan kenyataan bahwa orang lokal yang direkrut korporasi seringkali melakukan distorsi informasi dua arah, antara korporasi dan MLT. Namun, lebih sering orang lokal ini bekerja untuk kepentingan korporasi. Wawancara: I1 (20/4/2009).

¹⁰⁰ Dalam UU Minerba 2009, aspek daerah dalam hal ini berkaitan dengan posisi dan kedudukan MLT merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan dalam memberikan izin KP kepada korporasi tambang.

Tabel 6. Marginalisasi MLT

Deskripsi	Aspek-aspek	Bentuk	Dampak	Catatan
MLT (Komunitas lokal dikeluarkan dari keseluruhan konteks industri tambang)	1) Juridis (Izin KP) 2) Operasi 3) Dampak	1) Hegemoni Pemkab 2) Areal tidak diketahui MLT, Distorsi informasi bagi MLTT 3) Perekrutan 'tokoh lokal' dalam manajemen korporasi 3) Polusi udara, air, dan rusaknya ekosistem untuk nafkah	1) Operasi tanpa kontrol MLT 2) Tambang tidak transparan untuk MLT 3) Kerentanan multiaspek yang dialami MLT (ekonomi, budaya, ekologi, sanitasi)	Marginalisasi dijalankan secara sistematis melalui operasi korporasi dengan dukungan basis juridis-formal yang tidak menempatkan aspek 'lokal' sebagai salah satu pertimbangan penting dalam kebijakan negara.

Marginalisasi (Tabel 6) yang dilakukan korporasi dan negara terhadap MLT ini terutama berkaitan dengan mekanisme regulasi dan pola operasi, serta dampak-dampak destruktif yang dialami MLT. Kebijakan negara dalam bidang pertambangan, khususnya operasi tambang PT SJA dan PT ABM tidak mempertimbangkan posisi MLT.¹⁰¹ Marginalisasi ini mengakibatkan semakin mengecilnya hubungan antara MLT dengan keseluruhan tata kehidupan (ekologi). MLT tidak dapat menjangkau aspek keadilan terhadap operasi tambang dan regulasi yang diberikan negara.

¹⁰¹ Persoalan operasi tambang hanya menjadi bagian dari komunikasi dua arah antara Pemkab dan korporasi tanpa menunjukkan keterlibatan MLT secara signifikan. Surat-surat resmi antara dua kekuatan ini secara eksplisit menunjukkan marginalitas MLT terhadap seluruh persoalan tambang di Manggarai.

Marginalisasi yang dialami MLT dapat digambarkan dalam kondisi keadaan di mana MLT kehilangan kawasan, tanah, dan lahan pertanian untuk mendukung keberlangsungan hidup. Marginalisasi menyebabkan MLT kehilangan kontak dengan basis kehidupan.¹⁰²

3. Degradasi Ekologis¹⁰³

Pembangunan dan lingkungan merupakan dua entitas penting yang telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir ini.¹⁰⁴ Saat ini, bagaimana menyusun politik dan praktik pembangunan yang tidak menghancurkan ekologi menjadi bagian dari usaha dunia. Ada satu masalah yang selalu muncul bahwa lingkungan hidup dengan sumber daya yang ada di dalamnya telah dijadikan modal utama pembangunan. Praktik pembangunan semacam ini telah menumbuhkan sikap, seruan, dan gerakan sosial untuk melakukan transformasi politik pembangunan sehingga memberikan perhatian pada aspek keberlangsungan ekologi.¹⁰⁵

Studi yang dilakukan penulis menemukan adanya hubungan antara politik pembangunan dan investasi dalam bidang pertambangan. Pembangunan di tingkat lokal Manggarai diterjemahkan dalam kebijakan pertambangan. Dengan demikian, argumentasi yang menyebutkan isu keberlangsungan ekologi

¹⁰² MLT akan membentuk identitasnya sebagai pengungsi lingkungan hidup akibat pola eksploitasi tanpa batas atas SDA yang pada akhirnya menghilangkan basis dan lingkungan kehidupan masyarakat lokal. Lihat, Jodi L. Jacobson. (1988). *Environmental Refugees: A Yardstick of Habitability*, *Worldwatch Paper 86*, p. 6.

¹⁰³ Kenneth E. Boulding. (1968). "The Economics of The Coming Spaceship Earth," dalam Henry Jarret (ed.), *Environmental Quality in A Growing Economy*. Baltimore: MD: The Johns Hopkins University Press, pp. 3-14.

¹⁰⁴ David Pearce, Edward Barbier, & Anil Markandya. (2013). *Sustainable development: economics and environment in the Third World*. Routledge.

¹⁰⁵ Pembangunan dengan pola pertumbuhan merupakan pendekatan konvensional yang telah menyebabkan berkurangnya kemampuan ekonomi-ekologi global beberapa dekade terakhir ini. Lihat, James Robertson. (1990). *Future Wealth: A New Economics for The 21th Century*. London: Cassel Publishers Limited.

sebagai persoalan penting dalam kaitannya dengan politik pembangunan menjadi hal penting untuk dianalisis lebih lanjut.¹⁰⁶ Selama ini, degradasi ekologi sudah menjadi bagian utama persoalan tambang di Manggarai. Kerusakan permanen lingkungan terjadi di sekitar kawasan operasi tambang PT SJA dan PT ABM.¹⁰⁷ WALHI juga menyoroti persoalan ini sebagai berikut: Memulihkan kembali lahan-lahan yang rusak akibat pengerukan yang meninggalkan lubang-lubang besar yang menganga di NTT.¹⁰⁸

Kerusakan ini berkaitan dengan tanah, ekosistem hutan, tercemarnya air, hilangnya sumber mata air, rusaknya ekosistem laut di sekitar lokasi tambang, efek penggunaan bahan-bahan peledak yang dipakai, belum lagi bencana yang akan menyusul, seperti: banjir, longsor, kemarau panjang, dan kebakaran hutan.¹⁰⁹ Sejak lama operasi tambang PT SJA dan PT ABM menimbulkan kerusakan hutan. Proses pembongkaran tanah menyebabkan kehancuran di areal operasi dengan dampak-dampak yang mengerikan. Degradasi lingkungan yang terjadi di kawasan operasi PT Arumbai juga menyebabkan turunnya debit air minum dari warga masyarakat sekitarnya. Penurunan derajat lingkungan tampak dari berkurangnya air dari sumber mata air yang biasanya menjadi tempat bagi MLT mengambil air untuk keperluan mereka setiap hari.¹¹⁰

¹⁰⁶ Lihat analisis dari Wardhani, Indah Surya (2015). Jalan Panjang Mengamankan Torong Besi. <http://regina.polgov.fisipol.ugm.ac.id/id/blog/jalan-panjang-mengamankan-torong-besi/>, diunduh pada 11 Oktober 2017.

¹⁰⁷ Observasi lapangan yang dilakukan penulis pada bulan Maret dan April menunjukkan kehancuran lingkungan yang terus meluas. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas kualitas kawasan hutan, tanah dan lahan pertanian MLT.

¹⁰⁸ Dikutip dari Pernyataan Tolak Tambang yang digagas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada 7 November 2011. Informasi lengkap tentang pernyataan ini dapat dilihat di link ini <https://walhint.wordpress.com/2011/12/08/pernyataan-tolak-tambang-di-ntt-2/>, diunduh pada 29 Oktober 2017.

¹⁰⁹ Wawancara 11, I2, I12, I15, I32 (Maret – April, Reo dan Ruteng Manggarai).

¹¹⁰ ME, seorang guru SD di Satar Teu (28/3/2009) mengungkapkan bahwa debit mata air di Satar Teu di dekat areal operasi PT ABM semakin menurun dalam tiga tahun

Selain berkurangnya debit air minum bagi MLT, operasi tambang mangan di kawasan ini juga mengancam sanitasi air yang dibutuhkan MLT. Keadaan ini memperbesar rasa keterancaman MLT. Kerusakan terjadi sebagai akibat operasi tambang terbuka (*open pit*) dengan pola membongkar pohon dan tanah untuk mengambil mangan yang ada di dalamnya. Pola ini menimbulkan sejumlah lubang besar tanpa penutup.¹¹¹

Dari kenyataan yang ada di lokasi pertambangan, kerusakan tanah tampak melalui lubang-lubang bekas galian yang dibiarkan menganga begitu saja setelah perusahaan menyelesaikan operasinya. Proses reklamasi yang disepakati oleh perusahaan tidak ditepati. Walaupun direklamasi, dari segi guna tanah lokasi-lokasi bekas pertambangan tidak layak untuk aktivitas pertanian.

Inilah yang terjadi dengan masyarakat desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, semenjak kehadiran PT ABM beroperasi di wilayah itu. Tanah *Lingko* (ulayat) masyarakat yang dahulu menjadi tempat bergantungnya hidup dengan tanaman perkebunan rakyat, kini menyisakan lubang-lubang yang menganga lebar, dan meyerupai danau karena digenangi lumpur hitam serta air ketika musim hujan. Hal ini tentu berisiko banjir dan longsor yang akan menimbulkan bencana yang tentu tidak sedikit untuk masyarakat sekitar lokasi pertambangan.

Itu bencana pertama yang dialami warga sekitar. Sudah hampir 30 tahun perusahaan itu beroperasi di Torong Besi. Berapa kekayaan mangan dari perut bumi Torong Besi dikirim ke Jawa? Kalau dalam sepekan saja mereka mengirim 100 ton mangan maka praktis saja sisa galian berupa tanah berlubang-lubang menganga di tempat itu tanpa ada perhatian.¹¹²

terakhir. Ia menyebutkan bahwa sumber mata air akan hilang jika PT ABM terus menjalankan operasi lima tahun ke depan.

¹¹¹ Wawancara I1, I2, I12, I15. I32.

¹¹² Kutipan ini diambil dari laporan HU Pos Kupang dengan judul "Pikir Ulang Izin Tambang" yang dimuat pada edisi Kamis, 27 Juli 2010. Link. <http://kupang.tribunnews.com/2010/07/29/pikir-ulang-izin-tambang/>, diunduh pada 29 Oktober 2017.

Tanah-tanah pertanian perkampungan sekitar, seperti Luwuk dan Lengko Lolok, tercemar akibat limbah tambang yang mengenai tanah, lokasi pertanian, dan sumber air. Curah hujan yang sangat rendah di kawasan ini sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat lingkaran tambang. Keadaan ini bertambah parah sesudah korporasi tambang mulai beroperasi dalam kurun waktu dua dekade terakhir. MLT merasakan dampak langsung penurunan kualitas lingkungan ini. Hancurnya kawasan hutan Torong Besi sebagai akibat operasi PT SJA beberapa tahun diduga menyebabkan kurangnya curah hujan di kawasan ini.¹¹³

Hal ini disebabkan karena kawasan hutan Torong Besi merupakan daerah tangkapan hujan bagi warga masyarakat di sekitar tambang. Semakin berkurangnya curah hujan jelas memunculkan banyak efek lain bagi masyarakat yang semuanya hidup dalam alam budaya pertanian. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi warga komunitas lokal untuk menjalankan aktivitas pertanian sebagai bagian dari kehidupan mereka. Musim tanam tidak pernah tetap dan jelas karena curah hujan yang tidak pernah menentu, bahkan hilang sama sekali.¹¹⁴

Selain dampak pencemaran atas tanah dan berkurangnya curah hujan, operasi tambang di Manggarai juga menyebabkan rusaknya kondisi dan ekosistem hutan. Hutan menutupi hampir 39,80 % (sebelum pemekaran Manggarai Timur) kawasan Kabupaten Manggarai. Dari 39,80 % itu, 30,2 % merupakan kawasan hutan lindung, 1 % untuk kawasan hutan cagar alam, dan 23,7 % untuk taman nasional (Walhi, 2003:10-11)¹¹⁵.

¹¹³ Kerusakan di sekitar PT SJA dan PT ABM menjadi lebih nyata terutama berkaitan dengan keberadaan kawasan hutan tangkapan hujan yang telah berubah menjadi areal operasi tambang.

¹¹⁴ Sebagian dari informasi ini dapat dilihat dalam laporan ini: <https://www.library.ohio.edu/indopubs/2001/10/25/0013.html/>, diunduh pada 12 Oktober 2017.

¹¹⁵ John M. Prior, *The Church and Land Disputes: Sobering Thoughts from Flores (Manuscript)*, Maumere: tanpa tahun. Hlm. 12.

Akan tetapi, yang menyedihkan, lokasi pertambangan di Kabupaten Manggarai persis menempati salah satu lokasi kawasan hutan lindung, yang tentu menjadi ancaman ekologis sangat serius. Lokasi pertambangan di Soga 1 dan 2, daerah Torong Besi, Kecamatan Reok yang dieksploitasi oleh PT SJA melakukan kegiatan pertambangan persis di kawasan hutan lindung dalam RTK 103. Masuknya pertambangan, pertamanya terjadi alih fungsi hutan secara besar-besaran.

Kawasan hutan lindung di sana, yang berfungsi sebagai penyangga dan penyeimbang kehidupan, terjaganya keanekaragaman hayati (*biodiversity*), penyeimbang iklim dan pendukung perkonomian masyarakat sekitar, tinggal kenangan yang tak akan pernah kembali lagi, semenjak industri “keruk” pertambangan masuk ke sana. Selain itu, limbah industri tambang, seperti yang ada di Bonewangka (PT SJA), daerah Torong Besi, Kecamatan Reok, sudah mencapai pemukiman penduduk dan laut. Risiko longsor ketika musim hujan dapat merusak dan mengancam pemukiman penduduk.¹¹⁶

Dampak ekologis lanjutan dari industri pertambangan di daerah ini juga menyangkut rusak dan terganggunya ekosistem laut. Beberapa lokasi pertambangan yang ada, yang dieksploitasi oleh PT ABM dan PT SJA berada sangat dekat dengan laut, dan tentu saja limbahnya dibuang ke laut. Hal yang jelas menyangkut ini terjadi di sekitar lokasi pertambangan Torong Besi, Desa Robek, Kecamatan Reok, dan Satar Punda, Kecamatan Lambaleda. Di desa Robek ini terdapat satu lokasi pantai pasir putih yang menjadi pusat obyek wisata bahari, yaitu pantai Ketebe.¹¹⁷

Selain itu, di areal operasi PT ABM, terjadi polusi udara yang tinggi. Debu mangan dan guncangan akibat peledakan

¹¹⁶ Wawancara I1, I2, I3, I10 (Maret – April 2009).

¹¹⁷ Keputusan Bupati Manggarai No. 4 Tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Obyek Wisata di Kabupaten Manggarai.

yang dilakukan korporasi menjadi ciri dari kerusakan ekologi di kawasan ini. Debu mangan merembes masuk ke rumah-rumah warga dan mereka tidak bisa menghindar dari kenyataan ini serta tidak bisa melakukan relokasi tempat tinggal sebab mereka sudah lama kehilangan hak atas tanah yang sudah diambil korporasi.¹¹⁸

Tabel 7. Degradasi Ekologis

Deskripsi	Bentuk	Dampak	Catatan
1) Penurunan Derajat Ekologis akibat pola dan mekanisme operasi tambang yang dilakukan korporasi	1) Menurunnya debit air minum 2) Rusaknya hutan tangkapan hujan 3) Rusaknya pantai untuk sumber penghidupan	1) Terancamnya keberlangsungan hidup MLT (ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain)	Degradasi ¹ lingkungan merupakan isu paling penting dalam konteks resistensi MLT terhadap operasi PT SJA dan PT ABM di Manggarai, maupun kehadiran korporasi-korporasi baru
2) Pembunuhan ekologi, kerusakan total lingkungan hidup			

Tabel 7 menunjukkan dampak kerusakan lingkungan dari operasi tambang di kawasan ini yang dilakukan PT SJA dan PT ABM. Operasi tambang ini memperkuat terjadinya *'ecocide'* dalam kawasan MLT¹¹⁹. Operasi tambang sama artinya dengan proses penghancuran lingkungan hidup dan pembunuhan lingkungan hidup secara tidak terbatas. Tahap-tahap operasi yang dilakukan

¹¹⁸ Lihat Laporan Siti Maemunah (JATAM), Kisah Pilu dari Sirise, FP, 10/8/2006.

¹¹⁹ Ecocide berhubungan dengan operasi tambang sebagai proses penghancuran lingkungan hidup, pembunuhan lingkungan hidup secara tidak terbatas. Konsep ini diperkenalkan oleh P. Blaikie.(1985). *The Political Economy of Soil Erosion in Developing Caountries*, Longman: London, p. 138.

KP Mangan di kawasan ini menciptakan degradasi ekologi dengan dampak-dampak langsung yang merugikan MLT.

4. Degradasi Sosial-Budaya

Sumber daya alam (SDA) bukan elemen tunggal yang terpisah dari konteks sosial-budaya MLT.¹²⁰ Sumber daya alam berada dalam keseluruhan konteks kehidupan masyarakat lokal. Di sini, SDA harus dipandang dan diperlakukan dalam perspektif sosial, politik, dan budaya komunitas lokal.¹²¹ Pembangunan dengan basis pengelolaan sumber daya alam tanpa batas dalam pengertian eksploitasi masif terhadap sumber daya alam justru menimbulkan persoalan sosial budaya. Hal ini berkaitan dengan keberlangsungan tata sosial budaya masyarakat lokal. Pengelolaan sumber daya alam tanpa batas cenderung menghancurkan aspek sosial budaya komunitas lokal. Dua persoalan ini memiliki korelasi kuat.¹²²

MLT pada khususnya dan masyarakat lokal pada umumnya merupakan entitas (komunitas) dengan tata sosial budaya yang mempresentasikan hubungan era tantara mausia dan alam (ekologi). Nilai-nilai sosial budaya menentukan keberlangsungan hidup MLT. Selain itu, tata nilai sosial budaya sesungguhnya menggambarkan inti hubungan antara manusia dengan alam di sekitarnya. Nilai-nilai sosial budaya yang menentukan kehidupan

¹²⁰ Komnas HAM mengulas secara relatif lengkap soal perspektif sosial budaya dari pengelolaan SDA, lihat Komnas HAM. (2006). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM (Tinjauan Teori dan Prinsip-prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia)*.

¹²¹ Beberapa dekade terakhir dunia menyadari satu kekeliruan besar dan amat berbahaya ketika memperlakukan SDA sekadar sebagai modal ekonomi tanpa memperhitungkan aspek-aspek sosial dan budaya yang melekat dalam 'pengertian' SDA. Lihat, Kenneth E. Boulding. (1968). "The Economics of The Coming Spaceship Earth", hlm. 3-14.

¹²² Dalam arti tertentu SDA mengandung 'kontradiksi' ekologi. Lihat, David Pearce, Anil Markandya dan Edward B. Barbier, (1989). *Blueprint for A Green Economy*, London: Earthscan Publication, Ltd. Hal. 10-11 (15). Lihat juga Robert Constanza, (1989). "What is Ecological Economics in Ecological Economics, Vol. I No. 1, hlm 1

MLT ditentukan dengan bagaimana mereka menjaga hubungan dengan alam kehidupan.¹²³

Pengelolaan sumber daya alam dengan memerhatikan hak sosial budaya masyarakat merupakan satu persoalan penting dalam konteks tambang. Perwujudan hak-hak sosial budaya menjadi satu hal penting yang dapat dijadikan ‘standar’ untuk mengevaluasi dan menganalisis keberadaan korporasi tambang. Masyarakat Manggarai memiliki pemahaman yang khas tentang dirinya dan alam. Pemahaman sosial budaya ini secara substansial memiliki karakter ekologis.¹²⁴

Keutuhan dan kesempurnaan hidup orang Manggarai ada dalam apa yang bisa disebut dengan ‘harmoni kosmik’ (*a cosmic harmony*).¹²⁵ Religiositas orang Manggarai bertumpu dan bersumber pada visi diri dan lingkungan yang amat kosmik dan ekologis. Orang Manggarai akan kehilangan identitas kultural religius ketika mengalami kerusakan tatanan kosmik. Orang Manggarai akan kehilangan kearifan hidup kalau kehilangan alamnya.

Orang Manggarai, menyangkut alam kebersamaan, senantiasa melihat dirinya dalam hubungan dengan orang lain.¹²⁶

-7.

¹²³ Terungkap dalam wawancara dengan mantan karyawan lokal PT ABM AL seorang tokoh muslim di Kecamatan Reo (26/3/2009).

¹²⁴ Ada kesatuan antara kehidupan masyarakat dengan tanah dan seluruh kosmos, sebagaimana terungkap dalam (*ungkapan kiasan go'ët*): “*Gendang'n oné, lingko'n pé'ang; waé téku, compang dari; tana'n wa, awang'n éta; jéngok lé ulung, wiko lau wa'i; par awo, kolep salé* (Rumah adat dan kebun adat, sumber air dan altar korban, bumi dan langit, hulu dan hilir, terbit dan terbenamnya matahari)”. Wawancara dengan KA seorang tokoh budaya Manggarai (27 April 2009).

¹²⁵ Ulasan tentang harmoni kosmik (*cosmic harmony*) dapat dilihat dalam ulasan berikut: <http://www.edwardgoldsmith.org/798/the-way-to-cosmic-harmony/>, diunduh pada tanggal 17 Oktober 2017.

¹²⁶ Hal ini terungkap dalam ungkapan kiasan seperti ini: “*muku ca pu'u néka woléng curup, téu ca ambo néka woléng jangkong, ema agu anak néka woléng bantang, asé agu ka'é néka woléng taé.*” (Pisang sephon jangan lain omong, tebu satu rumpun, jangan lain tutur; ayah dan anak jangan lain sepakat; kakak dan adik jangan lain kata.” Wawancara: 130.

Pembentukan kampung juga menyangkut cara berpikir ‘sosial-kolektif’. Kampung tradisional di Manggarai umumnya berbentuk lingkaran, di mana terdapat sebuah *Mbaru gendang/ Mbaru tembong* (rumah adat kolektif), sebuah *Natas* (halaman kampung), sebuah *Pa’ang* (gerbang kampung), dan sebuah *Compang* (altar korban). Selain itu, kearifan orang Manggarai menyangkut juga harmonisasi antara *Manusia – Alam – Dunia Adikodrati*.

Hal itu tampak dalam beberapa acara adat, seperti *Penti* (perayaan syukur pasca-panen), yang melibatkan seluruh warga kampung dan bersama-sama mengantar sesajen kepada roh-roh pelindung kampung, roh-roh nenek moyang yang secara bersama dilakukan di *Mbaru Gendang* (rumah adat kolektif). Harmonisasi ini akan punah mengingat pertambangan sedikit demi sedikit mengeruk dan menggusur tanah-tanah, yang oleh orang Manggarai tidak hanya dipahami dari aspek ekonomi sebagai penyedia kebutuhan manusia, melainkan sebagai warisan leluhur. Tanah dalam kosmologi Manggarai adalah simbol kehidupan dan identitas manusia Manggarai. Hilangnya tanah (*lingko*) akibat operasi tambang berarti hilangnya identitas dan dasar berada orang Manggarai.¹²⁷

Dengan demikian, soal-soal kultural dan pergeseran identitas juga menjadi aspek-aspek dan isu-isu menonjol dalam konteks tambang di Manggarai. Beberapa hal yang menjadi soal dalam lingkup sosial budaya, antara lain rentannya ‘konflik horizontal’ di antara masyarakat, maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah (negara), dan juga kemungkinan konflik antara masyarakat lokasi tambang dengan pihak perusahaan, juga antara pihak perusahaan dengan karyawan.¹²⁸

¹²⁷ Eman Embu & Robert Mirsel (ed.). *Gugat: Darah Petani Kopi Manggarai*, Ledalero: Flores, 2004. hlm. 25-26.

¹²⁸ Laporan tentang konflik antara buruh tambang dengan para mandor asing yang bekerja di lokasi tambang, Wawancara: I1, I8, I10.

Soal lain yang krusial juga berhubungan dengan klaim pemilikan tanah di antara para tuan tanah. Persoalan semacam ini bukan tidak mungkin akan menjadi 'potensi konflik' di antara para pemilik tanah ulayat. Belum lagi, dengan klaim-klaim generasi para tuan-tuan tanah tersebut. Di antara MLT, kemungkinan konflik bisa saja terjadi di antara kelompok 'pro tambang' *versus* 'kontra tambang'; kelompok yang diuntungkan oleh industri tambang *kontra* kelompok yang merasa dirugikan dengan kehadiran tambang.¹²⁹

Selain itu, konflik horizontal dan vertikal seperti ini, juga akan sangat rentan terjadi manakala ada relokasi pemukiman penduduk ke tempat lain. Bukan saja mereka akhirnya menjadi seperti 'orang asing', tetapi juga akan timbul konflik antara para pendatang baru dengan penduduk setempat. Perebutan sumber daya alam di tempat baru menjadi potensi konflik yang setiap saat bisa saja muncul. Selain persoalan sosial, persoalan budaya juga akan muncul, terutama benturan budaya antara orang-orang asing dengan orang-orang lokal, pihak investor dengan MLT. Hal itu menyangkut bahasa dan beberapa aspek budaya lain. PT SJA merekrut sebagian kecil MLT untuk bekerja pada perusahaan. Para buruh ini bekerja dengan ritme yang tidak menentu. Hal ini bergantung pada volume pekerjaan di areal operasi tambang.¹³⁰

Lebih lanjut, dengan ritme kerja yang tidak tetap seperti ini maka para pekerja juga tidak memiliki kepastian jam kerja dan jaminan lainnya. Dari wawancara yang dilakukan peneliti ditemukan kenyataan bahwa PT SJA tetap melakukan operasi pada saat pekerja seharusnya menjalankan hak-hak menjalankan

¹²⁹ Banyak kejadian semacam ini terjadi di Sirise dalam kawasan operasi PT Arumbai. Dengan dukungan LSM setempat (Yayasan Bina Desa Mandiri) karyawan melakukan mogok kerja untuk menuntut standar kelayakan kerja dengan peralatan secukupnya. Meski demikian tidak semua tuntutan ini dipenuhi perusahaan. Hal ini terungkap dari wawancara dengan Rony Barut, Direktur YBDM di Ruteng tanggal 27 April 2009.

¹³⁰ Seperti dituturkan oleh DS tokoh adat/kampung Jengkalang, MLT di kawasan operasi PT SJA (20 April 2009, Reo, Manggarai).

ibadat agamanya.¹³¹ Korporasi yang memiliki hak penuh atas tenaga kerja menerapkan jam kerja yang bertentangan dengan hak-hak sosial budaya para pekerja. Hal ini merusak hubungan sosial antarwarga di kawasan industri tambang yang dilakukan PT SJA. Sistem kerja semacam ini telah menyebabkan hancurnya pengakuan akan hak-hak sosial budaya dari tenaga kerja secara khusus dan masyarakat lingkaran tambang umumnya.

Kondisi ini pada aspek lain menghancurkan hubungan baik yang ada di tengah masyarakat. Pada satu sisi, para pekerja ini harus memenuhi tuntutan perusahaan dan sama artinya dengan mengingkari tata nilai sosial yang hidup. Pada sisi lain, mereka dianggap sebagai bagian dari korporasi yang menghancurkan tata kehidupan budaya komunitas lokal. Korporasi sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengancam para buruh bila mereka tidak menjalankan pekerjaan pada jam-jam kerja yang dipaksakan korporasi. Dalam beberapa kasus para pekerja tidak dapat menjalankan ibadah agama karena harus mengikuti jadwal kerja yang ditetapkan korporasi.¹³²

¹³¹ Para buruh yang tidak mengikuti ritme dan jadwal kerja yang ditentukan korporasi diancam PHK oleh perusahaan. Para buruh terpaksa menjalankan pekerjaan meskipun dengan melanggar hak-hak budaya mereka sendiri. Hal ini terungkap dari wawancara dengan I1 pada 20 April di Jengkalang, Reo Manggarai.

¹³² Wawancara I1, I2, I3, I8, I9, I10, I16, I17, I20 pada Maret – April 2009 di Reo dan Ruteng, Manggarai.

Tabel 8. Degradasi Sosial Budaya

Deskripsi	Bentuk	Dampak	Catatan
Menurunnya kualitas sosial budaya MLT sebagai akibat implikasi operasi tambang	-Konflik adalah salah satu bentuk degradasi sosial budaya. Konflik ini terjadi secara horisontal, vertikal, dan struktural. Ada sentimen pro kontra atas kehadiran tambang. - Peningkaran hak-hak sosial, budaya, dan religius MLT	Salah satu dampak paling krusial yang dialami MLT adalah hilangnya identitas komunitas sebagai masyarakat petani dengan tata kelola sosial dengan perspektif ekologis yang kuat.	Operasi tambang merusak hubungan antara manusia dan lingkungan sebagai sumber nilai dan tata kelola sosial MLT. Dominasi korporasi terhadap para buruh yang diambil dari MLT menjadi pemicu pelanggaran hak-hak sosial budaya masyarakat lingkar tambang.

Tabel 8 menggambarkan secara singkat bentuk-bentuk degradasi sosial budaya pada MLT. Bentuk-bentuk degradasi ini menimbulkan sejumlah dampak nyata bagi MLT, terutama berkaitan dengan kualitas hubungan horisontal maupun tata nilai sosial budaya yang hidup di dalamnya. Operasi tambang menghancurkan kualitas sosial budaya MLT.

Di samping itu, operasi tambang melemahkan sendi-sendi budaya dan kelembagaan hak-hak sosial budaya MLT.¹³³ Korporasi tidak menerapkan mekanisme operasi dengan memperkuat tanggung jawab sosial berkaitan dengan apresiasi terhadap hak-hak publik di lingkungan operasi tambang. Padahal, pengakuan terhadap hak-hak sosial warga di sekitar tambang

¹³³ Observasi yang dilakukan penulis menyimpulkan adanya pergeseran nilai-nilai sosial budaya maupun perubahan tata kelola sosial kehidupan MLT.

menentukan proses yang jauh lebih kuat tentang seberapa besar korporasi menerapkan manajemen pengelolaan sumber daya dengan memperhitungkan aspek-aspek sosial budaya yang mengikat hubungan antara masyarakat dengan sumber daya alam (lingkungan) yang ada.

5. Kemiskinan

Ekonomi dunia juga berada dalam jangkauan monopoli pengelolaan sumber daya alam. Pola ekonomi ini mengutamakan akumulasi keuntungan sebagai tujuan utama korporasi nasional maupun transnasional. Ketimpangan ekonomi dengan pembesaran volume kemiskinan pada masyarakat lokal terus menguat. Investasi ekonomi menjadi bagian dari proses pemiskinan masyarakat lokal.¹³⁴

Industri tambang berhubungan erat dengan 'akumulasi modal' korporasi. Keuntungan (profit) menjadi orientasi tunggal operasi korporasi tambang. Di pihak MLT, fenomena dan kecenderungan ini barangkali disamakan dengan apa yang disebut dengan 'abnormal profit'.¹³⁵ Manajemen pengelolaan sumber daya alam dengan mekanisme yang paling menguntungkan korporasi. Sementara akumulasi keuntungan menempatkan MLT sebagai pihak yang selalu mengalami kerugian. Kerugian yang paling nyata, yakni semakin besarnya ketidakmampuan MLT menekan korporasi untuk menciptakan pembangian keuntungan yang adil.¹³⁶

¹³⁴ Monopoli ekonomi yang dibangun korporasi melalui akumulasi investasi tanpa batas menyebabkan sirkulasi kemakmuran yang terbatas pada pemilik moral. Lihat, Giovanni Andrea Cornia, "Economic Decline and Human Welfare in The First Half of the 1980's," in Giovanni Andrea Cornia, Richard Jolly, and France Stewart (ed). (1987). *Adjustment with a Human Face: Protecting the Vulnerable and Promoting Growth*. Oxford: Clarendon Press, p. 20.

¹³⁵ Term ini bisa dilacak dalam kajian ini, William Griffiths, Paul H. Jensen, and Elizabeth Webster. "What creates abnormal profits?." *Scottish Journal of Political Economy* 58, no. 3 (2011): 323-346.

¹³⁶ Wawancara: I1, I2, I3, I8, I9, I10, I11, I12, I13.

Kasus tambang di Manggarai menegaskan kenyataan bahwa korporasi menjadi pihak yang bertambah kaya akibat akumulasi keuntungan, sementara MLT tidak mendapatkan pembagian pendapatan secara adil dari proses eksploitasi di dalam ulayatnya. Persoalan ini menguatkan satu kebiasaan yang diterapkan korporasi dalam mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang 'menjauhkan' (eksklusi)¹³⁷ MLT dari isu kemakmuran.¹³⁸

Studi yang dilakukan penulis dalam kasus tambang Mangan di Manggarai menemukan bahwa pengertian *sirkulasi kemakmuran*¹³⁹ sebagai pola yang dikembangkan korporasi dan negara perlu mendapatkan pertimbangan kritis. Ada kecenderungan yang kuat bahwa negara memberikan peluang kepada korporasi untuk mengatur alur pembagian pendapatan eksploitasi tambang sesuai ukuran yang ditetapkan korporasi dan negara. Dengan konsep *sirkulasi kemakmuran* ini maka ditarik kesimpulan bahwa operasi tambang Mangan di Manggarai tidak memiliki implikasi signifikan untuk memperbaiki kehidupan ekonomis (kemakmuran) MLT. Penjelasan tentang korelasi kebijakan pertambangan dan kemakmuran melalui pembagian pendapatan untuk daerah menjadi penting untuk melihat implikasi positif tambang.

¹³⁷ Analisis yang komprehensif tentang eksklusi masyarakat lokal dalam konteks tambang dapat ditemukan dalam kajian Petrova, Svetla, and Dora Marinova. "Social impacts of mining: Changes within the local social landscape." *Rural Society* 22, no. 2 (2013): 153-165.

¹³⁸ Dalam ungkapan penuh ironi, kaya yang makin kaya, yang memiliki emas akan memerintah, yang memerintah akan merampok emasnya. Lihat Irma Adelman & Cynthia Taft Morris. 1983. *Economic Growth & Social Equality in Developing Countries*, Stanford University Press: Stanford.

¹³⁹ Sirkulasi kemakmuran diartikan pengaturan pendapatan eksploitasi tambang akan menciptakan kemakmuran untuk MLT. Pemasukan yang diterima negara akan membantu kegiatan-kegiatan yang menunjang kesejahteraan MLT.

Tabel 9. Peranan Sektor Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Tahun 2000-2003.¹⁴⁰

Sektor	Peringkat	2001	2002	2003
1. Pertanian	1	60,45	59,34	53,71
2. Pertambangan dan Panggalian	7	2,42	2,47	2,45
3. Industri Pengolahan	8	0,86	0,85	1,04
4. Listrik dan Air Bersih	9	0,57	0,57	0,35
5. Bangunan/Konstruksi	4	7,58	7,59	7,44
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	3	8,93	10,3	10,26
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5	3,85	3,45	4,19
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6	2,37	2,32	2,85
9. Jasa – jasa	2	12,97	13,1	17,71
PDRB		100,00	100,00	100,00

Dalam kasus PT SJA dan PT ABM, jumlah keuangan yang dijadikan sebagai pemasukan untuk daerah yang berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk menjalankan program pembangunan ternyata jumlahnya sangat kecil dalam nilai kewajarannya. Pemasukan dari korporasi tambang tidak secara tetap menghubungkan kehadirannya dengan program pembangunan yang dapat menurunkan kemiskinan.¹⁴¹ Keadaan ini sesungguhnya menunjukkan adanya ‘bayang-bayang’ yang dijanjikan korporasi kepada komunitas lokal, terutama dampak positif kehadirannya secara ekonomis dapat mengangkat kehidupan warga lokal ke taraf kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini dapat dikonfrontasikan dengan keseluruhan perhitungan pendapatan korporasi dalam menjual Mangan hasil eksploitasi di kawasan ini.

¹⁴⁰ BPS Kabupaten Manggarai, 2004 www.manggarai.go.id/, diunduh pada 22 April 2009. Data ini masih perlu disempurnakan lagi dengan informasi-informasi baru. Ini hanya sebuah model kajian yang bisa digunakan untuk memetakan rasionalitas kebijakan tambang di daerah ini.

¹⁴¹ Tidak ada korelasi positif antara operasi tambang dan peningkatan kesejahteraan bagi MLT. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan I1, I2, I3, I6, I7, I8, I9, I10, I12, I14, I15, I16, I17, Maret-April 2009, Reo dan Ruteng, Manggarai.

Tabel 10. Perkiraan Harga Mangan¹⁴²

Tahun Produksi	Kapasitas Produksi (Tahun/ton)	Pendapatan dalam Dollar/ ton	Pendapatan dalam Rupiah 1\$=Rp 9000	Sumbangan bagi PAD + Biaya Reklamasi
2006	60.000	73.500.000 (1.225)	661.500.000.000	107.000.000
2007	60.000	243.000.000 (4.050)	2.187.000.000.000	107.000.000
2008	60.000	243.000.000 (4.050)	2.187.000.000.000	107.000.000
Total	180.000	559.500.000	5.035.500.000.000	321.000.000

Tabel di atas hanya salah satu perhitungan dari PT SJA tiga tahun terakhir, yang melakukan eksploitasi di Bonewangka, Torong Besi Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, tidak termasuk PT ABM yang beroperasi di Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Kapasitas produksi pertahun setiap perusahaan berbeda-beda.¹⁴³

Hasil operasi tambang sebagian besar hanya untuk keuntungan korporasi. Manggarai yang memiliki sumber daya mineral itu mendapatkan jumlah yang tidak sebanding dengan pendapatan korporasi. Belum ada alasan yang cukup sah untuk mengatakan bahwa kesejahteraan menjadi salah satu dampak dari operasi tambang PT SJA dan PT ABM. Namun, yang terjadi adalah akumulasi keuntungan perusahaan tanpa memiliki hubungan yang kuat dengan kesejahteraan MLT. Volume kemiskinan bertambah besar juga karena operasi

¹⁴² JPIC OFM, JPIC SVD, JPIC Keuskupan Ruteng mengolah data ini dalam Kertas Posisi yang dipublikasikan pada tahun 2008.

¹⁴³ Menurut Manager PT Sumber Jaya Asia, LM, setiap tahun perusahaan yang melakukan eksploitasi di Bonewangka, Torong Besi mengangkut hasil mangan ke China sebesar 60.000 ton. Sementara PT Arumbai Mangabekti yang melakukan eksploitasi di Lokasi Satar Punda sejak tahun 1999, setiap tahun mengangkut 45 ribu ton Mangan. Bahan ini diolah dan dianalisis berdasarkan hasil publikasi JPIC OFM dalam kertas Posisi tentang industri tambang di Manggarai (2008).

korporasi tambang telah menghancurkan ekonomi domestik MLT yang menggantungkan kehidupan pada bidang pertanian. Operasi tambang telah mengurangi tanah garapan. Kemiskinan disebabkan rendahnya kemampuan MLT untuk menyediakan pangan.¹⁴⁴

Tabel 11. Kemiskinan MLT

Deskripsi	Aspek-aspek	Bentuk	Dampak	Catatan
- Operasi tambang tidak menciptakan kemakmuran untuk MLT - Sirkulasi pendapatan yang tidak adil	1. Ekonomis 2. Ekologis	1) Pemasukan untuk PAD yang tidak signifikan dengan jumlah pendapatan korporasi 2) Tanah yang tidak mampu menyediakan pangan bagi masyarakat	MLT mengalami kemunduran kualitas kehidupan, baik ekonomi maupun sosial. Kerentanan ini merupakan akumulasi proses pemiskinan yang dialami MLT	Konsep sirkulasi kemakmuran yang mengadaikan kemakmuran MLT dari bagi hasil korporasi melalui PAD (Pemerintah) tidak signifikan

Tabel 11 mengetengahkan gambaran jelas tentang hubungan antara operasi tambang dengan kemiskinan MLT. Operasi tambang PT SJA dan PT ABM menyebabkan kehancuran basis ekonomi domestik yang menimbulkan kemiskinan MLT. Gambaran ini menjadi semakin jelas dengan mempertimbangkan posisi subordinan MLT. Kemiskinan yang menimpa masyarakat lokal paralel dengan persoalan melambatnya produksi

¹⁴⁴ Operasi tambang menimbulkan kehancuran ekonomi domestik. Lihat, Bruce F. Johnston & Peter Kirby. (1975). *Agriculture and Structural Transformation: Economic Strategies in Late Developing Countries*. New York: Oxford University Press.

pangan sebagai komunitas pertanian.¹⁴⁵ Hal ini sebagai akibat berkurangnya lahan pertanian dan perubahan iklim akibat lanjutan dari degradasi ekologi di kawasan pertambangan.

C. Analisis

Studi ini menyimpulkan bahwa MLT dan komunitas lokal mampu merumuskan sebab-sebab resistensi lokal setelah mendapatkan informasi yang ‘relatif’ lengkap tentang industri tambang. Ada lima (5) sebab utama munculnya resistensi lokal (Gambar 5). Lima (5) sebab itu, antara lain: dominasi, marginalisasi, degradasi ekologis, degradasi sosial budaya, dan kemiskinan merupakan rangkaian sebab terhadap resistensi lokal.



Gambar 4. Analisis sebab-sebab resistensi

¹⁴⁵ Salah satu persoalan penting yang muncul di belakang masalah besar operasi tambang adalah komunitas lokal yang kehilangan kemampuan mengantisipasi ketersediaan pangan. Dalam pengungkapan lain, MLT mengalami ancaman kemiskinan yang lengkap. Lihat, Lester R. Brown. (1988). "The Changing Food Prospects: The Nineties and Beyond," *Worldwatch Paper 85*. Washington DC: Worldwatch Institute, Oct. 1988.

Di sini menjadi jelas bahwa resistensi merupakan ‘tanggapan lokal’ atas dominasi korporasi dan negara yang menempatkan MLT sebagai pihak lain yang tidak memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Dominasi menjadi mekanisme paling penting yang dapat ditempuh negara dan korporasi untuk ‘melumpuhkan’ kekuatan MLT. Dari perspektif MLT, dominasi merupakan sebab munculnya resistensi lokal. Studi lapangan yang dilakukan penulis menemukan kenyataan bahwa dominasi korporasi dalam konteks operasi tambang PT SJA dan PT ABM memunculkan resistensi lokal yang kuat. Marginalisasi MLT koheren dengan dominasi korporasi dan negara.

Selanjutnya, degradasi ekologis memicu resistensi lokal terhadap keberlangsungan operasi tambang di kawasan ini. Hal ini menunjukkan bagaimana komunitas lokal mampu memilih satu di antara dua pilihan, menjaga keberlangsungan korporasi dengan akibat kerusakan ekologis yang lebih luas atau mempertimbangkan keberlangsungan hidup komunitas lokal. MLT menemukan kenyataan bahwa operasi tambang PT SJA dan PT ABM tidak memenuhi aspek penting berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan hidup MLT.

MLT mendasarkan nilai-nilai sosial-budaya dalam kerangka hubungan dengan alam dan lingkungan hidup. Operasi tambang telah menghilangkan sebagian tanah dan kawasan sebagai sumber kehidupan MLT. Nilai-nilai sosial mengalami kehancuran akibat kerusakan ekologis. Selain itu, penerapan jadwal kerja untuk para buruh yang ditetapkan PT SJA telah melanggar hak-hak religius MLT. Kemiskinan yang dialami MLT akibat berkurangnya kemampuan tanah untuk ketersediaan pangan merupakan sebab resistensi lokal. Pengingkaran hak-hak religius (budaya) ini telah memicu resistensi lokal terhadap operasi tambang yang dilakukan PT SJA.

Tabel 12. Tabel Sebab-sebab Resistensi

No		Sebab	Fokus
1		Dominasi	Posisi negara dan korporasi tanpa kontrol lokal
2		Marginalisasi	Mekanisme yang dijalankan korporasi dan negara untuk ‘mengasingkan’ MLT dari keseluruhan persoalan tambang (regulasi, operasi, dampak)
3		Degradasi ekologis	Menurunnya kualitas lingkungan, terutama kawasan hutan, tanah, dan ekosistem laut yang memengaruhi kehidupan MLT sebagai masyarakat petani
4		Degradasi Sosial Budaya	Rusaknya tata kelola sosial MLT akibat penghancuran masif atas lingkungan hidup (kawasan, hutan dan tanah) yang memiliki hubungan dengan kehidupan manusia.
5		Kemiskinan	Konsep sirkulasi kemakmuran dengan mekanisme pembagian hasil antara negara dan korporasi tidak berkaitan secara signifikan dengan tingkat kesejahteraan MLT

D. Penutup

Lima (5) sebab resistensi yang dikemukakan dalam bab 5 tidak dapat ditempatkan dan dimengerti secara terpisah sebagai elemen-elemen tunggal. Semua aspek ini saling terkait secara erat dan membentuk basis perlawanan lokal atas tambang. Di sini, tambang dipersepsikan sebagai ‘medan kerja’ dua aktor-institusi politik pembangunan dalam kehadiran korporasi dan negara. Bagaimanapun, lima (5) sebab resistensi ini tidak mengandung ‘klaim’ sebagai penjelasan lengkap sebab perlawanan lokal.



BAB 7

DINAMIKA RESISTENSI LOKAL

A. Pengantar

Resistensi lokal merupakan isu menarik dalam konteks tambang di Manggarai. Resistensi mencirikan dinamika hubungan antara negara, korporasi, dan komunitas lokal. Resistensi lokal menentukan posisi negara, korporasi, dan komunitas lokal dalam kaitannya dengan operasi tambang. Resistensi lokal menggambarkan perubahan ‘paradigma’ pembangunan lokal dan ‘peta informasi’ yang dimiliki komunitas lokal seputar tambang pada khususnya, dan politik pembangunan pada umumnya. Pola resistensi lokal semakin beragam, terutama untuk memberikan tekanan dan kontrol langsung terhadap kebijakan tambang.

Secara fundamental, resistensi lokal mengandung *kepercayaan* sosial bahwa kekuatan perubahan ada di tangan rakyat.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Kekuatan perubahan di tangan rakyat dalam konteks tambang MLT (komunitas lokal) berhubungan secara erat dengan agenda perlawanan lokal terhadap mekanisme operasi ekonomi yang merugikan MLT (komunitas lokal). Lokal melawan operasi ekonomi dan modal dengan agenda dan kekuatan lokal. Lihat, Alan B. Durning. (1989). “Action at the Grassroots: Fighting Poverty and Environmental Decline, *Worldwatch Paper 88*. Washington DC: Worldwatch Institute.

Hal ini merujuk pada kelompok yang memiliki hubungan langsung dengan kepemilikan sumber daya alam (aset) pada tanah dan kawasan ulayat mereka, tetapi tidak mendapatkan nilai ekonomis, sosial, dan budaya yang pada gilirannya dapat mendukung keberlangsungan hidup mereka. MLT merupakan pola yang dilakukan MLT dan elemen-elemen lokal untuk 'memaksa' negara mengubah mekanisme regulasi dan korporasi berkaitan dengan operasi tambang.

Resistensi lokal mencakup beberapa persoalan mendasar, seperti: kebijakan, operasi, dan dampak-dampak langsung bagi MLT. Tujuan resistensi lokal juga mengacu pada pencapaian perubahan paradigma kebijakan tambang dan pola operasi tambang yang seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek 'lokal'. Resistensi menggambarkan hubungan elemen-elemen sosial lokal (aktor) sebagai prasyarat fundamental dalam proses resistensi. Dengan demikian, resistensi lokal dapat digambarkan sebagai mekanisme sosial yang didasarkan pada kekuatan bersama MLT berhadapan dengan dominasi negara dan korporasi.¹⁴⁷

B. Desentralisasi dan Komunitas Lokal

Pemberlakuan Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 lalu direvisi menjadi Undang-undang No. 32 tahun 2004, yang memberikan 'ruang' (*space*) dan 'peluang' (*opportunity*) besar kepada pemerintah lokal (kabupaten dan provinsi) untuk mengembangkan potensi dan mengelola sumber daya alam demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan (*sustainable local development*). Hal ini merupakan rumusan ideal tujuan pembangunan berdasarkan ikhtiar undang-undang ada.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Wawancara: I28, I29, I30, 20, 7 April 2009.

¹⁴⁸ Lihat kajian Giuseppe Ioppolo, Stefano Cucurachi, Roberta Salomone, Giuseppe Saija, & Lei Shi. (2016). "Sustainable local development and environmental governance: A strategic planning experience." *Sustainability* 8, no. 2: 180.

Di sini, gagasan-gagasan yuridis-idealistik ini, kita juga berhadapan dengan kenyataan tentang ekspansi korporasi tambang yang sedang merambah ke kawasan-kawasan baru, daerah-daerah yang berada jauh dari jangkauan kontrol pusat, titik-titik geografis yang mengandung kekayaan sumber daya alam tak terjamah, termasuk di Manggarai dalam studi ini. Di Manggarai, contohnya, begitu banyak izin KP (Kuasa Pertambangan) diberikan kepada korporasi-korporasi, tanpa memerhatikan kondisi sosial, ekologis, dan kultural setempat (lokal). Keterancaman yang dialami masyarakat muncul dari begitu cepatnya area-area yang mendukung keberlanjutan pertanian dialihfungsikan menjadi kawasan tambang.

Pemkab (Pemkab) Manggarai menilai investasi pertambangan, khususnya galian B menjadi salah satu sektor yang perlu dieksploitasi. Investasi pertambangan bahan galian B, khususnya Mangan menjadi investasi terbesar yang sedang digalakkan oleh Pemkab Manggarai. Kebijakan investasi ini dirumuskan dan dilakukan bersama dinas terkait seperti Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan dan Badan Pengendali Dampak Lingkungan.¹⁴⁹

Untuk kasus ini, kurang lebih selama kurun waktu 3 tahun, 2004-2007, Pemkab Manggarai secara resmi mengeluarkan perizinan Kuasa Pertambangan (KP) kepada 11 perusahaan untuk melakukan aktivitas pertambangan di 20 wilayah prospek pertambangan mangan, logam dasar, dan emas.¹⁵⁰ Dari kronologi tambang bisa terbaca bagaimana Pemkab Manggarai Pemkab banyak menerbitkan KP pada tahun 2007. Kebijakan Pemkab

¹⁴⁹ Kebijakan Pemkab Manggarai dalam bidang pertambangan terungkap dalam Seminar sehari tanggal 18 Desember 2008 di Ruteng, yang disampaikan Kepada Dinas Pertambangan Manggarai, Bpk. MN.

¹⁵⁰ Pemberian izin KP ini bisa dianggap masif karena tidak memperhitungkan kapasitas multi aspek daerah Manggarai terutama berkaitan dengan kesiapan sosial, budaya dan peta ekologi. *Wawancara*, 17, 18,19,110 (Maret – April 2009 di Reo dan Ruteng, Manggarai, NTT).

di bidang pertambangan menunjukkan sebuah pergeseran komitmen dari 'peningkatan kualitas lingkungan' ke 'penurunan kualitas lingkungan'. Informasi di bawah ini dapat memberikan penjelasan tentang isu ini.

Dari catatan Koordinator Justice, Peace, and the Integrity of Creation Flores, Pastor Simon Suban SVD, lebih dari 26.000 hektar areal tambang mangan berada di wilayah bagian utara Kabupaten Manggarai, terutama di Kecamatan Reok dan Reok Barat. Ribuan hektar areal tambang berada dalam penguasaan 22 pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Di antara 22 IUP itu, ada beberapa IUP yang dikuasai hingga 2029.¹⁵¹

Bagaimana pun juga keputusan ini sangat erat pengaruhnya dengan keutuhan lingkungan hidup Manggarai, yang dipelihara secara baik selama bertahun-tahun.

Berdasarkan investigasi di lapangan, pemahaman MLT atau masyarakat yang tanahnya dijual atau diserahkan untuk kepentingan industri pertambangan sangat minim. Bagaimana proses masuk korporasi tambang, apa yang harus dilakukan masyarakat, apa tanggung jawab perusahaan, sama sekali tidak dipahami oleh masyarakat.¹⁵²

Seperti terungkap pada catatan JPIC OFM dalam kertas posisi tentang tambang di Manggarai, bagaimanapun masyarakat berusaha untuk mempertajam pengetahuan mereka tentang dampak pertambangan bagi kehidupan mereka, terutama bagi generasi masa depan. MLT sesungguhnya tidak mau dengan

¹⁵¹ Dikutip dari laporan dengan judul, "Tambang di Manggarai Belum Disertai Smelter" yang dimuat Kompas. Com pada 9 Januari 2013. Link. http://regional.kompas.com/read/2013/01/09/02353966/tambang.di.manggarai.belum.disertai.quotsmelterquot?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd/, diunduh pada 29 Oktober 2017.

¹⁵² Pengetahuan MLT berkaitan dengan operasi tambang di Manggarai mulai berkembang dua tahun terakhir. Kehadiran korporasi tambang dua dekade sebelumnya tidak menjadi bagian dari perhatian masyarakat lokal. Pemkab dan korporasi juga tidak pernah menjelaskan secara lengkap semua hal berhubungan dengan operasi tambang. Wawancara: I1,I2,I3, I8,I9, I10, I14, I16,I18 (Maret – April 2009 di Reo, Manggarai).

mudah dan begitu saja menyerahkan serta menjual tanah kepada korporasi dengan mempertimbangkan generasi berikutnya yang membutuhkan tanah sebagai sumber kehidupan. Menjual tanah berarti mereka menjual kehidupan dan masa depan kehidupan generasi masa depan, serta membiarkan generasi berikutnya hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. Sebaliknya, mereka berusaha memperjuangkan dan mempertahankan tanah serta kawasan ulayat mereka terhadap operasi korporasi tambang.¹⁵³

MLT pun tahu bahwa industri pertambangan akan membawa dampak pada kerusakan sumber-sumber kehidupan mereka: hutan, tanah dan sumber air mereka. Karena itu, mereka tegas menolak kehadiran tambang di wilayah mereka. Penulis menemukan di lapangan bahwa kekhawatiran MLT ini pernah mereka sampaikan kepada pihak pemerintah lewat surat. Namun, negara (pembkab) tidak memberikan tanggapan atas keluhan mereka.¹⁵⁴

Di samping itu, masyarakat juga menyadari bahwa industri pertambangan tidak bertahan lama dan tidak memberikan jaminan masa depan untuk anak cucu mereka karena efeknya yang merusak dan menghancurkan lingkungan. Masyarakat justru menyadari bahwa pertanian, nelayan merupakan pekerjaan yang memberi masa depan walaupun hasilnya tidak selalu mencukupi kebutuhan hidup mereka.¹⁵⁵ Menjadi jelas dari tanggapan-tanggapan masyarakat ini bahwa klaim pemerintah dan perusahaan tentang kesediaan MLT menerima korporasi tidak seluruhnya benar.

¹⁵³ Masyarakat Manggarai memiliki ungkapan budaya yang menjadi simbol kedaulatan atas tanah dan kawasan, *Émé manga ata kudut rampas tana purak mukang wajo kampong, Ro'éng Manggarai pulung kudut ta'ang lawa mata agu mosé (Jika ada orang yang ingin merampas tanah air dan kampung halaman, Orang Manggarai melawannya sampai titik darah penghabisan, mati atau hidup)*. Wawancara dengan I30, 5 April 2009 di Ruteng.

¹⁵⁴ Wawancara, I1,I2,I3, I4, I15,I22,I27 (Maret – April 2009 di Lingkar Tambang Reo Manggarai).

¹⁵⁵ Wawancara I1, I2, I7, I8,I9, I10 (25 – 28 Maret 2009, MLT di Reo Manggarai).

C. Aktor Lokal

Persoalan tambang di Manggarai secara eksplisit menunjukkan kehadiran beberapa aktor penting yang membentuk resistensi. Mereka membina kemampuan rakyat untuk melahirkan satu kekuatan lain dalam menghadapi negara dan korporasi. Aktor-aktor ini berusaha memperbesar tindakan-tindakan lokal untuk menahan ekspansi korporasi dan perluasan regulasi negara yang tidak menjamin keadilan untuk komunitas lokal.

Biasanya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi pertemuan-pertemuan di tingkat kampung maupun desa. Mereka mengaggas praktik -praktik ‘keterlibatan rakyat’¹⁵⁶ dalam menyusun kebijakan publik yang memberikan ruang bagi aspek-aspek lokal. Yang dipentingkan dalam bagian ini adalah kekuatan lokal yang diandalkan sebagai basis resistensi lokal. Apa yang dilakukan aktor-aktor ini sebagai jaringan *stakeholder* bagi komunitas lokal dalam menyusun strategi resistensi lokal, yakni memperbesar ‘*empowerment*’¹⁵⁷ kepada penduduk desa¹⁵⁸. Hal ini merujuk pada pola dorongan yang dapat diberikan aktor-aktor lokal kepada rakyat (MLT) untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap pola dan mekanisme pembangunan lokal.

Secara perlahan, pengalaman yang mereka peroleh mendorong mereka mempertanyakan ‘kesahihan’ kegiatan-kegiatan versi korporasi dan negara. Kegiatan-kegiatan ini pada mulanya

¹⁵⁶ Secara teoretik gagasan ini dapat dihubungkan dengan kajian ini Ciaran O’Faircheallaigh, (2010). “Public participation and environmental impact assessment: Purposes, implications, and lessons for public policy making.” *Environmental impact assessment review* 30, no. 1: 19-27.

¹⁵⁷ Upaya-upaya ini menekankan tindakan swadaya yang konstruktif. Meskipun ada dorongan yang diberikan kepada masyarakat lokal namun hal ini tidak meniadakan kekuatan internal komunitas lokal berupa keswadayaan multi aspek yang dapat ditunjukkan. Lihat, Rajesh Tandon (1989)., “The Stae and Voluntary Agencies in Asia,” dalam Richard Hollowey (ed.). *Doing Development: Government, NGOs and The Rural Poor in Asia*. London: Earthscan Publication Ltd, pp.12-19.

¹⁵⁸ Penduduk desa merujuk pada keseluruhan keberadaan dan dinamika multi aspek MLT.

dianggap mampu memberikan implikasi positif bagi masyarakat desa (lingkar tambang), namun sesungguhnya apa yang dilakukan korporasi dan negara jauh dari tujuan kemakmuran dan kesejahteraan.

Mereka melihat urgensitas pendekatan yang lebih memiliki karakter *'lokal'*, terutama dengan manaruh kebutuhan lokal (MLT) pada aras kebijakan pembangunan. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana korporasi dan negara mempertanggungjawabkan dampak-dampak untuk komunitas lokal dari investasi dan regulasi yang ada. Melalui pendampingan yang digagas aktor-aktor ini maka MLT mampu menanggapi kebutuhan untuk menemukan langkah-langkah yang tetap dari keseluruhan investasi dan operasi korporasi.

Studi lapangan menyimpulkan bahwa resistensi lokal di Manggarai memunculkan beberapa elemen lain di samping negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Kehadiran elemen-elemen ini sangat menentukan dinamika resistensi lokal dan perubahan hubungan antara tiga elemen sebelumnya. Ada tiga kelompok aktor kunci yang membentuk dan menentukan dinamika resistensi lokal dalam konteks operasi tambang di Manggarai. *Pertama*, kelompok NGO¹⁵⁹ yang memusatkan perhatian pada proses advokasi MLT yang paling merasakan akibat langsung dari pola dan mekanisme operasi tambang di daerah ini. NGO-NGO ini bergerak di level masyarakat dan memusatkan perhatian pada pembentukan gerakan rakyat untuk melakukan resistensi terhadap kebijakan dan operasi tambang.

Kelompok NGO ini bergerak dengan satu pemahaman bahwa kelambanan lokal mempengaruhi mereka dalam menghadapi eskalasi operasi dan perluasan regulasi investasi tambang. Amat mudah untuk dibuktikan bahwa posisi komunitas lokal

¹⁵⁹ Wawancara dengan RM (27 April 2009), Direktur LSM Bina Desa Mandiri, yang memberikan pendampingan bagi MLT terutama dalam proses penyadaran akan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya.

sangat ditentukan oleh keseluruhan informasi yang mereka peroleh berkaitan dengan persoalan tambang di kawasan ini. Mereka mengasumsikan bahwa percepatan informasi dan pengetahuan akan menentukan seberapa besar volume resistensi yang dapat diberikan dan ditunjukkan MLT terhadap korporasi dan negara.

Kedua, media massa lokal¹⁶⁰ menjadi salah satu elemen lokal yang memberikan pengaruh kuat pada pembentukan resistensi lokal. Pemberitaan media massa lokal menjadi salah satu titik penting untuk mengukur dan menggambarkan dinamika resistensi lokal. Penguasaan informasi dan diskusi publik menentukan posisi penting media massa lokal dalam membahasakan kebutuhan lokal, korporasi dan posisi negara. Sepanjang tahun 2006-2009, media massa lokal telah menunjukkan peran penting dalam mendiskusikan persoalan-persoalan penting berkaitan dengan posisi MLT. Pengungkapan persoalan tambang dilakukan dengan luas oleh media massa lokal.

Ketiga, dari studi lapangan penulis menemukan bahwa Gereja Katolik merupakan elemen paling penting dalam konteks dinamika hubungan tripolar. Institusi Gereja, melalui Komisi JPIC, menentukan dinamika relasi dan prospek resistensi lokal. Gereja menempati posisi sosial yang menentukan kehidupan sosial, politik dan budaya lokal. Komisi JPIC menerbitkan analisis komprehensif tentang industri tambang dan membuka ruang-ruang diskusi yang lebih kritis seputar persoalan ini. Komisi JPIC melakukan pendekatan yang lebih intens dengan MLT dan memberikan pertimbangan kritis atas kebijakan industri tambang yang dikeluarkan pemerintah dan dilaksanakan korporasi.¹⁶¹

¹⁶⁰ Flores Pos yang terbit di Ende, Flores dan Koran Pos Kupang yang terbit di Kupang adalah dua harian yang selalu memberikan ruang pemberitaan yang cukup luas dan signifikan seputar persoalan tambang di Manggarai.

¹⁶¹ JPIC adalah Komisi Justice, Peace and Integrity of Creation atau Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan. JPIC adalah Komisi resmi yang ada dalam Institusi Gereja Lokal Keuskupan Ruteng. Juga, ada pada tarekat-tarekat religius dan

D. Lingkup Resistensi

Resistensi lokal mencakup beberapa aspek utama berkaitan dengan praktik tambang di Manggarai. Cakupan ini berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai melalui resistensi yang dibangun komunitas lokal. Resistensi lokal terutama berkaitan dengan transformasi dua persoalan utama. *Pertama*, persoalan makro merujuk pada pola kebijakan publik yang diterapkan negara dalam memberikan basis regulasi dalam bentuk KP untuk melakukan tahapan-tahapan, seperti: penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi. *Kedua*, persoalan mikro berkaitan dengan dampak-dampak sosial, budaya, dan ekonomi operasi tambang terhadap kehidupan MLT.

Pemberian izin KP merupakan problematika menarik dalam hubungannya dengan pertambangan. Keseluruhan kebijakan negara menggambarkan relasi asimetris antara negara, korporasi dan komunitas lokal. Perhatian utama ditunjukkan kepada proses pemberian KP kepada korporasi yang membuka investasi di daerah ini. Kasus operasi tambang di Manggarai menunjukkan bahwa izin KP hanya sebatas urusan negara dan korporasi. Posisi komunitas lokal, dalam konteks ini MLT tidak memiliki posisi signifikan untuk memberikan masukan proporsional pada satu regulasi.

Tahap-tahap utama berkaitan dengan operasi tambang di kawasan ini hanya melibatkan negara sebagai pihak pemberi legalitas dan korporasi sebagai pihak lain di lapangan. Bahkan, MLT sering kali tidak mengetahui identitas KP. Resistensi

biara-biara. Keberadaan komisi JPIC adalah sah. Komisi JPIC legal. Sesuai dengan namanya, komisi ini berperan penting dalam karya-karya pastoral yang berkaitan dengan pembelaan keadilan, perdamaian dan utuhnya ciptaan. Dalam konteks tambang, Komisi JPIC wajib mengingatkan siapapun akan bahaya pengingkaran keadilan, penghancuran perdamaian, dan perusakan lingkungan hidup sebagai satu keutuhan. Komisi JPIC memberikan pertimbangan kritis terhadap mekanisme pembangunan di tingkat lokal.

mencakup persoalan regulasi, operasi tambang, dan dampak bagi MLT.

1. Regulasi

Regulasi (KP)¹⁶² merupakan salah satu persoalan paling krusial dalam persoalan tambang di Manggarai. Regulasi ini berada dalam ruang kewenangan negara. Studi lapangan yang dilakukan penulis menegaskan bahwa MLT membutuhkan regulasi atau izin KP yang mengandung aspek-aspek lokal. Aspek-aspek lokal ini berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi yang harus dilindungi negara dalam konteks eksploitasi sumber daya alam.

Prinsip keberlangsungan¹⁶³ MLT harus menjadi perhatian izin KP yang diberikan negara kepada korporasi. Hal ini penting untuk ditekankan karena regulasi seharusnya menggambarkan dinamika hubungan yang adil antara negara, korporasi dan komunitas lokal. Ada pengalaman MLT yang menunjukkan bahwa izin KP menjadi simbol dominasi negara dan korporasi. Izin eksploitasi PT SJA dan PT ABM diberikan tanpa memperhitungkan kepentingan MLT.¹⁶⁴

2. Operasi¹⁶⁵

Operasi korporasi merupakan masalah lain yang dihadapi MLT. Aspek operasi korporasi mencakup landasan juridis-formal

¹⁶² Regulasi berada dalam jangkauan wewenang negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang pertambangan. Regulasi menjadi bagian dari fokus resistensi lokal terutama berkaitan dengan mekanisme dan proses regulasi yang tidak memberikan perhatian pada aspek-aspek lokal.

¹⁶³ Salah satu kajian yang cocok untuk menjelaskan isu ini dapat dilihat di sini: Giurco, Damien, and Carlia Cooper. "Mining and sustainability: asking the right questions." *Minerals Engineering* 29 (2012): 3-12.

¹⁶⁴ Dokumen SK Bupati Manggarai NTT hingga 2012 berdasarkan SK Bupati No: HK/287/2007, 5/10/2007 dari PT Tribina Sempurna kepada PT SJA, Wawancara: I6,I8,I9,I10 (27 April 2009).

¹⁶⁵ Korporasi tidak memperhatikan tahap-tahap operasi mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi. Setiap tahap harus memiliki izin sebelum korpo-

perusahaan untuk melakukan dan menjalankan tahap-tahap yang harus dilewati industri tambang. Operasi menjadi satu persoalan ketika tahap-tahap ini tidak dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek lokal. Kondisi MLT tidak diperhatikan pada saat korporasi menjalankan operasinya. Operasi korporasi ini berkaitan dengan luasnya areal operasi dan tahap-tahap yang harus dilewati korporasi dalam menjalankan semuanya itu. Ada kenyataan bahwa korporasi melakukan operasi dengan jangkauan areal operasi di luar batas-batas haknya menurut izin KP yang mereka peroleh dari pemerintah.

3. Dampak

Operasi industri tambang memunculkan banyak dampak yang tidak menguntungkan MLT. Dampak-dampak secara langsung dihadapi MLT. Korporasi mendapatkan apa yang mereka inginkan sebagai orientasi tujuannya, sementara MLT menghadapi dampak-dampak itu secara langsung. Terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan, sosial budaya, dan kemiskinan yang menjadi ciri paling nyata dari MLT. Korporasi yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi Mangan di kawasan ini menyebabkan masyarakat lokal menghadapi dampak-dampak negatif secara langsung.

Deskripsi singkat berikut ini menunjukkan aspek-aspek penting berkaitan dengan resistensi lokal. Dari studi yang dilakukan penulis ditemukan tiga persoalan pokok yang menjadi perhatian aktor-aktor lokal dalam kerangka resistensi. Aspek-aspek ini bentuk resistensi yang dibangun komunitas lokal. Aspek regulasi dan operasi berkaitan dengan dominasi negara dan korporasi. Aspek dampak multidimensi merupakan akibat operasi tambang yang dialami MLT secara langsung.

rasi melakukan operasi di areal yang sudah disetujui.

Tabel 13. Lingkup Resistensi Lokal

Aspek	Deskripsi	Fokus
Regulasi	Berkaitan dengan izin KP yang diberikan negara kepada korporasi	Izin KP yang tidak memerhatikan aspek 'lokal' (Daerah). Ini merujuk pada aspek budaya, kebutuhan ekonomi, kultur pertanian. Kekhasan lokal yang harus dipertahankan keberlangsungannya. Dalam kerangka ini adalah komunitas lokal (MLT)
Operasi	Pola operasi, areal, mekanisme operasi korporasi tambang	Kedaulatan lokal atas kawasan, hutan, dan lahan/tanah
Dampak	Akibat-akibat yang ditimbulkan operasi tambang	Kerusakan tanah, menurunnya curah hujan, berkurangnya debit air minum, kerusakan ekosistem

Fokus (Tabel 13) dari lingkup resistensi ini berkaitan dengan 'kedaulatan' lokal atas kawasan dan mekanisme regulasi yang harus diberikan negara kepada korporasi. Aspek lokal tidak hanya berkaitan dengan SDA melainkan kebutuhan-kebutuhan lokal.

E. Bentuk Resistensi

Bagian ini berusaha menghadirkan beberapa bentuk resistensi lokal terhadap tambang. Bentuk-bentuk resistensi ini sebetulnya tidak berdiri sendiri atau terpisah satu dari yang lainnya. Bentuk-bentuk resistensi ini dapat saja dibaca sebagai satu rangkaian resistensi lokal yang saling mengandaikan. Ada bentuk resistensi yang dilakukan dengan intensitas dan frekuensi yang tinggi dibandingkan dengan bentuk lainnya. Bagian ini hanya berusaha mengungkapkan sejumlah bentuk resistensi terhadap tambang, baik operasi maupun kebijakan.

1. Rapat Umum

Pembangunan¹⁶⁶ memerlukan partisipasi dan peran masyarakat sipil secara lebih signifikan. Partisipasi menekankan pengertian bahwa keterlibatan masyarakat secara komprehensif. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas pendapat-pendapat publik, melainkan juga kebutuhan-kebutuhan publik. Proses penentuan kebijakan pembangunan menggambarkan peran masyarakat.

Masyarakat lokal menemukan kesadaran baru berkaitan dengan bencana ekologis sebagai ancaman nyata bagi lingkungan hidup sebagai ancaman nyata keberlangsungan hidup.¹⁶⁷ Kesadaran ini berkembang dalam proses yang panjang melalui konsolidasi internal dengan bantuan *stakeholder* utama¹⁶⁸ komunitas lokal. Yang dibicarakan dalam konteks ini, yakni implikasi pembangunan lokal secara luas dan akibat destruktif operasi tambang yang memojokkan posisi MLT.

Penulis menemukan pola umum yang dilakukan MLT berhadapan dengan operasi tambang. MLT melakukan rapat umum sebagai salah satu bentuk resistensi lokal terhadap operasi

¹⁶⁶ Ada banyak deskripsi tentang pembangunan, juga berkaitan dengan pendekatan dan praksis pembangunan. Pembangunan berkaitan dengan mekanisme dan 'policy' yang melibatkan otoritas, modal dan implementasi. Operasi korporasi terutama dengan peranan modal merupakan salah satu agenda pembangunan.

¹⁶⁷ Kehancuran ekologis memicu kesadaran baru dalam diri masyarakat lokal berkaitan dengan pola operasi korporasi. Lihat, Robert Ornstein & Paul Ehrlich.(1989). *New World, New Mind: Moving Toward Conscious Evolution*, New York: Doubleday.

¹⁶⁸ Gereja (JPIC) membentuk forum-forum pastoral untuk membahas persoalan-persoalan penting berkaitan dengan kebijakan dan operasi tambang. Gereja memberikan pendampingan kepada MLT berhubungan dengan kesadaran akan hak-hak mereka dalam urusan tambang. Gereja Katolik Keuskupan Ruteng mengeluarkan sebuah Nota Pastoral berkaitan dengan kebijakan pembangunan di tingkat lokal Manggarai yang sedang menjadikan pertambangan sebagai salah satu bagian implementasinya. Gereja Katolik dalam Nota Pastoral itu mengingatkan Pemerintah untuk menerapkan pola pembangunan yang tetap mendukung keberlangsungan kehidupan lingkungan dan manusia. Nota Pastoral ini merupakan kesepakatan Gereja Katolik Keuskupan Ruteng dalam Sidang Pastoral yang diadakan pada tanggal 21 – 24 April 2009.

tambang, baik yang dilakukan PT SJA dan PT ABM maupun korporasi yang baru mendapatkan izin dari negara. Rapat umum biasanya dilakukan MLT sebagai satu kesatuan adat dan budaya. Suatu komunitas adat yang memiliki hak ulayat atas tanah dan kawasan tambang. Salah satu simbol paling penting dari kesatuan adat dan budaya ini, yaitu kedudukan penting rumah adat (*mbaru gendang*) dalam setiap rapat umum yang dilakukan MLT.

Rapat umum yang dilakukan MLT menghasilkan kekuatan untuk menempatkan posisinya secara seimbang berhadapan dengan korporasi dan negara. Biasanya rapat umum (*mbaru gendang*) diadakan untuk membicarakan kehidupan mereka (*lingko*) atau tanah kehidupan. Kegiatan ini merupakan satu alat yang disediakan adat untuk mempertahankan hak-hak mereka. Rapat umum di rumah adat memiliki ikatan hukum yang mengikat semua warga dalam komunitas adat bersangkutan.

Kedudukan rumah adat menjadi sangat penting bukan saja dari aspek adat dan budaya, melainkan berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat bersangkutan. Semua keputusan bersama yang disepakati dalam rapat adat memiliki kekuatan mengikat semua anggota komunitas adat. Sebagai simbol kesatuan maka rumah adat dan semua rapat umum yang dilakukan komunitas adat di dalamnya selalu mengacu pada aspek 'kedaulatan' lokal atas kawasan dan tanah. Rapat umum memutuskan sikap dan pilihan tindakan MLT berkaitan dengan kehadiran industri tambang dengan semua dampak yang ditimbulkannya. Rapat umum menjadi bentuk resistensi lokal terhadap kehadiran operasi tambang.

Hal ini menjadi bagian dari resistensi yang dibangun MLT sepanjang dua tahun terakhir (2007 – 2009). Penulis menemukan kenyataan bahwa rapat umum dalam rumah adat menjadi bagian penting bagi MLT untuk merumuskan resistensi terhadap operasi

tambang.¹⁶⁹ Penulis menemukan dinamika yang menegaskan pentingnya rapat umum bagi MLT. Dalam rapat umum, MLT dapat membicarakan semua persoalan berkaitan dengan operasi tambang.¹⁷⁰ Salah satu contoh tentang pentingnya pertemuan umum MLT dengan bantuan aktor-aktor lokal dapat dibaca pada informasi berikut.

Namun, setelah mendapat informasi dan penjelasan dari Pastor Paroki Kajong, Romo Egidius Rada Masri dan sejumlah warga Nggalak yang bersekolah maka para warga Gendang Nggalak mengadakan pertemuan, Minggu, 5 Juli 2012, yang intinya mereka menolak pertambangan itu dilaksanakan.¹⁷¹

Rapat umum dijadikan sebagai pijakan penting pembentukan resistensi lokal yang kuat. Sebagaimana regulasi memberikan pendasaran pada operasi tambang, rapat umum memberikan justifikasi sosial terhadap resistensi lokal.¹⁷²

Dalam proses di tingkat lokal, rapat umum memperkuat kebersamaan dan pemahaman yang sama atas operasi tambang di Manggarai. Selain, resistensi terhadap PT SJA dan PT ABM, rapat umum menjadi bagian dari resistensi lokal terhadap korporasi-korporasi yang mendapat izin KP dari negara. Rapat umum menjadi mekanisme penting terbentuknya resistensi lokal.

¹⁶⁹ Terungkap dari wawancara dengan pemuka MLT, aktivis NGO lokal dan para hirarki Institusi Gereja (Maret – April 2009).

¹⁷⁰ Sikap dan pandangan mereka berhubungan dengan industri tambang di Manggarai. MLT melakukan rapat umum sejak tahun 2007 dengan bantuan pendampingan elemen-elemen lokal terutama NGO dan institusi agama (Gereja Katolik).

¹⁷¹ Dikutip dari berita yang ditulis Harian Umum Suara Pembaruan (SP) pada 27 Mei 2013 dengan judul, "Komnas HAM: Pemda dan Polri Jangan Kriminalisasi Warga Tolak Tambang". Link. <http://sp.beritasatu.com/home/komnas-ham-pemda-dan-polri-jangan-kriminalisasi-warga-tolak-tambang/36098/>, diunduh pada 30 Oktober 2017.

¹⁷² Wawancara dengan KM (28/3/2009), seorang pemuka masyarakat adat Satar Teu yang berada dalam kawasan operasi PT ABM.

Studi yang dilakukan penulis di kawasan Manggarai menunjukkan satu pola yang umum bahwa perlawanan lokal harus mengidentifikasi proses dengan keberadaan rapat umum. Rapat umum merupakan simbol kekuatan, kebersamaan, dan kesatuan komunitas lokal untuk menghadapi pola-pola penghancuran sosial. Resistensi lokal muncul dari rangkaian rapat umum yang dilakukan MLT. Kenyataan yang penting adalah intensitas kehadiran elemen-elemen lokal seperti NGO dan institusi agama ini menentukan keberhasilan resistensi lokal yang teridentifikasi dalam kegiatan rapat umum warga dalam rumah adat.¹⁷³

2. Diplomasi Penduduk¹⁷⁴

Diplomasi penduduk berhubungan dengan penguatan ikatan sosial dan hubungan antarrakyat dalam satu komunitas adat-budaya. Kesatuan adat ini menjadi salah satu kekuatan yang mencirikan resistensi lokal terhadap metode dan praktik pembangunan yang eksploitatif dan destruktif. Diplomasi penduduk menjadi salah satu keperluan dasar untuk resistensi lokal. Diplomasi penduduk menjadi salah bentuk resistensi lokal. Diplomasi penduduk merupakan urusan internal komunitas adat untuk menjaga kesatuan dan kebersamaan internal dan pengaturan urusan ini tidak diserahkan kepada pemerintah.

Penduduk dalam jumlah dan frekuensi yang terus meningkat mengambil kesimpulan bahwa hubungan antarrakyat menjadi urusan internal komunitas lokal. Hal ini tidak lagi menjadi urusan negara yang sering kali memisahkan kebijakan dan

¹⁷³ Rumah adat (mbaru gendang) merupakan representasi kedaulatan MLT atas kawasan dan SDA yang tercakup di dalamnya. Rumah adat merupakan simbol kebersamaan untuk melahirkan perlawanan terhadap setiap hal yang mengancam keberlangsungan hidup seluruh warganya.

¹⁷⁴ Gagasan ini dapat dilihat dalam kajian Don Carlson & Craig Comstoch (eds.), (1986). *Citizen Summity: Keeping the Peace when it Matters Too Much to be left to Politicians*. New York: St. Martin's Press.

regulasi dari nilai dan aspirasi warga.¹⁷⁵ MLT menjalin hubungan antareleman untuk menciptakan ruang komunikasi di antara mereka sendiri. Diplomasi penduduk biasanya dibangun di antara kelompok kecil dengan bantuan para pemimpin adat yang memiliki otoritas adat. Diplomasi yang dilakukan MLT biasanya menjadi forum untuk memperluas informasi, pengertian, dan pemahaman yang semakin lengkap tentang tambang. Diplomasi penduduk dalam ruang MLT menjadi bagian dari resistensi yang dibangun berhadapan dengan operasi tambang.

Diplomasi penduduk bergerak dalam satu simpul yang dibangun 'aktor-aktor' di tingkat lokal.¹⁷⁶ Diplomasi penduduk menyusun perspektif yang sama berkaitan dengan industri tambang. Konsolidasi internal ini berguna untuk membaca jangkauan pengetahuan MLT tentang tambang. Studi lapangan menguatkan kenyataan bahwa diplomasi penduduk menjadi bagian dari pertanahan diri lokal terhadap dominasi korporasi dan negara dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam dari bagian kawasan yang menjadi hak ulayat warga. Selain itu, diplomasi penduduk juga memperkuat rantai hubungan internal komunitas lokal untuk mendesak peninjauan kembali atas regulasi yang diberikan negara kepada korporasi.¹⁷⁷

Diplomasi penduduk sebagai bagian dari resistensi lokal mendesak negara dan regulasi untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang mempertahankan hubungan simetris dengan MLT. Dari studi lapangan ditemukan bahwa di antara kemajuan paling penting yang dihasilkan kekuatan rakyat dalam diplomasi penduduk adalah membangun resistensi rakyat terhadap operasi

¹⁷⁵ Wawancara I6, I8, I9, I10 (Maret – April 2009).

¹⁷⁶ Komisi JPIC bergerak sebagai salah satu simpul penting yang diperhitungkan dalam proses, mekanisme dan bentuk resistensi yang dilakukan MLT. (komunitas lokal) berhadapan dengan negara dan korporasi. Wawancara I2, I8, I9, I10 Maret–April 2009.

¹⁷⁷ Terungkap dalam Sarasehan Tambang yang diadakan JPIC Keuskupan Ruteng, JPIC SVD, JPIC OFM bersama NGO dan elemen-elemen MLT di Reo, Manggarai, 25–26 Maret 2009.

tambang di Manggarai. Resistensi (lokal) menjadi mekanisme sosial yang dibangun MLT untuk menghadapi dominasi negara dan korporasi.¹⁷⁸

3. Publikasi¹⁷⁹

Resistensi lokal yang dilakukan masyarakat lokal juga berkaitan dengan usaha mengendalikan ruang publik dengan informasi yang semakin luas dan lengkap tentang tambang. Pola ini kemudian menyebabkan persoalan tambang menjadi bagian dari perhatian publik secara luas. Ada pertukaran informasi antarelemen-elemen lokal, terutama berkaitan dengan ketimpangan hubungan antara masyarakat lokal, negara, dan korporasi tambang. Dengan ini, publik dapat menangkap gejala umum dan kecenderungan yang terjadi berkaitan dengan dominasi negara dan korporasi terhadap MLT.¹⁸⁰

Berikut dua persoalan pokok yang dikemukakan perjuangan media massa lokal. *Pertama*, posisi negara dalam kaitannya dengan industri tambang. Publik memberikan catatan kritis dan mencermati dasar-dasar kebijakan tambang yang dikeluarkan negara (pemerintah daerah). Dengan ini, ada usaha untuk memeriksa dasar-dasar sosial dan ekologi kebijakan tambang. *Kedua*, posisi korporasi dalam praktik tambang. Aspek ketidakadilan yang muncul dari praktik tambang menjadi salah satu hal penting yang terungkap dalam resistensi MLT melalui media massa.

¹⁷⁸ Terungkap dalam pertemuan masyarakat lingkaran tambang dengan Pemkab Manggarai Timur dalam tatap muka dengan Pemkab Manggarai Timur di Borong, 30 Maret 2009.

¹⁷⁹ JPIC OFM menerbitkan kertas posisi berkaitan dengan resistensi lokal atas rencana eksploitasi emas di Lembata (2007) dan advokasi terhadap MLT akibat operasi tambang Mangan di Manggarai (2008).

¹⁸⁰ Elemen-elemen lokal menggunakan media massa lokal sebagai salah satu alat gerakan resistensi lokal terutama berkaitan dengan isu-isu penting seperti kehancuran lingkungan akibat operasi tambang.

Elemen-elemen lokal terutama Gereja Katolik dan sejumlah NGO yang memiliki jaringan dan akses ke dalam pers lokal mengajukan argumentasi-argumentasi yang lebih luas berkaitan dengan resistensi lokal terhadap dominasi korporasi dan negara. Usaha mempublikasikan dampak-dampak destruktif operasi tambang menjadi salah satu gerakan yang dianggap efektif, terutama untuk membangun kesadaran publik melakukan resistensi lokal.

4. Protes

Reaksi terhadap mekanisme penetrasi kaum kapitalis (korporasi) dan negara (regulasi) bisa muncul dalam bentuk revolusi rakyat. Bentuk lain yang berpeluang muncul, yaitu kekerasan lokal. Dalam sejumlah studi dengan konteks negara berkembang, protes publik terhadap dominasi korporasi dan negara muncul dalam skala yang lebih kecil. Dalam kajian-kajian itu, protes lokal menjadi elemen penting resistensi lokal terhadap dominasi korporasi dan negara. Kekuatan lokal dengan argumentasi kuat menyusun kerangka protes. Protes dilakukan untuk mengimbangi, bahkan melenyapkan posisi dominan korporasi dan negara. Protes lokal kemudian koheren dengan target penyusunan bentuk 'pembangunan lain'.¹⁸¹

Perwakilan warga tersebut mengemukakan, saat ini provinsi NTT sedang dilanda investasi pertambangan, dari ujung timur ke ujung barat hampir setiap kabupaten telah dikepung investasi pertambangan. Formada melihat kehadiran pertambangan di NTT merupakan suatu kejahatan dari negara karena banyak merugikan masyarakat dan daerah.¹⁸²

¹⁸¹ Konsep ini merujuk pada pengutamaan kepentingan lokal terutama berkaitan dengan prinsip keberlangsungan, keadilan dan kesejahteraan yang harus menjadi bagian dari politik dan praktek pembangunan P. Ekins. (1992). *A New World Order: grassroots movements and global Change*. London: Routledge, p. 23.

¹⁸² Disampaikan sejumlah jaringan anti tambang kepada anggota DPD dari daerah pemilihan NTT, Tiga anggota DPD asal NTT itu, Ir. Abraham Paul Liyanto, Ema Babu Eha dan Ir. Sarah Lerrick Mboeik. Mereka menerima sembilan wakil rakyat Manggarai

Ada tiga elemen penting yang melakukan protes lokal. Tiga elemen ini membentuk kekuatan resistensi lokal.¹⁸³ *Pertama*, kelompok yang melakukan protes, yakni masyarakat yang mengalami proses marginalisasi. Proses peminggiran ini berhubungan dengan berbagai macam aspek seperti rusaknya kesehatan, kehilangan pekerjaan, dan ketiadaan ruang kehidupan akibat eksploitasi yang dilakukan korporasi.

Kedua, kelompok yang melihat ketiadaan peran, posisi, dan tempat untuk komunitas lokal dalam proses pembuatan regulasi. Mereka menjadikan protes sebagai bagian dari usaha menegosiasikan kembali posisi komunitas lokal. Kelompok ini melihat adanya peluang untuk terlibat dalam operasi korporasi dengan regulasi yang lebih adil yang diberikan negara kepada korporasi.

Ketiga, kelompok terakhir yang melakukan protes merujuk pada kelompok intelektual dan bagian dari komunitas lokal yang memiliki pengetahuan dan informasi signifikan berkaitan dengan korporasi, peran negara, maupun persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pendekatan pembangunan, ekologi, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kelompok ketiga ini akan menjadi simpul penting untuk menyatukan basis protes lokal terhadap mekanisme korporasi dan regulasi negara (pemerintah). Pengetahuan dan informasi yang dimiliki kelompok ini membantu pergerakan lokal untuk mengimbangi super dominasi dua kekuatan lainnya.

Kelompok ketiga menunjukkan andil besar dalam konteks protes lokal yang terjadi di Manggarai berkaitan operasi PT SJA

NTT di ruang kerja DPD. Lihat, Berita yang dimuat dalam Politik Indonesia, "Warga Manggarai Tolak Tambang di NTT", edisi 15 Oktober 2015. Link. <http://politikindonesia.com/index.php?k=nusantara&i=11863-Warga-Manggarai-Tolak-Tambang-di-NTT/>, diunduh pada 4 November 2017.

¹⁸³ M. Friberg and B. Hettne. (1985). The Greening of the World: toward a non-deterministic model of global processes in H. Addo (eds), *Development as Social Transformation: Reflection on the global Problematique*, Hodder and Stoughton, Sevenoaks, for the United Nations University, pp. 204 – 220.

dan semua mekanisme regulasi dan izin KP baru. Protes lokal yang dibangun bersama institusi agama dalam cara tertentu dilakukan dengan kepercayaan sosial bahwa pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi dan aspek lokal dalam setiap kebijakan pemberian izin KP. Protes lokal juga berhubungan dengan dampak yang telah muncul dari aksi operasi tambang. Protes MLT juga diajukan secara sistematis melalui penyampaian surat kepada Pemkab Manggarai dan Manggarai Timur.¹⁸⁴

5. Sabotase¹⁸⁵

Strategi sabotase digunakan sebagai jalan untuk melumpuhkan kelompok dominan dan menguasai wilayah kekuatan. Sabotase banyak diarahkan pada prasarana vital, seperti logistik. Namun, yang menjadi sasaran tidak hanya sarana-sarana vital, tetapi juga sarana-sarana tambahan yang tampaknya tidak penting untuk keberlangsungan operasi korporasi. Dari studi lapangan penulis menemukan bahwa sabotase yang dilakukan MLT pada awalnya memang berkaitan dengan aksi sporadis namun dengan memberikan efek menentukan dalam menghadapi dominasi

¹⁸⁴ Surat dari masyarakat adat satar teu pada tanggal 3 april berkaitan dengan klarifikasi atas kesepakatan antara masyarakat dengan PT Aditya Bumi pertambangan (9/2/2009) dibuat pada 3/4/2009 : tiga lingko = sumber kehidupan generasi mendatang. Dibuat masyarakat adat satar teu yang menolak kehadiran tambang. Masyarakat kampung waso juga mengadakan hal yang sama pada 24/3/2009. Permintaan Pembatalan KP Eksploitasi PT Arumbai Mangabekti yang dilakukan masyarakat adat kampung Luwuk dan dan Masyarakat Adat Kampung Rawang 22/3/2009 dan 23/3/2009 dengan alasan: kelangsungan hidup, kepunahan ekosistem dan ekologi, penyakit dan sanitasi, kemungkinan pembukaan tempat judi dan prostitusi dan peluang menciptakan konflik, secara geografis Pulau Flores dinilai terlalu kecil untuk industri tambang, selain untuk mengembangkan budaya pertanian. Masyarakat adat kampung Rokat, 17/3/2009, pemuka adat masyarakat waekara pada 9/1/2009, juga pengambilalihan tanah yang menjadi hak ulayat masyarakat adat satar teu dengan alasan korporasi mendapatkan izin eksploitasi dari Pemkab.

¹⁸⁵ Sabotase berasal dari kata "sabotage" yang berarti mensabot, atau merusak. Namun, dalam konteks gerakan resistensi lokal di Manggarai berkaitan dengan operasi tambang sabotase lebih diartikan dengan menghalangi sebagian proses operasi tambang.

korporasi, sabotase kemudian menjadi salah satu pilihan bentuk resistensi lokal.

Dalam praktik yang dilakukan MLT, ada sabotase besar yang mempunyai sasaran luas dan pengaruh sistematis jangka panjang. Sabotase ini mempunyai sasaran tidak hanya bersifat sementara, tetapi terutama sasaran struktural dan ideologis.¹⁸⁶ Dalam level makro sabotase melihat faktor vital apa yang menopang kekuatan korporasi. Dengan penghancuran faktor vital ini maka kelompok dominan akan kehilangan basis kekuatan. Dari studi lapangan yang dilakukan penulis ditemukan bahwa MLT melakukan sabotase dengan jalan menutup akses transportasi yang biasa dilewati korporasi untuk mengangkut hasil eksploitasi. MLT menutup jalan menuju areal operasi tambang.¹⁸⁷

Strategi sabotase ini biasanya melibatkan orang-orang biasa dari MLT. Hal ini menunjukkan 'kedekatan' antara MLT dengan dampak-dampak operasi tambang terhadap keberadaan dan keberlangsungan komunitas adat. Elemen-elemen lokal terutama NGO lokal yang melakukan advokasi mendampingi MLT untuk melakukan sabotase dengan '*cara damai*' (*a peaceful resistance*) tanpa melakukan perusakan-perusakan aset-aset korporasi. Orang-orang biasa yang terlibat dalam sabotase ini membentuk sistem sabotase yang konstruktif terhadap resistensi lokal. Sabotase sebagai bentuk resistensi lokal menjadi pilihan strategi yang digunakan untuk menumbangkan kekuatan dominan korporasi.

Operasi tambang berkaitan dengan regulasi yang sebelumnya tidak memperhatikan aspek-aspek lokal. Regulasi menjadi simbol dominasi negara terhadap MLT. Studi lapangan yang dilakukan penulis menemukan kenyataan bahwa dukungan lokal

¹⁸⁶ Gerakan resistensi lokal memiliki pijakan pada pengalaman MLT sebagai komunitas yang mengalami marginalisasi. Resistensi lokal memiliki dimensi struktural dengan fokus pada perubahan kebijakan maupun pola operasi tambang.

¹⁸⁷ Wawancara dengan KM dan DS, dua orang tokoh MLT di sekitar areal operasi PT SJA dan PT ABM, 28 Maret 2009 dan 20 April 2009.

seringkali diperoleh dengan jalan ‘manipulasi’ terutama berkaitan dengan mekanisme sosial (budaya) untuk membenarkan operasi tambang. Kesepakatan lokal yang tidak melibatkan sebagian besar MLT digunakan sebagai pembenaran kehadiran korporasi tambang. PT SJA menggunakan mekanisme sosial (budaya) ini untuk mendapatkan dukungan lokal terhadap proses operasi di areal tambang.

MLT biasanya melakukan sabotase terhadap mekanisme sosial yang dilakukan korporasi untuk mendapatkan dukungan lokal. Elemen-elemen MLT melakukan sabotase atas kesepakatan yang dianggap korporasi memperkuat posisinya di areal operasi tambang.

Tujuan sabotase yang dilakukan MLT terutama untuk menghambat operasi tambang dan mempersulit implementasi regulasi yang cenderung merugikan MLT. Resistensi lokal yang dilakukan MLT termasuk sabotase sebagai salah satu pilihan tindakan yang dipandang efektif untuk menghadapi dominasi korporasi.

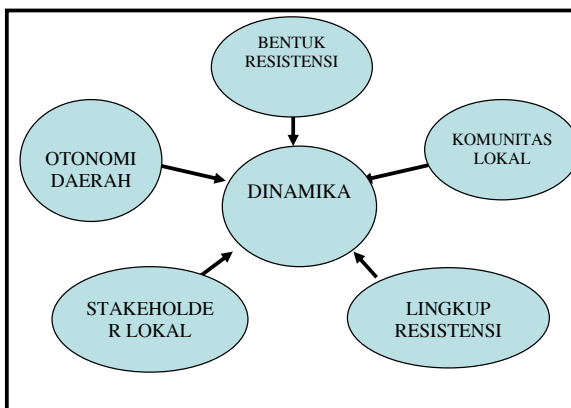
Tabel 14. Bentuk Resistensi Lokal

No	Bentuk	Fokus	Pencapaian
1	Rapat Umum	- Identifikasi resistensi lokal dengan simbol kesatuan adat/budaya dalam bentuk rumah adat	Kedaulatan lokal MLT
2	Diplomasi Penduduk	- Memperkuat hubungan antartokoh kunci MLT - Memperkuat informasi tentang operasi tambang	Soliditas internal MLT
3	Publikasi	- Menggunakan ruang diskusi publik (media massa) sebagai bagian resistensi lokal. - <i>Stakeholder</i> lokal menerbitkan kertas posisi berkaitan dengan regulasi yang tidak adil dan dampak destruktif operasi tambang	- Resistensi yang dibangun MLT mendapatkan tanggapan yang luas secara drastis. - Resistensi MLT menjadi bagian dari perjuangan lokal secara meluas.

4	Protes	<ul style="list-style-type: none"> - MLT menyampaikan surat-surat pengaduan kepada negara mulai dari level paling bawah (desa) hingga Pemkab - MLT membuat surat penolakan atas kehadiran korporasi tambang 	<ul style="list-style-type: none"> - Negara meninjau kembali kebijakan atas korporasi tambang yang sudah menjalankan eksploitasi maupun rencana pemberian izin kepada korporasi yang baru
5	Sabotase	<ul style="list-style-type: none"> - MLT menutup akses bagi korporasi untuk masuk ke dalam areal operasi - MLT melakukan sabotase pada alat-alat dan mesin-mesin korporasi tambang 	<ul style="list-style-type: none"> - Korporasi menghentikan operasi tambang - Meluasnya solidaritas atas resistensi MLT.

F. Analisis

Ada beberapa faktor penting yang mendorong resistensi lokal dalam konteks tambang di Manggarai. Resistensi ini menunjuk pada dinamika hubungan antara negara, korporasi, dan komunitas lokal (masyarakat ingkar tambang). Faktor-faktor ini membentuk satu kesatuan pengaruh umum terhadap resistensi lokal. Faktor-faktor ini (Gambar 5) merupakan kesatuan pengaruh terhadap resistensi lokal.



Gambar 5. Dinamika resistensi lokal

Otonomi daerah dengan implikasi politik dan sosial yang signifikan menjadi faktor munculnya resistensi lokal. Dalam perspektif politik, otonomi daerah memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah untuk menyusun regulasi berkaitan dengan kebijakan pertambangan. Kewenangan ini bisa menguntungkan masyarakat lokal dengan menciptakan regulasi yang melindungi kepentingan lokal. Kewenangan ini juga bisa mengancam keberlangsungan lokal melalui regulasi yang mengutungkan korporasi.

Perubahan pandangan masyarakat lokal tentang tambang merupakan salah satu faktor penting yang mendorong resistensi. Perubahan pandangan ini, terutama berkaitan dengan posisi elemen-elemen (*stakeholder*) lokal yang semakin kuat untuk memberikan informasi tentang tambang kepada masyarakat lokal. Perubahan-perubahan ini mendorong resistensi lokal yang lebih kuat kepada korporasi dan pemerintah.

G. Penutup

Isu spesifik yang muncul dalam bab ini berhubungan dengan kehadiran aktor-institusi lokal utama dalam konteks resistensi. Aktor utama mengendalikan proses resistensi melalui aktualisasi kepentingan dan nilai yang mampu menggerakkan elemen-elemen sosial lain. Agama dalam konteks pembangunan dan tambang hadir sebagai salah satu aktor kunci dalam kerangka resistensi lokal di Manggarai. Ini menjadi salah satu temuan menarik untuk melihat dan mengerti sejauh mana agama mendefinisikan posisi dan kehadiran dalam keseluruhan politik dan praktik pembangunan di daerah Manggarai.



BAB 8

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Pendahuluan

Kekuatan rakyat menjadi kunci resistensi lokal dalam kaitannya dengan ekspansi modal dan regulasi negara. Ungkapan kekuatan rakyat sebagai basis utama resistensi lokal harus dipertahankan dan disalurkan melalui perpaduan antara organisasi massa, prakarsa individu, dan organisasi keterlibatan sosial sukarela. Kekuatan sosial yang dihasilkan dari resistensi ini diarahkan untuk mentransformasikan pranata-pratana kebijakan dan nilai-nilai yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan sekaligus bersifat inklusif.

Dalam kasus tambang di Manggarai, hasil efektif di tingkat lokal melalui resistensi lokal memerlukan kerja sama luas pada tiap tingkatan gerakan. Kebutuhan akan jaringan kerja sama ini memunculkan kekuatan resistensi lokal yang semakin kuat dari waktu ke waktu. Resistensi lokal menampakkan 'aliansi' kekuatan ketika berhadapan dengan dominasi negara dan korporasi. Aliansi ini mendapatkan hasil efektif ketika dukungan lebih luas muncul terhadap resistensi lokal. Resistensi lokal dengan lingkup

dan tujuan, terutama diarahkan pada posisi negara (regulasi) dan operasi koperasi (modal-profit) mendapatkan hasil yang menentukan posisi komunitas lokal dalam hubungannya dengan negara dan korporasi.

B. Pencapaian

Bagian ini akan mengetengahkan beberapa aspek utama pencapaian resistensi lokal dalam konteks tambang di Manggarai. Gagasan-gagasan ini merupakan kristalisasi menyeluruh studi atas kompleksitas dinamika *hubungan tripolar* antara ketiga aktor yang terhubung ke dalam praksis pembangunan dalam wajah industri tambang. Pada konteks lain, barangkali ada aspek-aspek yang belum disentuh dan tidak terjangkau pemaparan.

1. Kebijakan

Sejak lama, ada kepercayaan luas bahwa pembangunan di level lokal adalah domain dan tugas negara semata. Ada implikasi krusial yang mengikuti anggapan ini. Hal ini akan cenderung membenarkan dominasi negara terhadap semua aspek yang berhubungan dengan pembangunan. Bukan saja penyusunan strategi pembangunan, tetapi juga 'klaim tunggal' pembuatan regulasi untuk bidang-bidang vital pembangunan yang bersentuhan langsung dengan nasib masyarakat.

Dengan cara berpikir seperti ini maka rakyat 'seolah-olah' dituntut untuk menyerahkan kepercayaan (*trust*) secara total dan sumber daya alam (*resources*) secara absolut ke tangan pemerintah (*state*). Sebaliknya, di atas kertas, negara harus menghadirkan dan menjamin pemberian hasil pembangunan bagi rakyat. Salah satu hasil pembangunan yang ditempatkan dalam ukuran negara adalah pembagian pendapatan korporasi atas pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal.

Salah satu kemajuan yang lebih positif yang dicapai dalam konteks gerakan resistensi lokal dalam kasus tambang di Manggarai

berkaitan dengan kebijakan umum (regulasi) Pemkab Manggarai tentang tambang. *Pertama*, Pemkab Manggarai secara khusus mencabut izin operasi PT SJA. *Kedua*, Pemkab melihat kembali kebijakan memberikan izin kepada KP yang akan melakukan penyelidikan umum di kawasan ini. *Ketiga*, Pemkab memberikan catatan penting berkaitan dengan operasi PT ABM di Lamba Leda. Meskipun, pada ranah publik tetap ada ketidakpercayaan pada komitmen pemerintah untuk menghentikan secara total penerbitan izin bagi KP baru di daerah ini.

2. Hubungan Tripolar

Sama pentingnya, tetapi lebih baru adanya pengakuan bahwa kekuatan lokal memiliki peran sentral dalam kerangka pembangunan. Langkah demi langkah yang ditempuh dalam resistensi lokal memunculkan satu tahap penting berkaitan dengan dinamika hubungan tripolar negara, korporasi, dan komunitas lokal. *Pertama*, pemerintah (negara) mengkhususkan diri dalam penggunaan wewenang secara terbatas dengan memerhatikan dasar-dasar kebijakan aturan yang dapat diberikan kepada korporasi. Negara tidak lagi menjadi kekuatan tunggal yang secara leluasa memberikan dasar hukum untuk korporasi tambang. Komunitas lokal niscaya menjadi salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam menyusun satu kebijakan regulatif atas industri tambang.

Pengakuan akan kedudukan elemen lain di luar negara menyebabkan Pemkab harus memperhitungkan langkah yang dapat diambil berkaitan dengan kebijakan tambang. Pemkab mengambil dan merelokasi kekayaan yang ada untuk tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur dalam cara-cara yang tidak bisa dilakukan sektor bisnis maupun organisasi massa.

Kedua, korporasi sebagai organisasi bisnis mulanya mengkhususkan diri pada kekuatan ekonomi dan lebih memerhatikan

perspektif lokal dalam keseluruhan proses investasi. Korporasi memerhatikan posisi dan kedudukan MLT. Terutama, korporasi menghargai kedaulatan lokal berkaitan dengan tanah dan kawasan. Selain itu, korporasi juga mengutamakan pertimbangan ekologis dalam menyusun kerangka kerja operasi korporasi tambang di kawasan. Dalam kasus tambang di Manggarai, KP melewati proses-proses yang sesuai dengan tata sosial dan adat masyarakat lokal.

Ketiga, komunitas lokal memfokuskan gerakan pada konsolidasi dan soliditas internal untuk memberikan kontrol dan pembatasan pada korporasi dan negara. Resistensi lokal memunculkan organisasi-organisasi sosial yang memberikan perhatian utama pada pencapaian hubungan yang lebih adil dan seimbang antara ketiga kekuatan ini.

3. Transformasi

Resistensi lokal memunculkan institusi agama,¹⁸⁸ LSM, aktivis lokal, dan media massa yang memberikan pendidikan, pendampingan, dan membuka forum-forum lokal yang secara sistematis dan terus-menerus mengadakan diskusi serta aksi berkaitan dengan kebijakan, operasi, dan dampak industri tambang. Konsolidasi lokal mampu 'mentransformasikan' elemen-elemen lokal dalam konteks mendorong resistensi yang lebih luas terhadap kebijakan dan operasi tambang.

Hal ini menjadi salah satu bagian dari 'reproduksi' gerakan sosial yang disumbangkan aktor-aktor lokal di Manggarai dalam konteks tambang secara khusus dan pembangunan pada umumnya. Kehadiran institusi agama (Gereja Katolik) sebagai

¹⁸⁸ Institusi Agama (Katolik) melalui forum-forum pastoral dan perhatian lainnya ternyata menjadi salah satu elemen jaringan gerakan resistensi yang signifikan. Bahkan Institusi agama menjadi satu-satunya kekuatan yang mampu menggerakkan perlawanan lokal secara konsisten dan terarah pada persoalan-persoalan umum terutama kehancuran dan pengingkaran hak-hak lokal. Dalam kasus tambang di Manggarai, institusi agama (hirarki Katolik) sangat menentukan dinamika hubungan antara korporasi, negara dan komunitas lokal dalam konteks tambang.

simpul utama resistensi lokal menginisiasikan satu model dan postur baru gerakan sosial terhadap pembangunan.

4. Analisis

MLT memiliki perubahan paradigma berkaitan dengan kebijakan dan operasi tambang.¹⁸⁹ Perubahan paradigma dan perspektif pengelolaan sumber daya alam yang berada dalam jangkauan hak ulayat atas tanah dan kawasan mereka menciptakan munculnya pemikiran dan sikap baru kepada pihak MLT. *Stakeholder* lokal, seperti: media massa, NGO, dan Institusi agama menentukan arah perubahan paradigma MLT berhadapan dengan negara dan korporasi tambang. Perubahan sikap terhadap PT SJA terjadi dengan drastis selama dua tahun terakhir setelah MLT mendapat pengetahuan dan informasi baru berkaitan dengan dampak-dampak operasi tambang.

Studi yang dilakukan penulis menemukan bahwa bentuk-bentuk resistensi lokal yang dilakukan MLT bersama elemen-elemen lokal lainnya belum sepenuhnya menerjemahkan volume pengetahuan akan dampak-dampak negatif sebagai sebab-sebab fundamental yang memunculkan resistensi lokal. Pilihan-pilihan bentuk resistensi lokal belum sepenuhnya mampu menerjemahkan pengetahuan MLT tentang operasi korporasi tambang. Eksploitasi masif yang dilakukan PT SJA dan PT ABM belum mampu dihadapi dengan bentuk-bentuk resistensi yang efektif.

C. Kesimpulan Teoretis

Bertolak dari studi tambang di Manggarai, sebuah kesimpulan teoretis dapat dikemukakan bahwa dinamika hubungan tripolar antara negara, korporasi, dan komunitas lokal juga bisa bercorak

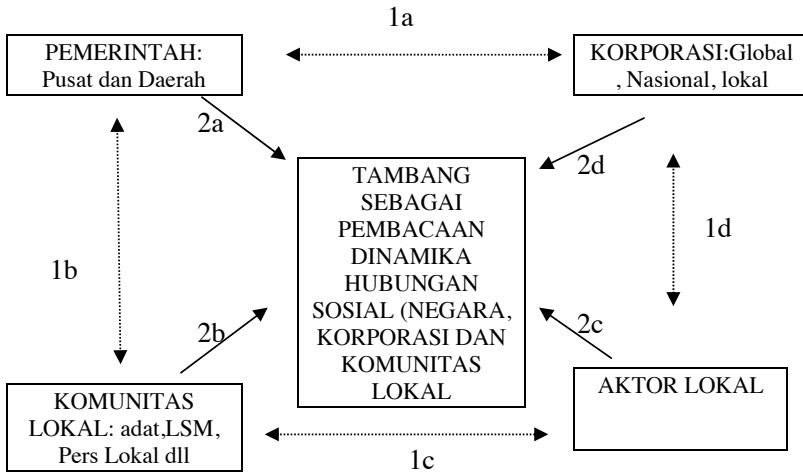
¹⁸⁹ Gagasan ini dapat ditemukan dalam penjelasan Vaclav Smil. (1987). *Energy, Food, Environment: Realities, Myths, Options*. Oxford: Oxford University Press, pp. 223, 230.

‘dominatif’. Relasi tripolar ini kemudian cenderung menjadi ‘monolitik’ sebagai akibat utama penggabungan kekuatan negara dan korporasi. Konsolidasi regulasi dan modal dalam satu kekuatan mengakibatkan ketimpangan hubungan tripolar. Negara dan korporasi mendominasi pola hubungan dengan komunitas lokal.

Resistensi lokal merupakan koreksi terhadap pola hubungan monolitik dan timpang antara negara, korporasi, dan komunitas lokal. Namun, resistensi sebagai mekanisme lokal berkembang sesuai konteks sosial, politik, dan budaya. Karakter lokal akan menentukan resistensi yang dapat memengaruhi hubungan tripolar. Resistensi juga berpeluang muncul dalam bentuk konflik dan kekerasan. Dalam kerangka ini, pendekatan multiaspek dengan partisipasi multiaktor akan mendorong keberhasilan resistensi sebagai bagian dari pertahanan lokal untuk menghadapi dominasi korporasi dalam jaminan regulasi negara. Hal ini akan menjadi sebagian dari usaha mengembalikan ‘posisi lokal’ (*local bargaining*) dalam keseluruhan konteks hubungan tripolar yang lebih seimbang.¹⁹⁰

Selanjutnya, kehadiran elemen-elemen lokal lain berpeluang memecahkan kekuatan yang terpusat pada korporasi dan negara. Hal ini akan memudahkan komunitas lokal menemukan ruang yang lebih luas dan adil untuk memasukan kepentingan dan kebutuhan dalam dinamika hubungan tripolar.

¹⁹⁰ Kecenderungan terjadinya konflik disebabkan resistensi yang hanya menggunakan perspektif sempit dari komunitas lokal. Lihat, A.A. Churchill, (1994). “Energy Demand and Supply in the Developing World, 1990 – 2020: Three Decades of Explosive Growth,” in *Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics, 1993*, ed. M. Bruno and B. Pleskovic, Washington, D.C.: World Bank, pp. 441-61.



Gambar 6. Dinamika hubungan tripolar

Pola relasi tripolar dalam konteks tambang di Manggarai mengalami perubahan dan dinamika dengan kehadiran elemen-elemen lain. Dinamika hubungan tripolar (Gambar 6) ditentukan peran elemen-elemen lokal (2c,1d). Kekuatan ‘monosentris’ yang terpusat pada korporasi dan negara terbagi ke dalam beberapa bagian kekuatan lain, seperti kelompok NGO, intelektual lokal, media massa, dan institusi agama. Elemen-elemen ini tidak serta-merta dimasukkan dalam kekuatan komunitas lokal. Alasan paling kuat bahwa elemen-elemen ini justru memberikan pengaruh besar pada relasi tripolar terutama dalam konteks dominasi negara dan korporasi terhadap komunitas lokal.

Dinamika tripolar dengan munculnya elemen aktor lokal merupakan kekuatan utama yang muncul dalam studi tambang dan resistensi lokal di Manggarai. Beberapa gejala yang muncul cukup kuat dalam konteks persoalan ini nampak dalam bentuk resistensi lokal tanpa kekerasan (*peaceful resistance*) yang dapat meredam konflik. Posisi aktor lokal dapat mengurangi lonjakan konflik antara negara, korporasi, dan MLT. Aktor lokal (utama) tidak bisa sepenuhnya berada pada posisi MLT karena dengan

posisi dan peran yang lebih luas akan memberikan keleluasaan bagi aktor utama untuk membuka relasi dengan negara dan korporasi. Relasi ini dalam konteks tertentu dapat diartikan dengan tekanan-tekanan yang dapat diberikan kepada negara dan korporasi.

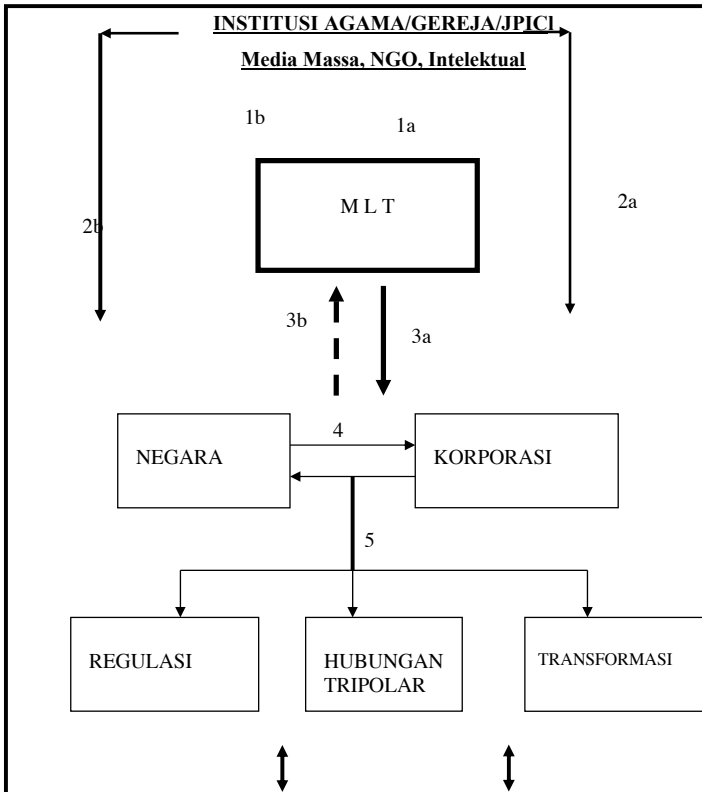
Dinamika hubungan tripolar dengan peran sejumlah elemen lokal yang cukup dominan ternyata belum sepenuhnya mampu memberikan pencapaian signifikan dalam persoalan penyelesaian ketegangan di tingkat lokal. Studi ini menemukan kenyataan bahwa 'dinamika resistensi' belum memberikan hasil akhir yang lebih seimbang dan adil dengan pola dinamika hubungan yang belum terfokus. Khususnya, tentu saja berkaitan dengan elemen-elemen lokal yang sangat dominan dengan kapasitas sosial dan budaya yang besar.

Kehadiran elemen (aktor) utama memberikan wawasan yang lebih komprehensif bagi komunitas lokal untuk memperjuangkan aspek-aspek lokal, seperti kepentingan, hak-hak sosial, budaya dan ekonomi maupun prinsip 'keberlanjutan' lokal yang harus diperhatikan negara dan korporasi. Aktor utama membantu korporasi, negara, dan komunitas lokal menemukan agenda bersama dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perspektif kepentingan lokal.¹⁹¹ Mekanisme ini akan menghindarkan pengelolaan sumber daya alam secara masif dengan mengutamakan orientasi keuntungan pihak korporasi semata. *Stakeholder* utama berperan 'menekan' korporasi dan negara yang memiliki kapasitas dominan untuk menentukan hubungannya dengan komunitas lokal.

Resistensi lokal 'membutuhkan' kehadiran elemen utama untuk membantu menemukan pola yang tepat maupun menambah 'kekuatan' MLT. Penulis menyimpulkan dari studi lapangan yang dilakukan bahwa institusi agama (Gereja

¹⁹¹ Jeffrey Leonard. (1989). "Overview," in *Environment and the Poor: Development Strategies for a Common Agenda*, New Brunswick: N.J.: Transaction, pp. 5-7.

Katolik) merupakan *'aktor utama'* dalam kerangka dinamika hubungan tripolar. Studi ini menemukan juga kenyataan bahwa peran aktor utama ini memunculkan implikasi signifikan pada pencapaian resistensi, sekaligus proses yang mengedepankan dan mengutamakan gerakan tanpa kekerasan. Hubungan tripolar dengan resistensi sebagai kunci dinamikanya tidak berkembang menjadi konflik dan kekerasan antara ketiga kekuatan ini.



Gambar 7. Posisi Institusi Gereja Katolik

—————> : KUAT
 - - - - -> : LEMAH

Di sini, penulis menemukan peran signifikan institusi Gereja Katolik (Gambar 7). *Pertama*, Gereja Katolik berperan untuk mendampingi MLT dalam proses pendidikan akan hak-

hak sosial, budaya, dan ekonomi (1a,1b). Hal ini memperkuat posisi masyarakat lokal terhadap kehadiran korporasi dan negara (3a). Posisi MLT yang semakin kuat dan pengaruh Gereja Katolik untuk mengontrol korporasi dan negara (2a, 2b) memengaruhi posisi negara dan korporasi terhadap keberadaan serta tuntutan MLT (3b). Pola hubungan ini di mana Gereja Katolik muncul sebagai aktor utama dalam ranah resistensi lokal mendorong terciptanya beberapa pencapaian: regulasi, hubungan tripolar, dan transformasi.

Institusi Gereja Katolik membuka diskusi dengan negara dan korporasi. Pertimbangan-pertimbangan utama seperti prinsip keberlangsungan, keadilan dan kehidupan menjadi hal-hal utama yang diperjuangkan Institusi Gereja Katolik dalam dinamika hubungan dengan negara dan korporasi. Peran Institusi Gereja Katolik (Figure) menentukan posisi negara, korporasi dan MLT. Peran ini menyebabkan berkurangnya dominasi negara dan korporasi terhadap MLT.

Perubahan pola hubungan tripolar ini memberikan beberapa pokok pikiran penting. Pertama, teori pembangunan yang dipakai sebagai titik tolak yang dipakai dalam studi ini tidak berlaku sepenuhnya. Gagasan-gagasan yang diajukan beberapa pemikir dalam studi ini hanya berlaku dalam konteks hubungan tripolar seimbang tanpa munculnya relasi dominatif.

Studi tentang resistensi lokal dan tambang di Manggarai menegaskan kelemahan mendasar perspektif teoritik hubungan tripolar untuk menjelaskan persoalan-persoalan dengan karakter lokal yang kuat. Pendekatan tripolar tidak bisa menjangkau kedalaman dan keluasan kompleksitas persoalan lokal yang berhubungan dengan banyak aspek sosial, budaya, dan politik khas lokal.

Pandangan *Polanyi* yang dikutip dalam studi ini dapat menjelaskan munculnya resistensi lokal sebagai akibat munculnya ketimpangan pembangian keuntungan dan ekspansi modal

masif. Demikian pun pendapat *Sen* yang diangkat dalam studi ini bisa dijadikan titik tolak untuk menelaah lebih jauh munculnya resistensi lokal sebagai akibat dari perbedaan kapasitas dan kesempatan antara negara, korporasi dan MLT.

Satu kesimpulan dapat ditegaskan bahwa kerangka hubungan tripolar belum memadai untuk digunakan sebagai perspektif teoritik dalam menelaah kompleksitas pembangunan lokal terutama bertolak dari studi kasus tambang di Manggarai. Pola hubungan tripolar cenderung dominatif terhadap komunitas lokal tanpa kehadiran elemen-elemen lokal secara signifikan. Ada elemen lain yang harus diperhatikan dalam kerangka dinamika tripolar: negara, korporasi, dan komunitas lokal untuk kasus tambang di Manggarai.

Kedua, studi tentang resistensi lokal dalam konteks tambang dapat diletakkan dalam kerangka untuk memeriksa dan mengoreksi aktualitas ekspansi investasi modal dan akumulasi keuntungan yang mengerucutkan kekuasaan korporasi. Pengerucutan kekuasaan yang memberikan perilaku dominatif korporasi dan komunitas lokal.¹⁹²

Industri tambang yang sedang beroperasi di Manggarai membenarkan teori akumulasi keuntungan dan kekuasaan ini. Keuntungan yang semakin besar dengan volume kesejahteraan yang tidak signifikan menegaskan akumulasi masif keuntungan korporasi dari pengelolaan sumber daya alam di Manggarai. Namun, resistensi lokal merupakan sebuah koreksi atas akumulasi modal, keuntungan, dan kekuasaan dominatif korporasi terhadap MLT.

¹⁹² Pandangan ini dianalisis secara lengkap oleh Dody Prayogo berdasarkan penjelasan teoritik yang dikemukakan oleh Warrick Armstrong and T.G. McGee, (1985). *Theatres of Acumulation, Studies in Asia and Latin American Urbanization, Methuen*,; lihat juga Dody Prayogo.(2008). *Konflik Antara Korporasi dengan Komunitas Lokal (Sebuah Kasus Empirik pada Industri Geotermal di Jawa Barat*. Depok: Fisip UI Press.

Ketiga, resistensi lokal selalu mengandaikan munculnya *stakeholder* utama sehingga resistensi dapat mencapai tujuan dengan bentuk dan cara tanpa kekerasan. Resistensi menjadi satu bagian tata kelola sosial masyarakat lokal berhadapan dengan negara dan korporasi. Studi lapangan menegaskan bahwa *stakeholder* utama menentukan intensitas dan volume resistensi MLT terhadap regulasi dan pola operasi korporasi tambang.

Keempat, persoalan tambang di Manggarai, Flores, NTT membenarkan munculnya Institusi Gereja Katolik sebagai aktor utama resistensi lokal. Hal ini yang menyebabkan pembacaan atas persoalan tambang tidak cukup dengan memakai kerangka hubungan tripolar. Peran aktor utama menjadi bagian penting dari keseluruhan studi resistensi lokal di Manggarai.

Posisi utama Gereja Katolik terutama berhubungan dengan prinsip-prinsip utama seperti keberlangsungan, kesejahteraan, keadilan, dan *pro-life*. Prinsip-prinsip ini melampaui kepentingan-kepentingan parsial yang dimiliki negara, korporasi, maupun MLT. Gereja Katolik memiliki kekuatan sosial yang dapat menentukan pola hubungan tripolar baru. Posisi Gereja lokal melebihi peran yang dapat ditunjukkan NGO, pers lokal, maupun kelompok intelektual. Sementara, elemen-elemen lain di luar institusi Gereja Lokal tidak memiliki pola sistematis untuk membentuk resistensi lokal yang efektif, terutama bentuk gerakan yang tidak mengutamakan kekerasan.

Gagasan ini mendorong adanya pola pembangunan lokal yang lebih integral. Melucci (1996) menegaskan, keberanian dan harapan selalu melindungi manusia dalam membangun sejarah yang mengutamakan kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan.¹⁹³ Gagasan penting ini akan mendapatkan tekanan positif bila pembangunan disadari sebagai sebuah tanggung

¹⁹³ Alberto Melucci (1996) *The Playing Self: Person and Meaning in The Planetary Society*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 130, 154.

jawab bersama.¹⁹⁴ Pembangunan sebagai tanggung jawab bersama merupakan nilai etis proses pembangunan. Implementasi paling fundamental atas tanggung jawab bersama ini adalah kehadiran semua kekuatan masyarakat dalam proses pembangunan. Semua elemen sosial menjadi subyek pembangunan. Pembangunan harus berasal dari kebutuhan rakyat.¹⁹⁵

Orientasi pembangunan harus disusun secara baru. Pendekatan pembangunan monolitis¹⁹⁶ yang selama ini selalu menjadi prioritas penguasa harus bisa direformasi dengan bentuk pembangunan partisipatoris.¹⁹⁷ Masyarakat menjadi elemen penting untuk mendukung proses pembangunan. Dominasi negara dalam merancang dan melaksanakan pembangunan justru mematikan keberadaan komunitas rakyat.

Akan tetapi, keadaan ini merupakan dilema dalam melakukan perubahan orientasi politik pembangunan.¹⁹⁸ Di sini, sesungguhnya sudah terkandung dua prinsip penting dalam proses pembangunan, yaitu 'isi politik pembangunan' yang mengacu pada pengurangan kemiskinan dan 'konteks pembangunan' yang mengacu pada realitas kemiskinan. Dua prinsip ini menjadi bahan pertimbangan penting untuk mengukur keberhasilan strategi pembangunan.¹⁹⁹

¹⁹⁴ Ananta kumar Giri & Philip Quarles Van Ufford. (2004). *Kritik Moral Pembangunan (ed)*. Yogyakarta: Kanisius, pp. 393–426.

¹⁹⁵ Jacques Maritain. (1998). *Man and State*. Chicago: Chicago University Press, pp. 11 – 15.

¹⁹⁶ Elizabeth Harrison–*Mesin Pembangunan Monolitis*–dalam Philip Quarles Van Ufford & Ananta Kumar Giri. 2004 *Kritik Moral Pembangunan (ed)*. Yogyakarta: Kanisius, pp. 160 – 170.

¹⁹⁷ David Mosse – *Pembangunan Partisipatoris*–dalam Philip Quarles Van Ufford & Ananta Kumar Giri. 2004 *Kritik Moral Pembangunan (ed)*. Yogyakarta: Kanisius, pp. 74–90.

¹⁹⁸ Kecerdasan mengatasi dilema-dilema dalam pembangunan dikemukakan oleh Alberto Melucci. (1996) *The Playing Self: Person and Meaning in The Planetary Society*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 130, 154.

¹⁹⁹ Gagasan ini dikembangkan oleh Merilee Grindle. (1980). *Policy Content and Context in Implementation in The Third World*. Princeton: Princeton University Press, pp.

Pada aras konsepsional, dibutuhkan keseriusan melakukan transformasi paradigma pembangunan secara menyeluruh dengan menyentuh semua aspek, yaitu komunitas masyarakat, pasar, maupun pemerintah. Pada bagian ini sejumlah persoalan mendesak perlu mendapatkan perhatian tiga kekuatan ini.²⁰⁰ Dengan posisi seperti ini maka komunitas lokal dapat membalikkan apa yang dikatakan Perkins (2004) bahwa operasi politik ekonomi global yang hadir hingga ke pelosok-pelosok dunia merupakan strategi penghancuran dunia dan manusia.²⁰¹

D. Rekomendasi

1. Rekomendasi bagi Negara

Pertama, negara harus mempertimbangkan aspek topografi daerah Manggarai yang rawan bencana lingkungan. Dalam menentukan kebijakan pertambangan sudah sepatutnya Pemerintah Daerah memperhitungkan dimensi sosial, budaya, ekonomi dan religius yang merupakan elemen dasar dari kehidupan manusia Manggarai. Negara harus membuat kajian integral dan komprehensif berkaitan dengan proses pemberian izin KP. Terutama, memerhatikan aspek kepentingan lokal (MLT).

Kedua, negara perlu memikirkan untuk menanggukkan pemberian kebijakan pertambangan. Pemkab perlu mengkaji ulang kebijakan serta asumsinya bahwa pertambangan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Manggarai. *Ketiga*, negara harus menyusun regulasi yang kuat dalam bidang pertambangan terutama untuk melindungi kepentingan komunitas lokal. Negara harus melakukan konsultasi publik yang transparan

3–39.

²⁰⁰ M.R. Redclift, (1985) *Policy Research and Antropological Compromise—in* Ralph Grillo & Alan Rew (ed). *Social Anthropology and Development Policy*. London: Tavistoch. pp. 198–202.

²⁰¹ Persoalan ini dibahas dengan lengkap dalam John Perkins. (2004). *Confessions of Economic Hit Man*, Berret-Koehler Publisher, Inc.

dan akuntabel tentang kebijakan pertambangan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. *Keempat*, negara harus melibatkan kelompok-kelompok sosial seperti NGO, kelompok advokasi dan Institusi Agama (Gereja Katolik) dalam menyusun format kebijakan pertambangan yang tepat.

2. Rekomendasi bagi Korporasi

Pertama, korporasi harus menunjukkan transparansi operasi tambang. Ini menunjuk pada persoalan-persoalan mendasar seperti areal operasi, bahan galian, dampak-dampak ekologis yang akan ditimbulkan terhadap keberadaan masyarakat lingkr tambang. *Kedua*, korporasi harus mampu mengubah keyakinan palsu bahwa mereka mampu mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Korporasi harus menempatkan komunitas lokal sebagai bagian penting pertimbangan operasi tambang.

Ketiga, korporasi mengutamakan proses pengelolaan sumber daya yang memperhatikan aspek '*pertumbuhan*' komunitas lokal dan '*pemerataan*' pendapatan yang mendorong kesejahteraan dan kemakmuran lokal. *Keempat*, korporasi harus menjalankan program CSR yang sistematis dan kontinu sehingga MLT bisa melakukan proses rehabilitasi kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan ekologis.

3. Rekomendasi bagi Komunitas Lokal

Pertama, komunitas lokal harus membangun konsolidasi internal yang kuat terutama berkaitan dengan persoalan hak ulayat atas kawasan. Konsolidasi ini dapat dilakukan terutama dengan revitalisasi tata kelola sosial budaya. *Kedua*, Komunitas lokal membuka hubungan yang lebih intensif dengan stakeholder lokal yang memiliki kapasitas untuk mendorong terbentuknya resistensi yang kuat terhadap korporasi.

Ketiga, komunitas lokal harus mendorong terciptanya partisipasi multi pihak dalam merumuskan visi pengelolaan

sumber daya yang mempertimbangan prinsip keberlangsungan hidup. *Keempat*, komunitas lokal membentuk sikap kritis terhadap kehadiran korporasi. Komunitas lokal harus memberikan tinjauan komprehensif atas kehadiran korporasi untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat lokal (MLT).

E. Penutup

Demikian kesimpulan-kesimpulan penting yang dapat diajukan dari keseluruhan proses studi ini. Ada banyak temuan penting yang dapat ditegaskan dalam studi ini terutama pengembangan model hubungan antara elemen-elemen penting dalam politik dan praktik pembangunan di tingkat lokal. Karakter lokal menentukan penyelesaian persoalan ketimpangan hubungan, keterancaman ekologis, kemiskinan maupun ketidakadilan ekonomi yang muncul sebagai akibat ekspansi investasi korporasi tanpa memperhitungkan kepentingan masyarakat lokal.

Ada banyak keterbatasan teoritik dan metodologik yang digunakan dalam studi ini. Tidak semua persoalan dapat diolah dengan baik dalam studi ini. Ada banyak hal lain yang belum dijelaskan secara menyeluruh dan mendalam. Keterbatasan ini dapat menjadi titik tolak studi yang lebih komprehensif dengan melihat variasi konteks sosial, politik dan budaya lokal yang mempengaruhi dinamika hubungan tripolar.

Studi ini mendorong penyelesaian persoalan pada jangka pendek terutama bagaimana menghasilkan peta hubungan tripolar yang dapat mendukung keberlangsungan hidup komunitas lokal berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan dan kemakmuran. Selain itu, temuan-temuan yang diajukan di sini dapat menjadi landasan penting untuk melakukan studi yang lebih komprehensif dalam konteks praktik pembangunan lokal.

Pemikiran-pemikiran yang muncul dalam keseluruhan penelitian ini menegaskan satu kebutuhan agar Sosiologi tidak hanya sebatas sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang menjelaskan dan mengevaluasi gejala-gejala sosial di tengah masyarakat melainkan memiliki ‘intensi’ kuat untuk mendorong terbentuknya mekanisme pembangunan yang mengutamakan kehidupan, lingkungan dan kemanusiaan. Dengan demikian studi ini dapat menjadi *‘kerangka perjuangan’* untuk menegakkan keberlangsungan ekologi dan manusia.



REFERENSI

Buku

- Adams, W.M. (2001). *Green Development*. London&New York: Routledge.
- Adelman, Irma and & Cyntia Taft Morris. (1983). *Economic Growth & Social Equality in Developing Countries*. Stanford: Stanford University Press.
- Angelsen, Arild & Wunder, Sven. (2006). Poverty and Inequality: Economic Growth is Better than Its Reputation, Chapter in Dan Banik (ed.): *Poverty, Politics and Development: Interdisciplinary Perspectives*. Fagbokforlaget, Bergen. Lihat: http://www.umb.no/statisk/ior/angelsen_wunder_poverty_inequality_growth.pdf, diunduh pada 14 Oktober 2017.
- Bates, R.H. (1983). *Essay in Rural Africa*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Blaikie, P. (1985). *The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries*. London: Longman.
- Boulding, E Kenneth. (1968). "The Economics of The Coming Spaceship Earth," dalam Henry Jarret (ed.), *Environmental*

- Quality in A Growing Economy*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press
- Carlson, Don Carlson & Craig Comstoch (eds.). (1986). *Citizen Summitry: Keeping the Peace when it Matters Too Much to be left to Politicians*. New York: St. Martin's Press.
- Churchill, A.A. (1993). Churchill, "Energy Demand and Supply in the Developing World, 1990–2020: Three Decades of Explosive Growth," in *Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics*, 1993, ed. M. Bruno and B. Pleskovic (Washington, D.C.: World Bank, 1994).
- Cornia, Giovanni Andrea. (1987). "Economic Decline and Human Welfare in The First Half of the 1980's," in Giovanni Andrea Cornia, Richard Jolly, and France Stewart (ed), *Adjustment with a Human Face: Protecting the Vulnerable and Promoting Growth*. Oxford: Clarendon Press.
- Creswell, John W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publication.
- Embu, Eman & Robert Mirsel (ed.). (2004). *Gugat: Darah Petani Kopi Manggarai*. Ledalero: Flores.
- Ekins, P. (1992). *A New World Order: grassroot movements and global change*. London: Routledge
- Evans, Geoff (ed). (2001). *Moving Mountains: Communities Confront Mining and Globalisastion*. Australia: Mineral Policy Institute.
- Frynas, J.G. (2000). *Oil in Nigeria: conflict and Ligitation between oil companies and village communities*. Hamburg: LIT.
- Friberg, M. and B. Hettne. (1985). *The Greening of the World: toward a non-deterministic model of global processes in H. Addo (eds), Development as Social Transformation: Reflection*

- on the global Problematique*. Hodder and Stoughton, Sevenoaks, for the United Nations University.
- Grindle, Merilee. (1980). *Policy Content and Context in Implementation in The Third World*. Pricenton: Pricenton University Press.
- Hardum, Siprianus Edi. (2013). *Kasus Tambang Manggarai-Komnas HAM Minta Pemda Tidak Kriminalisasi Warga*. Berita Satu, 26 Mei. Diunduh pada 4 Oktober 2017 dari <http://www.beritasatu.com/nasional/116019-kasus-tambang-manggarai-komnas-ham-minta-pemda-tidak-kriminalisasi-warga.html/>.
- Hill, F. (1978). 'Experiments with Public Sector Peasantry: agricultural, Schemes and Class Formation in Africa'. Pp. 25-41 in A.K. Smith and C.E. Welch (eds).
- Holloway, Richard Holloway (ed.). (1989). *Doing Development: Government, NGOs and The Rural Poor in Asia*. London: Earthscan Publication Ltd.
- Homer-Dixon, Thomas F. (1999). *Environment, Scarcity, and Violence*. New Jersey: Pricenton University Press.
- Johnston, R.J. Johnston. (1989). *Environmental Problems: Nature, Economy and State*. New York: Berlhaven.
- Johnston, Bruce F. and Peter Kirby. (1975). *Agriculture and Structural Transformation: Economic Strategies in Late Developing Countries*. New York: Oxford University Press
- Kolowski, Peter (ed). (1998). *The Social Market Economy: Theory and Ethics of Economic Order*. Berlin: Springer
- KOMNAS HAM. (2006). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM (Tinjauan Teori dan Prinsip-prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia*.
- Korten, David C. (1987). "Third generation NGO strategies: A key to people-centered development." *World development* 15: 145-159.

- Leonard, Jeffrey. (1989). "Overview," in *Environment and the Poor: Development Strategies for a Common Agenda*. New Brunswick: N.J Transaction.
- Martinussen, John. (1999). *Society, State and the Market, A Guide to Completing Theories of Development*, London: Zed Books.
- Masera, Omar, Marta Astier, & Santiago López-Ridaura. (1999). *Sustentabilidad y manejo de recursos naturales*. Mundiprensa.
- Melucci, Alberto. (1996). *The Playing Self: Person and Meaning in The Planetary Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Migdal, Joel Samuel, Atul Kohli, & Vivienne Shue, eds. (1994). *State power and social forces: domination and transformation in the Third World*. Cambridge University Press.
- Neles Tebay. (2005). *West Papua: The Struggle for Peace with Justice*. CIIR, Catholic Institute for International Relations, London, UK.
- Newman, W Lawrence. (2003). *Social Research Methods*. Boston: University of Wisconsin
- Ornstein, Robert & Paul Ehrlich. (1989). *New World, New Mind: Moving Toward Conscious Evolution*. New York: Doubleday.
- Pearce, David, *et.al.* (1989). *Blueprint for A Green Economy*. London: Earthscan Publication, Ltd.
- Pearce, David, Edward Barbier, & Anil Markandya. (2013). *Sustainable development: economics and environment in the Third World*. Routledge.
- Perkins, John. (2004). *Confessions of Economic Hit Man*. Berret-Koehler Publisher, Inc.
- Philip Quarles Van Ufford & Ananta Kumar Giri. (2004). *Kritik Moral Pembangunan (ed)*. Yogyakarta: Kanisius.

- Polanyi, Karl. (2001). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press.
- Prayogo, Dody. (2008). *Konflik Antara Korporasi dengan Komunitas Lokal (Sebuah Kasus Empirik pada Industri Geotermal di Jawa Barat)*. Depok: Fisip UI Press.
- Prior, John M. *The Church and Land Disputes: Sobering Thoughts from Flores (Manuscript)*, Maumere: tanpa tahun.
- Redclift, M.R. (1985). *Policy Research and Antropological Compromise—in Ralph Grillo & Alan Rew (ed). Social Anthropology and Development Policy*. London: Tavistoch.
- Rich, Bruce. (1999). *The Earth: The World Bank, Environmental Impoverishment and The Crisis of Development*.
- Robertson, James. (1990). *Future Wealth: A New Economics for The 21th Century*. London: Cassel Publishers Limited.
- Sangaji, Arianto. (2002). *Buruk INCO, Rakyat Digusur: Ekonomi Politik Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sanyal, Kalyan. (2014). *Rethinking capitalist development: Primitive accumulation, governmentality and post-colonial capitalism*. New York: USA, Routledge.
- Scott, J. (1985). *Weapons of the Week: Everyday forms of Peasant Resistance*. New Hanern ET: Yale University Press.
- Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knof.
- Smil, Vaclav. (1987). *Energy, Food, Environment: Realities, Myths, Options*. Oxford: Oxford University Press.
- Tandon, Rajesh. (1989). "The Stae and Voluntary Agencies in Asia," dalam Richard Hollowey (ed.). *Doing Development: Government, NGOs and The Rural Poor in Asia*. London: Earthscan Publication Ltd.
- Yeung, Karen. (2010). "The regulatory state." Oxford: UK, Oxford University Press.

Jurnal

- Armitage, Derek, (2004), Nature: Society Dynamics, Policy Narratives, and Ecosystem Management: Integrating Perspectives on Upland Change and Complexity in Central Sulawesi, Indonesia in *Ecosystems*, Vol. 7, No. 7 (Nov., 2004), Published by: Springer Stable URL: <http://www.jstor.org>.
- Bebbington, Anthony, Denise Humphreys Bebbington, Jeffrey Bury, Jeannet Lingan, Juan Pablo Muñoz, & Martin Scurrah. (2008). "Mining and social movements: struggles over livelihood and rural territorial development in the Andes." *World development* 36, No. 12: 2888-2905.
- Bhatt, Suresh K., and Christopher Mark. "Analysis of Safety Aspects And Mining Practices For Effective Ground Control in Surface Mining." *National Institute for Occupational Safety and Health Pittsburgh Research Laboratory, Pittsburgh, PA* (1900).
- Brown, Lester R, (1988), "The Changing Food Prospects: The Nineties and Beyond, "Worldwacth Paper 85 (Washington DC: Worldwatch Institute, Oct. 1988).
- Constanza, Robert, (1989), "What is Ecological Economics in *Ecological Economics*, Vol. I No. 1.
- Courson, Elias, (2011), "MEND: political marginalization, repression, and petro-insurgency in the Niger delta." *African Security* 4, No. 1: 20-43.
- Durning, Alan B. (1989), "Action at the Grassroots: Fighting Poverty and Environmental Decline, "Worldwatch Paper 88. Washington DC: Worldwatch Institute, January 1989.
- Friends of The earth International (2007).
- Friberg, M. & B. Hettnen (1985)n The Greening of the World: toward a non-deterministic model of global processes in H. Addo (eds), *Development as Social Transformation:*

- Reflection on the global Problematique*, Hodder and Stoughton, Sevenoaks, for the United Nations University, pp. 204 – 220.
- Giurco, Damien, & Carlia Cooper, (2012), “Mining and sustainability: asking the right questions.” *Minerals Engineering* 29: 3-12.
- Griffiths, William, Paul H. Jensen, & Elizabeth Webster, (2011), “What creates abnormal profits?.” *Scottish Journal of Political Economy* 58, No. 3: 323-346.
- Imbun, Benedict Young, (2007), Cannot Manage without The ‘Significant Other’: Mining, Corporate Social Responsibility and Local Communities in Papua New Guinea in *Journal of Business Ethics* (2007).
- Institute for Research and Development (IRE), Yogyakarta, 2008.
- Ioppolo, Giuseppe, Stefano Cucurachi, Roberta Salomone, Giuseppe Saija, dan Lei Shi, (2016), “Sustainable local development and environmental governance: A strategic planning experience.” *Sustainability* 8, No. 2: 180.
- Jacobson, Jodi L, (1988), Environmental Refugees: A Yardstick of Habitability,” *Worldwatch Paper* 86.
- _____, (1988), Environmental Refugees: A Yardstick of Habitability,” *Worldwatch Paper* 86, p. 6.
- Jenkins J. Craig & Doug Bond (2001), *Conflict-Carrying Capacity, Political Crisis, and Reconstruction: A Framework for the Early Warning of Political System Vulnerability in The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 45, No. 1 (Feb., 2001).
- Kaplan, Paul, (2002), *Mining, corporate social responsibility and the “community”: The case of Rio Tinto, Richards Bay Minerals and the Mbonambi in Journal of Business Ethics*. Dordrecht: Sep 2002. Vol. 39, Iss. 3; pg. 275, 22 pgs.

- Lane, White, (2006), The Challenges of Prosperity *Engineering and Mining Journal*; Oct 2006; 207, 8; ProQuest Science Journals pg. 26.
- Lee, Charles, (2002), Environmental Justice: Building a Unified Vision of Health and the Environment in *Environmental Health Perspectives*, Vol. 110, *Supplement 2: Community, Research, and Environmental Justice* (Apr., 2002), pp. 141-144 Published by: The National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) Stable URL: <http://www.jstor.org>.
- McBeth, John (1989), "The Boss System," *Far Eastern Economic Review*, 14/9/1989.
- Michelson, Grant, Nick Wailes, Sandra Van Der Laan, & Geoff Frost, (2004), "Ethical investment processes and outcomes." *Journal of Business Ethics* 52, No. 1: 1-10.
- Nadkarni, MV (2000), *Poverty, Environment, Development: A Many-Patterned Nexus* in *Economic and Political Weekly*, Vol. 35, No. 14 (Apr. 1-7, 2000), pp. 1184-1190 Published by: Economic and Political Weekly Stable URL: <http://www.jstor.org>.
- Null, *Schuyler* (2010), Afghanistan's Mineral Wealth: Gold Mine, Curse, or Illusion?, *New SecurityBeat: The Blog of the Environmental Changes and Security Program*, June, 15. Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC, USA. Link. <https://www.newsecuritybeat.org/2010/06/afghanistans-mineral-wealth-gold-mine-curse-or-illusion/>, diunduh pada 16 Oktober 2017.
- O'Faircheallaigh, Ciaran, (2010), "Public participation and environmental impact assessment: Purposes, implications, and lessons for public policy making." *Environmental impact assessment review* 30, No. 1: 19-27.
- Our Common Future, (1977), Oxford: Oxford University Press.

- Owen, John R., and Deanna Kemp. "Social licence and mining: A critical perspective." *Resources policy* 38, No. 1 (2013): 29-35.
- Petrova, Svetla, & Dora Marinova, (2013), "Social impacts of mining: Changes within the local social landscape." *Rural Society* 22, No. 2: 153-165.
- Sinclair, Amanda, (2003), **Indigenous human resource practices in Australian Mining companies: Towards an ethical model** in *Journal of Business Ethics. Dordrecht: Jul 2003*. Vol. 45, Iss. 4.
- Vivoda, Vlado, (2008), "Assessment of the governance performance of the regulatory regime governing foreign mining investment in the Philippines." *Minerals & Energy-Raw Materials Report* 23, No. 3: 127-143.
- Yambajav, Dalaibuyan, (2012), "Mobilizing against dispossession: Gold mining and a local resistance movement in Mongolia." *Journal of the Center for Northern Humanities* 5: 13-32.

Internet

Aceh Forum Community edisi 24 Juni 2006.

<http://www.dim.esdm.go.id> .

<http://sp.beritasatu.com/home/warga-desa-lante-minta-ganti-rugi-kepada-pt-rim/28283>, diunduh pada 7 Oktober 2017.

<http://www.dim.esdm.go.id>.

<http://www.dim.esdm.go.id>.

<http://www.dim.esdm.go.id>.

<http://regina.polgov.fisipol.ugm.ac.id/id/blog/jalan-panjang-mengamankan-torong-besi>, diunduh pada 11 Oktober 2017.

HU Pos Kupang (2010). "Pikir Ulang Izin Tambang" yang dimuat pada edisi Kamis, 27 Juli. Link. <http://kupang>.

tribunnews.com/2010/07/29/pikir-ulang-izin-tambang
Diunduh pada 29 Oktober 2017.

Jaringan Advokasi tambang (JATAM) edisi 10 Juli 2007.

JATAM edisi 10 Juli 2007.

Wardhani, Indah Surya (2015). Jalan Panjang Mengamankan
Torong Besi.

www.esdm.com, diakses 19 April 2009.

www.manggarai.go.id.

Media Massa

Flores Pos, 3/7/2007.

FP, 10/8/2006.

FP, 10/8/2006.

Harvard Crimson Reports, 17/3/2003.

HU Kompas 18 April 2003.

New York Times, 4/3/2003.

Pos Kupang edisi 21/4/2009—Mangan untuk Kemakmuran
Rakyat.

Tempo, Desember, 2007.

Dokumen

Naskah Seminar Pemkab Manggarai 18 Desember 2008 di
Ruteng tentang Kebijakan Pertambangan.

Nota Pastoral Gereja Katolik Keuskupan Ruteng tentang
Lingkungan Hidup, 24 April 2009.

SK Bupati No: HK/287/2007, 5/10/2007.

SK Bupati Manggarai No. 4 Tahun 2004 tentang Penetapan
Lokasi Obyek Wisata di Kabupaten Manggarai.

Surat Pembatasan eksploitasi PT ABM dari masyarakat adat
kampung Luwuk dan Masyarakat Adat Kampung Rawang
22/3/2009 dan 23/3/2009.

Surat Pemuka adat masyarakat Waekara pada 9/1/2009.

Surat Penolakan dari masyarakat adat satar teu pada tanggal 3 April 2009.

Surat Penolakan Masyarakat Kampung Waso pada 24/3/2009.

Surat Protes atas pengambilalihan tanah Masyarakat adat kampung Rokot, 17/3/2009.

Surat Menteri Kehutanan RI, No:S.41/Menhut-VII/2009, 27 Januari 2009.

Surat Bupati Manggarai, No: 711/Tamben/VIII/2008, 25/8/2008.

Surat Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber daya Mineral (2005).

Undang-undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999.

Undang-undang Minerba 2009.

Disertasi

De Ruiters, P.A.C., (2016). *Het mijnwezen in Nederlands-Oost-Indië 1850-1950* (Doctoral dissertation, Utrecht University).

Footnotes

- 1 Degradasi ekologi berkaitan dengan keberlanjutan sosial MLT, terungkap dalam wawancara dengan semua narasumber dari komunitas lokal, aktivis dan pihak Gereja (Maret – April 2009).

BIOGRAFI



Max Regus adalah seorang rohaniwan Katolik dari Keuskupan Ruteng yang lahir di Todo, Manggarai, Flores pada 23 September 1973. Sesudah menyelesaikan pendidikan di Seminari Menengah Pius XII Kisol (1986-1992), Max melanjutkan studi dan pendidikan calon imam di STFK Ledalero dan Seminari Tinggi St. Petrus Ritapiret (1992-2001). Max kemudian ditahbiskan menjadi imam pada Agustus 2001 dan menjalankan karya pastoral di Keuskupan Ruteng. Pada tahun 2007, Max melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia, Depok, untuk meraih gelar Master di bidang Sosiologi (2009). Lalu, Max melakukan riset pasca sarjana di Institute of Social Studies, Erasmus Rotterdam University, Belanda (2012-2014) sebelum menyelesaikan studi doktoral di Graduate School of Humanities, Universitas Tilburg, Belanda (2017). Saat ini, Max menjadi pengajar tetap di Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) St. Paulus, Ruteng, Flores. Max sudah menghasilkan ratusan artikel populer di sejumlah media massa dan menulis beberapa artikel untuk jurnal internasional, serta sejumlah buku. Max juga sedang menyelesaikan proyek riset *post* doktoral dengan

tema *Religion and Peacebuilding in Asia: Muslim and Christian Experiences and perspectives* dengan dukungan *The Institute of Missiology Aachen, Germany* (2018-2020).

